



LAPORAN RAN PE 2024

PENCAPAIAN DAN PEMBELAJARAN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISTILAH	8
AKRONIM	10
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	12
Bab I PENDAHULUAN	22
A. Gambaran Umum.....	23
B. Tujuan dan Metodologi	27
Bab II IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024.....	30
A. Laporan Kegiatan Sekretariat Bersama RAN PE	33
B. Laporan Pilar RAN PE	54
C. Laporan Kelompok Kerja (Pokja) Tematis RAN PE	75
D. Laporan Forum Kemitraan Nasional (FKN) RAN PE	92
E. Laporan Implementasi di Daerah	94
F. Analisa Capaian Output dan Outcome	99
G. <i>Champion Story</i> Aksi PE.....	107
Bab III TANTANGAN DAN HAMBATAN	124
A. Periode Perencanaan.....	125
B. Periode Pelaksanaan	126
Bab IV PEMBELAJARAN DAN TINDAK LANJUT.....	128
A. Pembelajaran.....	129
B. Tindak Lanjut (Rekomendasi)	130
LAMPIRAN	132
DAFTAR PUSTAKA.....	218



Kata Pengantar

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme berakhir di tahun 2024 ini. Selama periode pelaksanaan RAN PE tahun 2024, seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan RAN PE telah berusaha maksimal menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk memastikan meningkatnya hak atas rasa aman setiap warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pun demikian dengan dukungan organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten mengembangkan gagasan-gagasan baru, membangun koordinasi, kolaborasi dan melakukan praktek-praktek nyata di masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

Laporan ini mencoba memberikan gambaran secara komprehensif berbagai capaian pelaksanaan RAN PE tahun 2024 dengan menampilkan data-data capaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta menampilkan beberapa kisah sukses pelaksanaan aksi-aksi RAN PE selama periode 2024 agar dapat dijadikan contoh dan pembelajaran oleh semua pihak dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Akhir kata, semoga Laporan Pelaksanaan RAN PE tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran oleh semua pihak, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya perbaikan strategi dan kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ke depan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi seluruh masyarakat, sebagai wujud keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

RAN PE 2020–2024

Kepala BNPT selaku Ketua Sekretaris Bersama



Daftar Istilah

NAMA ISTILAH	ARTI ISTILAH
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	Keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstremisme dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	Upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE	Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE	Kegiatan dan/atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sekretariat Bersama RAN PE (Sekber RAN PE)	Unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Deradikalisasi	Proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
Disengagement	Perubahan seseorang menjadi menjauh dan keluar dari lingkaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengakibatkan munculnya pergeseran peran (dan identitas) baru di luar organisasi kekerasan.
Radikalisasi	Proses transformasi dari satu kondisi non-ekstremisme berbasis kekerasan ke arah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Resiliensi	Kemampuan seseorang dan/atau kelompok dalam menghadapi, melalui, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat membawa kepada ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

SIPKS Kemendagri	Sistem Informasi Pemetaan Konflik Sosial (SIPKS) merupakan aplikasi yang digunakan oleh Kemendagri untuk mengefektifkan pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi Rencana Aksi Terpadu.
Pokja Pilar	Kelompok kerja yang terdiri dari kementerian/lembaga.
Pokja Tematis	Kelompok Kerja Tematis yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan Pokja Pilar.
Champion Story	Cerita kemenangan dari berbagai tantangan dalam pelaksanaan RAN PE yang begitu banyak memiliki hambatan dan kendala baik dari anggaran dan sebagainya, sehingga cerita tersebut dapat menginspirasi pihak lain. Kata ' <i>champion</i> ' disadur dari bahasa Inggris yang mengandung makna <i>victory</i> atau kemenangan atas berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi
Amanat Aksi	Amanat Aksi merupakan program kerja yang diamanatkan pada kementerian/lembaga pada periode tahun tertentu
Komitmen Aksi	Rencana aksi kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Sekber RAN PE pada awal tahun pelaksanaan Aksi PE.
Realisasi Aksi	Aksi kementerian/lembaga yang terlaksana yang dilaporkan kepada Sekber RAN PE pada akhir tahun pelaksanaan RAN PE.
Komitmen Kegiatan	Rencana kegiatan kementerian/lembaga yang disampaikan kepada Sekber RAN PE pada awal tahun pelaksanaan Aksi PE.
Realisasi Kegiatan	Kegiatan kementerian/lembaga yang terlaksana yang dilaporkan kepada Sekber RAN PE pada akhir tahun pelaksanaan RAN PE.
Outcome	Gambaran perubahan berupa hasil dari kegiatan implementasi RAN PE yang diidentifikasi melalui indikator yang ada di dalam Perban No. 5 Tahun 2021.
Output	Gambaran keluaran yang dihasilkan dari implementasi aksi RAN PE yang diidentifikasi melalui indikator yang ada di dalam Perban No. 5 Tahun 2021.
Penerima Manfaat	Penerima manfaat merupakan kelompok spesifik yang menjadi sasaran dan menerima manfaat dari kegiatan RAN PE.

AIDA	Aliansi Indonesia Damai
AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BIN	Badan Intelijen Negara
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPIP	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CSO	Civil Society Organization
DASPR	Division for Applied Social Psychology Research
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
FATF	Financial Action Task Force
FGD	Focus Discussion Group
FKN	Forum Kemitraan Nasional
FKPT	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FOSPETA	Forum Support Perempuan Tangguh oleh DASPR dan WGWC
GCTF	Global Counter Terrorism Forum
HAM	Hak Asasi Manusia
IMIP	The Indonesia Morowali Industrial Park
IPAC	Institute for Policy Analysis of Conflict
I-KHub	Indonesia Knowledge Hub
K-Hub	Knowledge Hub
K/L	Kementerian/Lembaga
KASN	Komisi Aparatur Sipil Negara
Kejagung	Kejaksaan Agung
Kemen ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemenag	Kementerian Agama
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenhan	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko Polhukam	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkop UKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemenpan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
KemenPPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemensos	Kementerian Sosial
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Kompolnas	Komisi Kepolisian Nasional
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia
LAN	Lembaga Administrasi Negara
Lemhannas	Lembaga Ketahanan Nasional
LLDIKTI	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MAGE	Matriks Analisis Gender dalam Ekstremisme
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
Perban	Peraturan Badan
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pokja	Kelompok Kerja
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPLSP	Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan
PUG	Pengarusutamaan Gender
RAD PE	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme
RAN PE	Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme
Satgas	Satuan Tugas
SE	Surat Edaran
Sekber	Sekretariat Bersama
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKEP	Surat Keputusan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPTLN	Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara
TPPK	Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
UNDP	United Nations Development Programme
UNODC	United Nations on Drugs and Crime
UPT	Unit Pelaksana Teknis
USAID	United States Agency for International Development
WGWC	Working Group on Women and Preventing and Countering Violent Extremism

RINGKASAN

EKSEKUTIF



Laporan ini memuat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran implementasi RAN PE tahun 2024. Implementasi secara umum sepanjang 2020-2024 adalah bagian yang melengkapi laporan ini. Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024. Situasi sepanjang 2024 mencerminkan pencapaian sasaran umum RAN PE, yaitu meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara.

Indeks Terorisme Global (*Global Terrorism Index/GTI*) 2024 menempatkan Indonesia pada urutan ke-31 dalam kategori rendah terdampak terorisme (*low impact of terrorism*). Indeks ini meningkat signifikan dibanding tahun 2023 di mana Indonesia masih berada pada urutan ke-24 dalam kategori medium terdampak terorisme (*medium impact of terrorism*). Perbandingan kedua data GTI ini menunjukkan pula bahwa tidak terjadi serangan terbuka atau “zero terrorist attack” dan tidak adanya korban meninggal akibat serangan teroris sepanjang 2023-2024. Hal ini merupakan

pencapaian yang signifikan dan merupakan hasil dari kerja keras segenap elemen pemerintah dan masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Karena itu, sebagai bentuk penghargaan atas capaian positif tersebut pada 19 Agustus 2024, BNPT menyelenggarakan RAN PE Awards untuk mengapresiasi berbagai pihak yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam implementasi RAN PE.



GAMBAR 1

Keynote Speech Wakil Presiden RI dalam RAN PE Awards

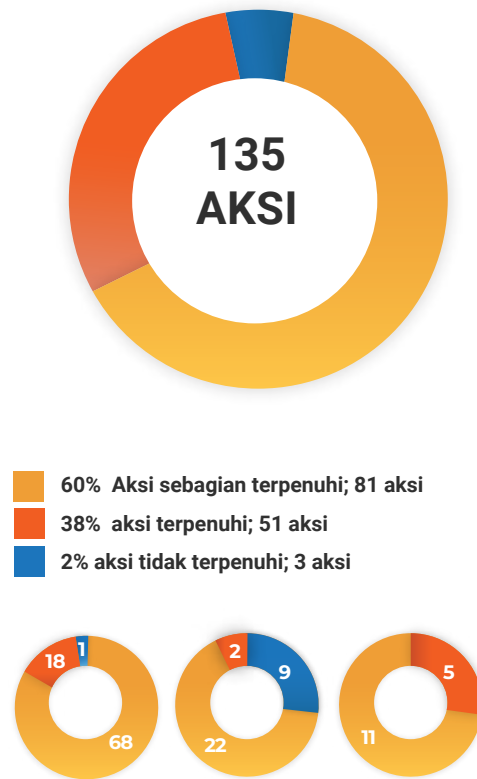
Penghargaan RAN PE Awards diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut beliau juga menyampaikan amanat agar RAN PE yang akan segera berakhir dilanjutkan ke fase kedua. Menurut Wapres, keberlanjutan RAN PE sangat penting karena keberhasilan RAN PE merupakan bukti kolaborasi seluruh pihak dalam melawan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.¹

Implementasi aksi-aksi PE oleh kementerian/lembaga seperti dimandatkan Perpres RAN PE 2020-2024 merupakan salah satu indikator melihat pencapaian kebijakan ini. Dalam empat tahun pelaksanaan, 132 dari 135 Aksi PE (98%) terlaksana. Aksi-aksi tersebut total mencapai 993 kegiatan. Sebanyak 685 kegiatan di Pilar 1, 169 kegiatan di Pilar 2, dan 139 kegiatan di Pilar 3. *Output* yang dihasilkan dari berbagai kegiatan adalah: 90 kebijakan, 707 perangkat dan mekanisme, 271 peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, 163 peningkatan kemampuan aparatur dan lembaga pemerintahan, serta 116 kerja sama bilateral dan multilateral.

Selama pelaksanaan RAN PE periode 2020-2024 terdapat 51 aksi (38%) terpenuhi, 81 aksi (60%) sebagian terpenuhi, dan 3 aksi (2%) tidak terpenuhi. Selama periode pelaksanaan tersebut terjadi perubahan transformatif bagi perempuan, anak, dan korban, dan berhubungan dengan perhatian

¹ Kompas.com, "Implementasi Perpres RAN PE Turunkan Aksi Teror, BNPT Gelar RAN PE Awards", <https://kilasbadannegara.kompas.com/bnpt/read/2024/08/19/21050221/implementasi-perpres-ran-pe-turunkan-aksi-teror-bnpt-gelar-ran-pe-awards>.

Progress Pemenuhan Aksi



GRAFIK 1
Capaian Aksi PE 2020-2024

lebih kepada kelompok sehingga implementasi aksi dalam bentuk kegiatan marak melibatkan partisipasi dan munculnya paradigma dalam membuat intervensi yang lebih bermakna. Kondisi ini dapat dirujuk pada pencapaian Pilar 1, misalnya:

1. Menghasilkan satu SOP Standar Perlakuan terhadap Anak di dalam LPKA dan/atau LPAS hasil kolaborasi Ditjen PAS Kemenkumham dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP).
2. Kajian suara perempuan terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dilakukan Komnas Perempuan.

3. Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang mengintegrasikan pendekatan GEDSI (*Gender, Disability, and Social Inclusion*) yang dilakukan BNPT bekerja sama dengan RuangObrol.id dan didukung oleh Harmoni-USAID.
4. Desa Siap Siaga, yang melibatkan perempuan sebagai penggerak desa untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.
5. Sekolah Damai, yang mengikutsertakan anak muda di sekolah sebagai agen perdamaian.

Pada Pilar 2 terkait adanya ruang bagi organisasi penyintas dan korban terorisme untuk memberikan suara mereka, termasuk upaya terkait kompensasi dalam waktu singkat. Sedangkan di Pilar 3, Indonesia berhasil mendorong dihasilkan satu resolusi terkait anak yang terasosiasi kelompok teroris, yaitu Resolusi PBB tentang *treatment of children associated with terrorist groups, including children who are recruited and exploited by those groups* pada 23 Juli 2024. Resolusi diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Adapun laporan evaluator independen mengidentifikasi capaian RAN PE 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kebijakan: RAN PE menguatkan kebijakan PE di level nasional melalui peraturan kementerian/lembaga, menjustifikasi keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam upaya PE, dan mendorong implementasi RAN PE dari

level terkecil (desa dan komunitas) hingga pemerintah pusat.

2. Instrumen: RAN PE menghasilkan *platform* berbagi data dan informasi yang dapat digunakan sebagai basis data (*database*) dan *baseline* riset dalam melakukan pemetaan untuk intervensi/program yang lebih tepat sasaran dan menyediakan instrumen pemantauan dan pelaporan yang ditujukan untuk mengelola pengetahuan dan mendokumentasikan kerja-kerja PCVE.
3. Strategi: RAN PE memberikan pedoman, petunjuk, dan panduan terukur dalam pelaksanaan upaya PE bagi para pemangku kepentingan serta membantu membumikan pendekatan lunak (*soft approach*), termasuk pendekatan hulu (pencegahan) ke hilir (rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonsiliasi).
4. Peningkatan kapasitas: RAN PE memastikan peningkatan kapasitas dan infrastruktur terjadi secara sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, pembuatan modul pembelajaran. Serta, membantu terbentuknya standarisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas program PCVE.
5. Kerja sama dan kemitraan: RAN PE menjadi wadah yang dapat memfasilitasi berbagai kerja sama dan kemitraan, menjembatai kolaborasi dan sinergi antar aktor serta membumikan pendekatan *whole-government and whole-society*.

Terkait implementasi RAN PE di daerah, saat ini terdapat 8 provinsi dan 13 kabupaten/

kota yang sudah memiliki perangkat penunjang implementasi RAN PE dalam bentuk kebijakan daerah, salah satunya RAD PE. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun untuk kabupaten/kota adalah Kota Pematang Siantar, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kota Singkawang, dan Kota Depok.

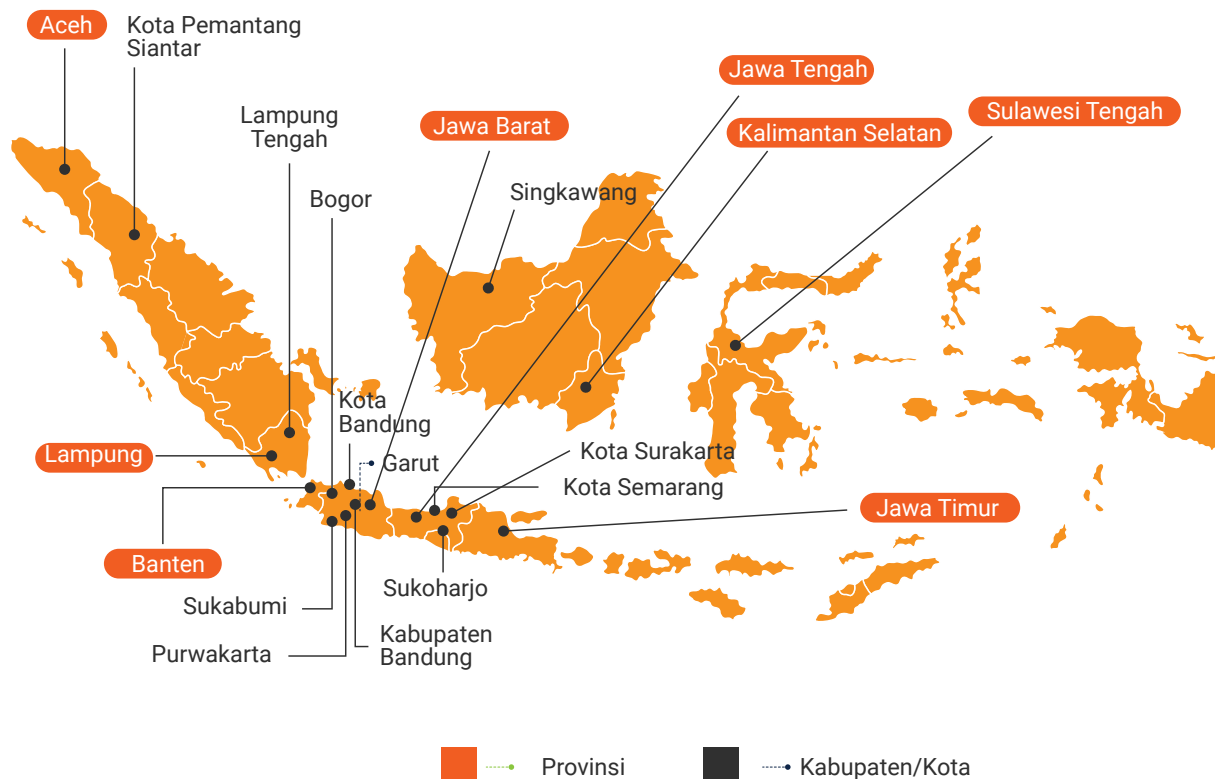
Dari sisi pelaporan, terdapat 11 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan

pelaksanaan RAN PE di daerah, yang terbagi kepada daerah yang telah memiliki RAD PE dan yang belum memiliki RAD PE. Daerah yang sudah melaporkan kepada SIPKS dan telah memiliki RAD PE adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan daerah yang sudah melaporkan dan belum memiliki RAD PE adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jambi, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Lebak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil analisis monitoring gabungan data I-KHub BNPT 2021-2023 dan Kesekretariatan Sekber RAN PE Tahun 2024, terdapat 36.174 orang (21.983 laki-laki dan

GAMBAR 2

Sebaran Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaporkan Pelaksanaan RAN PE di Daerah



14.681 perempuan) penerima manfaat (*beneficiaries*) dari pelaksanaan kegiatan RAN PE.

Evaluasi RAN PE selama periode 2020-2024 dilaksanakan oleh pihak eksternal, yaitu evaluator independen melalui kerja sama BNPT dan UN Women. Evaluasi yang mengidentifikasi dan mengukur koherensi, efektivitas, dan dampak ini mendapatkan beberapa temuan penting. Temuan paling menonjol dari dampak RAN PE

terkait pembangunan tata

kelola. Pelaksanaan

RAN PE berdampak

pada perbaikan

tata kelola,

seperti adanya

mekanisme

pertemuan

rutin antar

kementerian/

lembaga di

tingkat nasional

dan OPD di

tingkat daerah

untuk koordinasi

pelaksanaan RAN PE.

Hasil pertemuan ditin-

dakkanjuti dengan berbagai

bentuk solusi, di antaranya

kerja sama untuk dapat menja-

lankan mandat dalam Perpres

yang sebelumnya belum dapat terlaksana

karena hambatan anggaran. Temuan lainnya

adalah terkait penerapan prinsip-prinsip

RAN PE yang perlu dikembangkan lebih

operasional.

Evaluasi tersebut mengidentifikasi tiga hal yaitu koherensi, efektivitas, dan dampak.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi RAN PE memberikan dampak kepada tata kelola pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Adapun tantangan yang perlu disikapi terkait penerapan prinsip-prinsip RAN PE agar lebih operasional ke depannya. Karena itu RAN PE Fase II Tahun 2025-2029 berbentuk tematik.

Di sisi lain, Pokja Tematis mengidentifikasi capaian yang memiliki dampak

berkelanjutan pada akar

rumpun, yaitu pemben-

tukan Desa Damai di

53 desa oleh Wahid

Foundation dan

AMAN Indonesia.

Halnya

dengan Forum

Kemitraan

Nasional

(FKN), telah

melakukan

pertemuan

tahunan

kemitraan nasional

pada 16 Oktober 2024,

di Jakarta. Di antara

output yang telah ditin-

dakkanjuti dari pertemuan

tersebut adalah tawaran

melaksanakan program bersama dari

perusahaan Panasonic dan bekerja sama

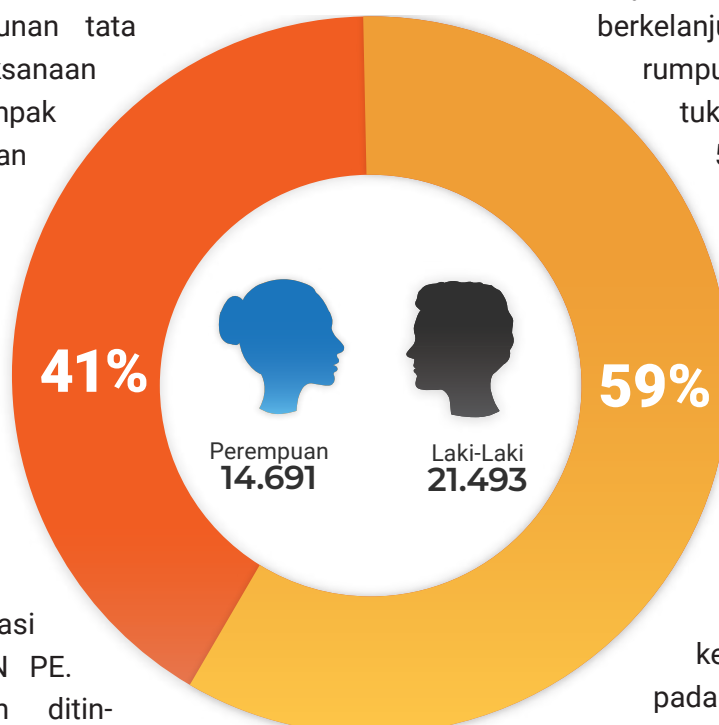
dengan organisasi penyintas (korban aksi

terorisme).

Perubahan nomenklatur diidentifikasi

sebagai salah satu tantangan dan

hambatan utama pelaksanaan RAN PE



GRAFIK 2:
Jumlah Penerima Manfaat Aksi RAN PE

2024, yaitu terkait perubahan penanggung jawab (*person in charge*) aksi PE di kementerian/lembaga. Perubahan ini berdampak memperlambat proses pelaporan aksi RAN PE dari kementerian/lembaga terkait.

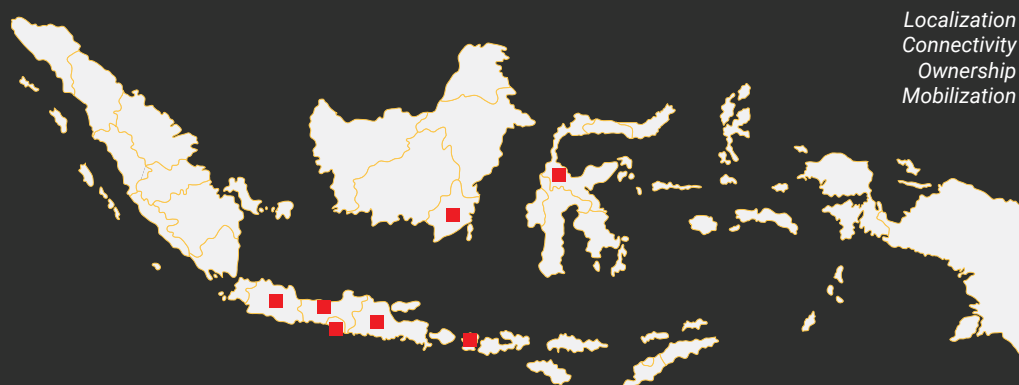
Berdasarkan laporan evaluator independen, tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan RAN PE tahun 2021-2024 adalah:

1. *Mismatch*, yaitu kondisi di mana pendelegasian/disposisi yang kurang tepat dari kementerian/lembaga kepada unit kerja yang dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan RAN PE.
2. *Mismanagement*, kondisi di mana kementerian/lembaga harus mengulang *progress* dalam pelaksanaan RAN PE disebabkan terjadinya mutasi PIC/*focal point* dari kementerian/lembaga dimaksud tanpa sebelumnya ada transfer pengetahuan yang memadai kepada PIC/*focal point* yang baru.
3. Mispersepsi kementerian/lembaga terhadap RAN PE sebagai program yang parsial dan tidak mendukung capaian indikator kinerja kementerian/lembaga.

GAMBAR 3

Sebaran Desa Damai Wahid Foundation dan AMAN Indonesia

Memperkuat Ketangguhan Akar Rumput Membangun 53 Desa Damai (Berkelanjutan) Wahid Foundation dan AMAN Indonesia



Jawa Barat (Bogor, Depok, Temanggung, Wonosobo)
Jawa Tengah (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Salatiga)
Yogyakarta (Gunung Kidul, Sleman)
Jawa Timur (Sumenep, Sampang, Malang, Batu)

Sulawesi Tengah (Poso, Malei)
Kalimantan Selatan (Tanah Laut)
NTB (Bima)

Berdasarkan temuan dan hasil yang diperoleh selama evaluasi, evaluator independen merekomendasikan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan RAN PE tahap selanjutnya. Rekomendasi ditujukan kepada (1) Sekber RAN PE dan/atau kementerian/lembaga; (2) Pokja Tematis, OMS, dan Forum Kemitraan Nasional; dan (3) pemerintah daerah.

Kepada Sekber RAN PE dan/atau kementerian/lembaga direkomendasikan beberapa hal berikut, yaitu:

1. Memastikan keterlibatan pelaksana dari kementerian/lembaga dalam satu siklus kebijakan secara penuh sehingga kementerian/lembaga dapat memahami relevansi RAN PE bagi kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan pemahaman pelaksana, khususnya terkait dalam penerjemahan aksi PE terhadap tupoksi unit kerja.
3. Mendorong pada mekanisme dan komitmen pendanaan yang spesifik ditujukan untuk implementasi RAN PE.
4. Optimalisasi peran *leading sector* dan PIC dari kementerian/lembaga.
5. Memastikan berjalannya manajemen pengetahuan, khususnya proses transfer pengetahuan antar pelaksana di internal kementerian/lembaga.
6. Mendorong pada pendanaan yang lebih kuat bagi Sekber RAN PE agar dapat menjalankan peran orkestrasi.

7. Optimalisasi peran Sekber RAN PE dalam mendorong inisiatif kementerian/lembaga dalam melakukan pelaporan, termasuk memberikan insentif/penghargaan kepada kementerian/lembaga yang telah melaporkan secara optimal.

Selanjutnya kepada kementerian/lembaga yang mendapat mandat dari Perpres RAN PE direkomendasikan:

1. Memastikan penghubung (PIC) dari kementerian/lembaga dapat terlibat secara penuh sehingga memahami relevansi implementasi RAN PE terhadap kementerian/lembaga dimaksud.
2. Peningkatan peran kementerian/lembaga *leading sector* untuk optimalisasi peran PIC dari kementerian/lembaga dalam implementasi.
3. Memastikan berjalannya manajemen pengetahuan, khususnya proses transfer pengetahuan antar pelaksana di internal kementerian/lembaga.

Rekomendasi yang ditujukan kepada Pokja Tematis dan/atau OMS adalah:

1. Membentuk skema pendanaan bagi OMS, termasuk mendorong pengalokasian sumber daya dari pemerintah kepada OMS sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peran OMS.
2. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait pentingnya upaya PE sehingga tidak lagi terjadi resistensi.

3. Meningkatkan pemahaman terkait urgensi RAN PE secara merata di lingkungan pemerintah melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan lokatoh.
4. Mengadvokasi kebijakan perlindungan terhadap pelaksana dari OMS.
5. Memperkuat upaya pengelolaan pengetahuan dan memori institusi dengan memanfaatkan *platform-platform* yang telah ada seperti K-Hub, Women and PCVE hub, dan I-KHub.

Terakhir, evaluator independen merekomendasikan hal-hal berikut kepada pemerintah daerah:

1. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait upaya PE sebagai kebijakan keamanan yang menjadi tanggung jawab bersama.
2. Memastikan berjalannya manajemen pengetahuan, khususnya proses transfer pengetahuan antar pelaksana di internal pemerintah daerah.
3. Mendorong pada mekanisme dan komitmen pendanaan yang spesifik ditujukan untuk implementasi RAD PE.
4. Membuat lebih banyak forum-forum yang dapat mempertemukan pemerintah daerah dan OMS untuk duduk satu meja dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan RAD PE.
5. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan aparat penegak hukum terkait pemberian bantuan kepada mantan narapidana terorisme (napiter) melalui

penyelenggaraan rapat koordinasi terkait penanganan mantan napiter.

6. Mengadvokasi kebijakan perlindungan terhadap pelaksana serta menghilangkan stigma buruk terkait keterlibatan ASN dalam upaya PE.
7. Membuat kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) terkait dengan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD PE.

Adapun evaluasi Kesekretariatan Sekber RAN PE sendiri menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan RAN PE 2020-2024 perlu dipertahankan, khususnya pada aspek pencegahan, karena penangkapan terduga teroris masih terus berlangsung. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan keberadaan kelompok teroris masih eksis.

Tantangan dan hambatan terdapat pada kerangka aksi yang belum dilaksanakan dan situasi yang ada. Terdapat dua aksi PE yang belum terlaksana sepanjang 2020-2024 disebabkan oleh: (1) keterbatasan anggaran pelaksana karena pos-pos anggaran dalam unit kerja telah terisi oleh kegiatan rutin dari unit kerja; (2) belum terlaksananya aksi prasyarat sehingga aksi yang menjadi kelanjutan/turunan dari aksi tersebut secara langsung tidak dapat dilaksanakan; (3) pelaksanaan aksi diberikan kepada unit kerja yang tidak memiliki wewenang/tupoksi yang sesuai dengan aksi yang harus dilaksanakan; dan (4) dalam pelaksanaan aksi PE oleh kementerian/lembaga, terdapat kementerian/lembaga yang belum melaporkan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat

dilacak apakah aksi tersebut sudah/belum dilaksanakan.

Selain itu, tantangan dan hambatan saat ini yang cukup signifikan adalah terkait informasi di ruang siber yang dapat berkontribusi pada proses radikalisi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.² Global Trend 2040 mengindikasikan bahwa persoalan sampai tahun 2040 akan terjadi ketegangan dan fragmentasi di dunia yang dapat menyebabkan konflik, khususnya keberadaan teknologi yang memediasi kehidupan nyata.³ Bentuk-bentuk mediasi dapat memperburuk atau memperbaiki situasi tergantung pengelolaan dan penguasaan terhadap perangkat tersebut, karena sebagai contoh, kelompok ekstremis kekerasan juga dapat memanfaatkan teknologi untuk penyebaran informasi kekerasan yang mengarah pada terorisme.⁴ Dalam merespons hal ini, BNPT selaku *leading sector* pada aksi RAN PE terkait penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Komunikasi Strategis Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme telah meram-pungkan aksi tersebut di tahun 2024.

Karenanya, pada RAN PE fase berikutnya tahun 2025-2029, aksi pencegahan dan

penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berfokus pada keamanan insani (*human security*) yang menitikberatkan pada isu tematik, sehingga diharapkan lebih fokus pada target sasaran yang akan ditangani. Tematik tersebut adalah: (1) Kesiapsiagaan Nasional; (2) Ketahanan Komunitas dan Keluarga; (3) Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja; (4) Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Anak; (5) Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem Elektronik; (6) Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (*Disengagement*) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; (7) Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan; (8) Pelindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban; dan (9) Kemitraan (Sinergisitas) dan Kerja Sama Internasional.

² The Soufan Centre Intel Brief, "Terrorist Groups Looking to AI to Enhance Propaganda and Recruitment Efforts", 3rd October 2024, at <https://mailchi.mp/thesoufancenter/terrorist-groups-looking-to-ai-to-enhance-propaganda-and-recruitment-efforts?e=f761bb24da>.

³ The US National Intelligence Council; *Global Trend 2040*; (US Intelligence: 2021); dapat diakses di <https://online-library.wiley.com/doi/10.1111/padr.12413#:~:text=The%20latest%20in%20this%20quadrennial,%2C%20state%2C%20and%20international%20system>.

⁴ Mathias Risse, *Political Theory of the Digital Age*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ditujukan untuk memberikan dampak kepada rasa aman masyarakat melalui *outcome* berupa meningkatnya perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perban Nomor 5 Tahun 2021 sebagai panduan evaluasi dan monitoring RAN PE menyebutkan indikator pencapaian yang terukur melalui berbagai bentuk: (1) meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat; (2) meningkatnya skor indeks rasa aman; (3) menurunnya aksi teror; dan (4) meningkatnya skor indeks toleransi.

Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dihubungkan dengan pemacu (*drivers*) dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme menjadi indikator pengukuran. Pemacu (*drivers*) terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yaitu (1) kondisi kondusif dan konteks struktural; dan (2) proses radikalasi. Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan proses radikalasi dijabarkan menjadi beberapa faktor, antara lain latar belakang dan motivasi individu, memposisikan diri sebagai korban (*victimization*), dan kekecewaan kolektif, serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

Peningkatan ekonomi masyarakat dalam hubungannya dengan pemacu (*drivers*) ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ditinjau dari keamanan insani (*human security*), yang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, angka inflasi, dan pendapatan negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa IPM Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibanding tahun sebelumnya 2022 (73,77). Selama 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak.⁵

⁵ Badan Pusat Statistik, 15 November 2023. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77)." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/ indeks-pembangunan-manusia-ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin-0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya-73-77-.html>.

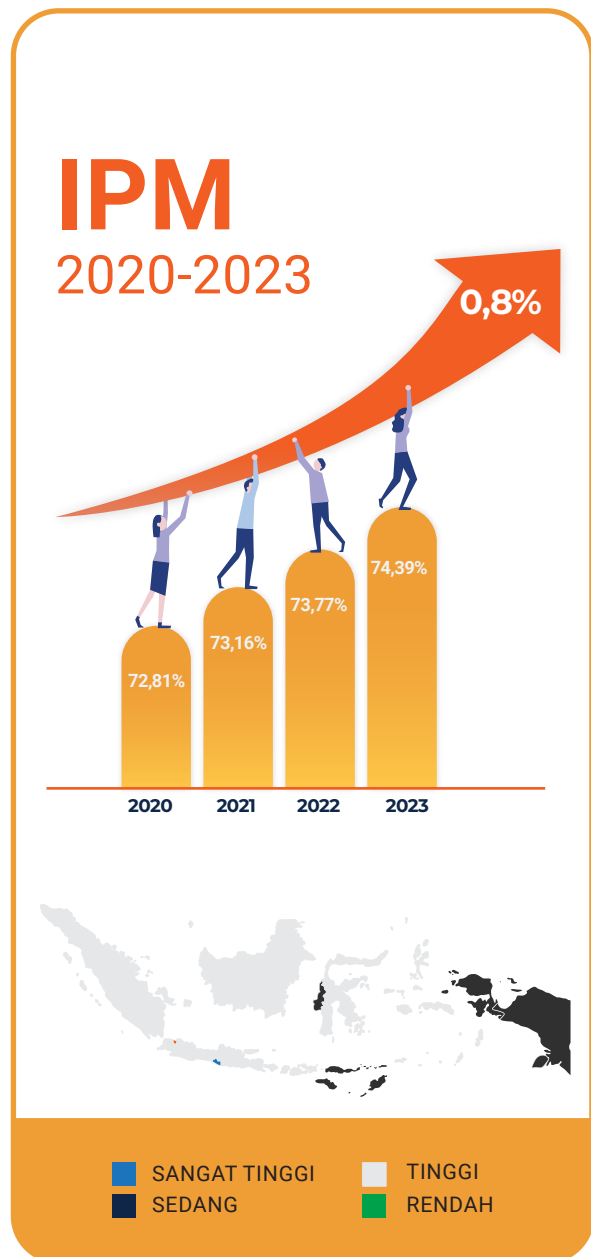
Sementara tingkat pengangguran turun sedikit selama periode yang sama dari tahun 2022 ke tahun 2023, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 sebanyak 146,62 juta orang, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,24 persen poin. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,15 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,95 persen poin dan 0,33 persen poin dibandingkan Februari 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 5,45 persen, turun sebesar 0,38 persen dibandingkan pada Februari 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta aktivitas jasa lainnya, masing-masing sebesar 0,51 juta orang.⁶ Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding pada Agustus 2023.⁷

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, 5 Mei 2023. "Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>.

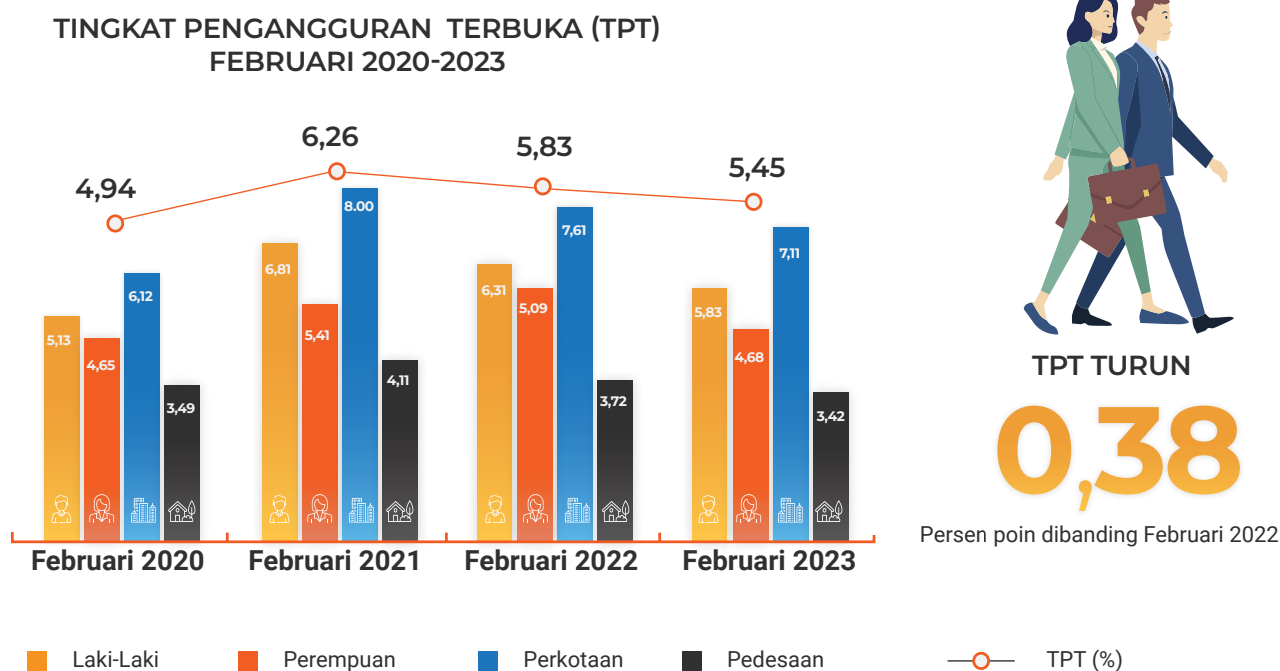
⁷ Badan Pusat Statistik, 5 November 2024. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persen-.html>.

GAMBAR 1.1

Infografis pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Untuk pengukuran rasa aman dapat diukur dengan meninjau Indeks Terorisme Global atau *Global Terrorism Index* (GTI) 2024, yang menyatakan bahwa posisi Indonesia berada pada kategori terdampak rendah terorisme (*low impact of terrorism*), meningkat dari posisi terdampak sedang (*medium impact of terrorism*) pada tahun sebelumnya (2023).



GAMBAR 1.2.
Infografis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian ini merupakan salah satu pencapaian besar Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dan/atau ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Hal ini ditunjukkan khususnya dengan tidak adanya serangan terbuka (*zero terrorist attacks*), khususnya sepanjang tahun 2023.

Pengukuran rasa aman, ditinjau dari indeks perdamaian di Indonesia melalui *Peace Index 2024*, Indonesia masih pada kategori tinggi (*high peace*), walaupun terjadi kemunduran dari tahun sebelumnya yang turun 4 peringkat. Indeks Perdamaian Global mencakup 99,7% populasi dunia dan dihitung dengan menggunakan 23 indikator kualitatif dan kuantitatif dari sumber-sumber yang sangat terpercaya, dan mengukur kondisi perdamaian di tiga domain: (1)

tingkat keselamatan dan keamanan masyarakat; (2) tingkat konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung; dan (3) tingkat militerisasi.⁸

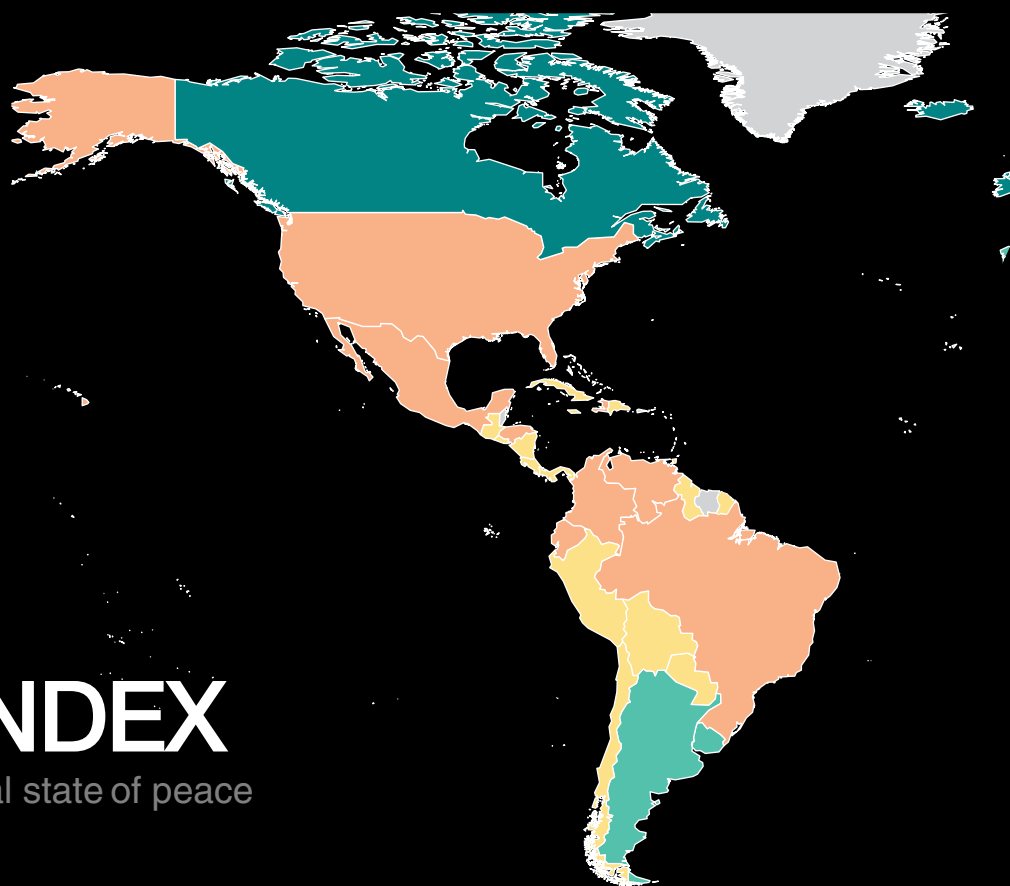
Sekalipun kondisi pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dengan berakhirnya RAN PE Fase 1 Tahun 2020-2024, tetapi perlu juga diperhatikan potensi ancaman terhadap hak atas rasa aman yang perlu disikapi oleh berbagai pihak. Laporan *Global Risk* tahun 2024 menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi terlarang adalah hal yang menjadi paling berisiko di seluruh dunia, khususnya dengan adanya teknologi. Ini adalah salah satu dari

⁸ Institute for Economics & Peace. 2024. "Global Peace Index 2024: Measuring Peace in a Complex World." <https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf>.

2024 GLOBAL PEACE INDEX

A snapshot of the global state of peace

THE STATE OF PEACE



GAMBAR 1.3

Indeks Terorisme Global 2024

RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE
1	Iceland	1.112	↔	29	Qatar	1.656	↓ 9	57	Zambia	1.948	↑ 2
2	Ireland	1.303	↔	30	Latvia	1.661	↓ 3	58	Costa Rica	1.95	↓ 5
3	Austria	1.313	↑ 1	31	Lithuania	1.672	↑ 6	59	Kazakhstan	1.954	↑ 19
4	New Zealand	1.323	↓ 1	32	Poland	1.678	↓ 3	60	Uzbekistan	1.957	↑ 15
5	Singapore	1.339	↑ 3	33	Italy	1.692	↔	61	Bosnia and Herzegovina	1.961	↓ 5
6	Switzerland	1.35	↑ 3	34	United Kingdom	1.703	↓ 2	62	Namibia	1.972	↑ 1
7	Portugal	1.372	↓ 1	35	Montenegro	1.746	↑ 5	63	Moldova	1.976	↓ 2
8	Denmark	1.382	↓ 3	36	Romania	1.755	↓ 1	64	Chile	1.978	↓ 10
9	Slovenia	1.395	↓ 2	37	Oman	1.761	↑ 4	65	Tanzania	1.987	↑ 11
10	Malaysia	1.427	↑ 2	38	North Macedonia	1.764	↓ 2	66	Sierra Leone	1.993	↓ 23
11	Canada	1.449	↓ 1	39	Sweden	1.782	↓ 5	67	Jordan	1.998	↓ 9
12	Czechia	1.459	↓ 1	40	Greece	1.793	↑ 17	68	Bolivia	2.009	↓ 2
13	Finland	1.474	↑ 2	41	Vietnam	1.802	↓ 3	69	Liberia	2.025	↓ 5
14	Hungary	1.502	↑ 4	42	Albania	1.809	↓ 3	70	Cambodia	2.028	↓ 6
15	Croatia	1.504	↑ 1	43	Taiwan	1.818	↓ 1	71	Tajikistan	2.035	↑ 19
16	Belgium	1.51	↓ 2	44	Madagascar	1.838	↑ 2	72	Angola	2.043	↑ 19
17	Japan	1.525	↓ 4	45	Mongolia	1.845	↔	=73	Paraguay	2.044	↓ 4
18	Netherlands	1.527	↑ 1	46	South Korea	1.848	↑ 6	=73	Tunisia	2.044	↑ 6
19	Australia	1.536	↑ 2	47	Argentina	1.855	↑ 2	75	Thailand	2.048	↑ 11
20	Germany	1.542	↓ 4	48	Indonesia	1.857	↓ 4	76	Armenia	2.052	↓ 2
21	Bhutan	1.564	↑ 3	49	Laos	1.861	↑ 1	77	Kyrgyz Republic	2.053	↑ 18
22	Mauritius	1.577	↔	50	Botswana	1.863	↓ 3	78	Morocco	2.054	↑ 14
23	Spain	1.597	↑ 7	51	Timor-Leste	1.882	↓ 3	79	Malawi	2.063	↓ 12
24	Estonia	1.615	↑ 3	52	Uruguay	1.893	↑ 3	80	Nepal	2.069	↓ 12
25	Kuwait	1.622	↑ 1	53	United Arab Emirates	1.897	↑ 31	81	Bahrain	2.072	↑ 16
26	Bulgaria	1.629	↑ 5	54	Serbia	1.93	↑ 8	=82	The Gambia	2.079	↓ 13
27	Slovakia	1.634	↓ 2	55	Ghana	1.938	↓ 5	=82	Turkmenistan	2.079	↓ 2
28	Norway	1.638	↓ 5	56	Kosovo	1.945	↑ 3				

sepuluh risiko teratas yang paling terhubung dalam jaringan kejahatan transnasional, yang terlihat didorong oleh kemerosotan ekonomi, kurangnya peluang ekonomi, ketidakamanan siber, dan migrasi paksa, bersama dengan pengangguran, kekerasan di dalam negeri, dan konfrontasi geo-ekonomi.⁹

Di Indonesia sendiri, potensi bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tahun 2024 mengemuka dengan munculnya ancaman teror saat wisuda Universitas Parahyangan Bandung pada 15 November 2024.¹⁰ Karena itu, upaya pencegahan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik tetap harus dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan). Sejalan dengan Laporan Global Risk 2024, temuan Outlook I-KHub 2024,¹¹ Global Risk 2024, Global Trend 2040 yang dirilis National Intelligence Council (2021),¹² United Nations Pact for the Future¹³ menunjukkan bahwa potensi ancaman di masa depan adalah terkait dengan penyalahgunaan ruang siber untuk ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

⁹ World Economic Forum. 2024. "Global Risks Report 2024." <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/>.

¹⁰ Detikjabar.com. 15 November 2024. "Penjelasan Polisi soal Ancaman Teror di Kampus Unpar Bandung." <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7639521/penjelasan-polisi-soal-ancaman-teror-di-kampus-unpar-bandung>.

¹¹ I-KHub BNPT. 2024. "Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook".

¹² The Strategic Futures Group. 2021. "A More Contested World." Report. A Publication of the National Intelligence Council. <https://www.dni.gov/nic/globaltrends>.

¹³ United Nations. 2024. "The Pact for the Future." Report A/RES/79/1. General Assembly. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/22/pdf/n2427222.pdf>.

B. TUJUAN DAN METODOLOGI

1. Tujuan

RAN PE memiliki tujuan besar untuk memenuhi hak atas rasa aman warga negara Indonesia. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, seperti tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021, rencana aksi PE bertujuan untuk menangani pemacu (*drivers*) terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, yaitu (1) kondisi kondusif dan konteks struktural; dan (2) proses radikalisi. Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisi di dalam Lembaga Masyarakat. Sedangkan proses radikalisi dijabarkan menjadi beberapa faktor, antara lain latar belakang dan motivasi individu, memposisikan diri sebagai korban (*victimization*), dan kekecewaan kolektif, serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

RAN PE berfungsi sebagai pengarah koordinasi antar-kementerian dan lembaga, dalam bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan daya tangkal, menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah terorisme. RAN PE

memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Karena itu, tujuan dari Laporan Pelaksanaan RAN PE tahun 2024 adalah menyediakan dan menyampaikan informasi kepada Presiden RI terkait pelaksanaan RAN PE selama tahun 2024 yang memuat hasil akhir pelaksanaan aksi dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana aksi beserta capaian target kegiatan, hambatan selama pelaksanaan rencana aksi, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pada tahun selanjutnya.

2. Metodologi

Analisis dalam laporan ini menggambarkan hasil evaluasi dengan metode campuran atau *mixed method*, yaitu dengan menghadirkan data kuantitatif pelaksanaan Aksi PE oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), pemangku kepentingan di masyarakat, dan mitra pembangunan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang mempunyai perhatian terhadap *preventing and countering violent extremism* (PCVE) di Indonesia. Data kuantitatif disampaikan sedemikian rupa untuk kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, termasuk di dalamnya menghadirkan *champion story*. Analisa capaian yang digunakan dalam laporan ini berbasis *outcome-oriented* yang sudah diamanatkan

di dalam Peraturan BNPT (Perban) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024.

Data merupakan bagian terpenting dalam penyusunan dan penulisan sebuah laporan, termasuk Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024. Data dimaksud diperoleh melalui proses pemantauan dan evaluasi kinerja kementerian/lembaga dalam melaksanakan Aksi PE serta kontribusi OMS dan pemangku kepentingan di masyarakat selama tahun 2024. Sebagaimana dijelaskan, sumber data yang diolah, dianalisis, dan kemudian ditampilkan dalam Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 adalah: (1) data pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari komitmen dan realisasi kegiatan serta anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Aksi PE, baik berasal dari kementerian/lembaga yang direpresentasikan oleh Pokja Pilar 1, 2, dan 3; dan (2) data program dan kegiatan dari OMS dan pemangku kepentingan di masyarakat yang tergabung dalam Pokja Tematis dan Forum Kemitraan Nasional (FKN) yang memiliki perhatian terhadap pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan; dan (3) data program dan kegiatan yang berasal dari mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap PCVE. Data-data tersebut dipilih dan dipilah sehingga dapat diolah dan dianalisis, terutama dari kementerian/lembaga.

Sedangkan data program dan kegiatan OMS dalam Pokja Tematis dan pemangku kepentingan di masyarakat dalam FKN, serta mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap PCVE juga dipilih dan

dipilah secara ketat, yang berkontribusi pada sasaran khusus (*outcome*) dan sasaran umum (tujuan/dampak) RAN PE selama tahun 2023. Selain itu, cerita-cerita perubahan yang merupakan capaian dari Aksi PE kementerian/lembaga dan OMS dalam Pokja Tematis yang dinilai berhasil, kuat, berkelanjutan, dan berdampak positif serta merepresentasikan setiap Pilar dan Pokja Tematis RAN PE juga disampaikan.

Dalam laporan ini, cerita-cerita perubahan yang ada dalam prosesnya juga dianalisis secara ketat serta dikemas dengan istilah *champion story*. Harapannya, *champion story* yang disampaikan menjadi pembelajaran dan dapat direplikasi oleh pemangku kepentingan lainnya di masa depan. Cara

untuk mengukur pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang digunakan adalah dengan memantau dan mengevaluasi komitmen kegiatan dan realisasi kegiatan serta realisasi anggaran untuk melaksanakan Aksi PE dari Kementerian/Lembaga; sedangkan pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan terkait PCVE yang berhubungan dengan RAN PE yang dilakukan oleh OMS dalam Pokja Tematis dan pemangku kepentingan di masyarakat dalam FKN merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 oleh 36 OMS yang tergabung dalam Pokja Tematis dan Forum Kemitraan Nasional.

BAB II

IMPLEMENTASI RAN PE TAHUN 2024



Matriks RAN PE merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan selama empat tahun sejak 2021 hingga 2024 dan secara keseluruhan terdiri dari 135 aksi. Aksi PE selama empat tahun tersebut dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan RAN PE. Aksi PE di tahun 2024 sebagaimana amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab setiap aksi dari kementerian/lembaga terkait sebanyak 107 aksi PE, yang terdiri 72 aksi PE di Pilar 1, 22 aksi PE di Pilar 2, dan 13 aksi PE di Pilar 3.

Aksi PE tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, namun juga oleh pemerintah daerah yang telah memiliki RAD PE baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Terkait RAD PE, hingga penghujung tahun 2024 terdapat 8 provinsi dan 13 kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki RAD PE. Selain itu, sebagai unsur pelaksana lain RAN PE, seperti Kelompok Kerja (Pokja) Tematis¹⁴ dan Forum Kemitraan Nasional (FKN)¹⁵ yang di antaranya terdiri dari pemangku kepentingan di masyarakat yang memiliki *concern*, program, dan kegiatan dalam upaya *preventing and countering violent extremism* (PCVE) di Indonesia, juga memiliki korelasi langsung dengan pelaksanaan aksi PE di dalam RAN PE.

Sebagaimana pelaksanaan aksi PE tahun-tahun sebelumnya (2021-2023), pada

dasarnya setiap aksi PE dalam matriks kerja RAN PE yang diamanatkan pada tahun 2024 oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021 merupakan prioritas, yang tidak hanya diisi, namun juga dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi penanggung jawab setiap aksi PE dan kegiatan konkret berdasarkan keluaran yang telah ditetapkan. Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE dengan tenaga pendukung di dalamnya, bertugas mengawal, memantau, dan mengevaluasi terlaksananya keseluruhan aksi dan kegiatan di dalam matriks RAN PE Tahun 2024. Secara formal, tenaga pendukung Sekber RAN PE dinamakan sebagai Kesekretariatan Sekber RAN PE.

Jika menepok kembali isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian dalam upaya tindak lanjut Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2023, bagi Kesekretariatan Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi perhatian khusus dan dianggap penting dalam pelaksanaan RAN PE selama tahun 2024, di antaranya yaitu: **pertama**, persiapan proses dan perumusan RAN PE tahun 2025-2029. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi RAN PE

¹⁴ Keputusan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2024. Sebelumnya telah terbit pula Keputusan Kepala BNPT Nomor 299 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tematis RAN PE Tahun 2023-2024.

¹⁵ Keputusan Kepala BNPT Nomor 103 Tahun 2023 tentang Forum Kemitraan Nasional Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Masyarakat dalam RAN PE Tahun 2023-2024.

tahun 2020-2024, namun di sisi lain merupakan masa transisi menuju penyiapan, perumusan, dan penyusunan RAN PE Fase II Tahun 2025-2029. Karena itu, Sekber RAN PE melalui Kepala BNPT mengajukan Izin Prakarsa kepada Presiden RI untuk menerbitkan Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 pada April 2024, yang dalam perjalanannya oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara diarahkan untuk dimasukkan ke dalam Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Presiden Tahun 2025 melalui Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, untuk memperkaya dan mempertajam materi substansi dan draf matriks RAN PE Tahun 2025-2029, Kesekretariatan Sekber RAN PE berkolaborasi secara intensif dengan OMS, dalam hal ini Setara Institute, dan mitra pembangunan (Harmoni-USAID), menyelenggarakan serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) 9 Tematik RAN PE tahun 2025-2029.

Kedua, evaluasi pelaksanaan RAN PE selama empat tahun sejak 2021-2024. Evaluasi dilakukan oleh evaluator independen dari UN Women yang dalam prosesnya difasilitasi dan didukung oleh Kesekretariatan Sekber RAN, mulai dari desain operasional evaluasi, metodologi, pengumpulan dan klasifikasi data, hingga hasil akhir laporan evaluasi. Hasil evaluasi yang berupa laporan telah dipresentasikan oleh evaluator independen di dalam rapat bersama Kesekretariatan Sekber RAN PE dan dalam kegiatan RAN PE Awards pada Agustus 2024.

Ketiga, penguatan materi RAN PE bagi kementerian/lembaga penanggung jawab aksi PE dan kolaborasi intensif dengan kalangan akademisi dan OMS. Penguatan

materi berkaitan dengan materi HAM dan gender, penunjang kegiatan K/L yang perlu ditingkatkan, serta pelaporan pelaksanaan RAN PE bagi K/L dan pemerintah daerah. **Keempat**, selain penguatan materi RAN PE, pelaksanaan RAN PE di daerah juga menjadi prioritas yang didorong oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE agar daerah menyusun dan memiliki RAD PE yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sambutan positif dan antusiasme pemerintah daerah menjadi modal untuk tindak lanjut dalam mendorong RAD PE secara lebih luas dan intensif pada tahun 2024.

Kelima, prioritas lain yang juga menjadi perhatian khusus pada tahun 2024 adalah pengembangan dan pemutakhiran situs web I-KHub, terutama terkait pelaksanaan RAN PE. Selain melengkapi data dan pemetaan yang dapat diakses secara luas oleh publik maupun secara terbatas melalui situs I-KHub.id, Sekretariat I-KHub bekerja sama dengan Kesekretariatan Sekber RAN PE melakukan sosialisasi penguatan inisiatif lokal bagi pemangku kepentingan di berbagai daerah dan digitalisasi pelaporan kegiatan RAN PE melalui I-KHub.

Terakhir dan yang terpenting, Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE secara intensif dan reguler menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, Pokja Tematis, dan FKN dalam upaya memastikan terlaksananya setiap aksi PE, serta program dan kegiatan OMS dan pemangku kepentingan di masyarakat yang berkaitan dengan RAN PE di tahun 2024.

A. LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIAT BERSAMA RAN PE

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga; mengkompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; serta merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE. Sekber RAN PE terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 6 Perpres Nomor 7 Tahun 2021). Dalam melaksanakan tugasnya, Sekber RAN PE membentuk Tim Kesekretariatan yang terdiri dari personel perbantuan BNPT (Tenaga Pendukung). Sepanjang tahun 2024, Sekber RAN PE telah melaksanakan beberapa kegiatan penting dan sangat menunjang pelaksanaan RAN PE. Kegiatan-kegiatan dimaksud terbagi dalam dua klaster utama, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Kegiatan rutin adalah serangkaian kegiatan yang secara rutin dilaksanakan langsung oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE dan merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan kegiatan non-rutin merupakan serangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE dan bekerja

sama dengan mitra-mitra Kesekretariatan Sekber RAN PE, yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, OMS, pemangku kepentingan di masyarakat, maupun mitra pembangunan yang menaruh perhatian pada upaya PCVE di Indonesia.

Dengan dua tipologi klaster kegiatan di atas, total kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekber RAN PE selama tahun 2024 sebanyak 118 kegiatan. Jumlah ini meningkat seratus persen lebih dibanding kegiatan di tahun 2023, yang sebanyak 57 kegiatan. Sebagian dari kegiatan Sekber RAN PE di tahun 2024 (48,31%) berhubungan dengan penguatan kapasitas dan peningkatan pengetahuan, pendampingan dan penguatan *focal point* Kementerian/Lembaga termasuk *focal point* setiap aksi PE tahun 2024 dari internal BNPT, menghadiri undangan kegiatan Kementerian/Lembaga pelaksana aksi PE dan pihak eksternal, serangkaian pertemuan dan FGD evaluasi RAN PE bersama tim evaluator independen, sosialisasi dan

diseminasi RAN PE, monitoring dan evaluasi, penyusunan pedoman/panduan, serta memberikan masukan terhadap hasil penelitian (evaluasi).

Sepanjang tahun 2024, Sekber RAN PE telah merespons berbagai kebutuhan, pertanyaan, keluhan, dan temuan lapangan, yang semata-mata ditujukan untuk penguatan RAN PE agar berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan dan dimandatkan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu banyaknya kegiatan yang dilaksanakan Kesekretariatan Sekber RAN PE selama tahun 2024 baik langsung maupun tidak langsung, tidak semua kegiatan tersebut disampaikan di dalam laporan ini.

Di sisi lain, walaupun jumlah personel pelaksana (Tenaga Pendukung) di dalam Kesekretariatan Sekber RAN PE cukup terbatas dengan segala tantangan, dinamika, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, namun demikian keseluruhan kegiatan sepanjang tahun 2024, khususnya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE dapat terlaksana dengan baik. Berikut uraian sebagian kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekber RAN PE.

Pertama, kegiatan rutin. Serangkaian kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE selama tahun 2024 di antaranya, yaitu:

1. Rapat internal rutin Kesekretariatan Sekber RAN PE. Beberapa *concern* yang didiskusikan dalam rapat internal

Kesekretariatan Sekber RAN PE yaitu: (1) pelaksanaan Rakor Pokja Pilar, Pokja Tematis, dan Forum Kemitraan Nasional; (2) pelaksanaan Rakor Sekber RAN PE; (3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (4) persiapan pelaksanaan FGD tematik RAN PE Tahun 2025-2029; (5) keberlanjutan dan Perpres RAN PE Tahun 2025-2029; (6) evaluasi pelaksanaan RAN PE 2020-2024 oleh evaluator independen; (7) potensi kerja sama dengan lintas kementerian/lembaga, OMS, pemangku kepentingan di masyarakat, dan mitra pembangunan dalam upaya penguatan pelaksanaan RAN PE; (8) rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengakselerasi pelaksanaan RAN PE Tahun 2024; (9) rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (saat ini Kementerian Hukum) dan Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) terkait dimasukkannya draf Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 di dalam Program Penyusunan (Progsun) Perpres Tahun 2025; dan (10) hal-hal lain yang relevan dan berkaitan langsung dengan wewenang, tugas, dan fungsi Sekber RAN PE dan Tenaga Pendukungnya (Kesekretariatan Sekber RAN PE) sebagaimana amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Perban Nomor 5 Tahun 2021.

2. Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja (Pokja) Pilar 1, 2, 3, dan Pokja Tematis, yang dihadiri oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE, kementerian/lembaga pelaksana RAN PE, dan anggota Pokja Tematis. Rakor

merupakan forum yang disediakan dan difasilitasi oleh Sekber RAN PE terkait pencapaian pelaksanaan RAN PE, sebagaimana amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dilaksanakan oleh Sekber RAN PE paling sedikit 6 bulan sekali (Pasal 10). Melalui rakor, menteri dan pimpinan lembaga menyampaikan capaian pelaksanaan RAN PE yang menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga yang bersangkutan secara periodik setiap 6 bulan sekali (Pasal 9).

Di tahun 2024 Sekber RAN PE melaksanakan rakor sebanyak dua kali. Rakor pertama pada 19-22 Maret 2024 dan rakor kedua pada 29-30 Oktober serta 1 dan 5 November. Kedua rakor tersebut

dilaksanakan di Jakarta. Rakor pertama bertujuan membahas langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE dan rencana kerja sama dengan Pokja Tematis di Tahun 2024. Sebagai langkah tindak lanjut pasca rakor pertama, Pokja Pilar 1, 2, dan 3 berkomitmen melakukan pengisian laporan rencana dan komitmen pelaksanaan RAN PE tahun 2024 melalui Form A (Format Komitmen dan Kontribusi) dan Form B (Format Monitoring Perencanaan) ke dalam *platform* I-KHub.

Sedangkan rakor kedua Pokja Pilar 1, 2, 3, dan Pokja Tematis bertujuan membahas *progress* pelaksanaan dan mengidentifikasi realisasi pelaksanaan RAN PE di tahun 2024. Sebagai tindak lanjut

GAMBAR 2.1.

Rakor Pertama Pokja Pilar 1, 2, 3, dan Pokja Tematis



paska rakor kedua, Pokja Pilar 1, 2, dan 3 menyepakati untuk mengumpulkan Form Komitmen dan Pelaksanaan RAN PE tahun 2024 selambat-lambatnya 8 November 2024 melalui *platform* I-KHub. Rakor Pokja K/L juga membahas Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024. Sebagaimana amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024, laporan pelaksanaan RAN PE yang dilaksanakan tahun 2024 dan disampaikan oleh kementerian/lembaga melalui situs I-KHub maupun langsung ke Kesekretariatan Sekber RAN PE juga sebagai bahan utama bagi Kesekretariatan Sekber RAN PE dalam mengkompilasi dan menyusun Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Sekber RAN PE kepada Presiden RI.

Kementerian/lembaga yang tidak hadir dalam Rakor Kedua Pokja Pilar 1 yaitu BPIP, Dewan Pers, Kemen ESDM, Kemenag, Kemenaker, Kemenpan RB, dan KPAI. Kementerian/lembaga yang tidak hadir dalam Rakor Kedua Pokja Pilar 2 adalah Kemenag, Kemensos, dan Kemenpan RB. Sedangkan kementerian/lembaga yang tidak menghadiri Rakor Kedua Pokja Pilar 3 adalah Ditjen AHU Kemenkumham. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Rakor Kedua Pokja Tematis disepakati bahwa Pokja Tematis akan melakukan pemetaan kembali terkait keanggotaan dan memperkuat koordinator di setiap tema RAN PE Tahun 2025-2029.

3. Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kemitraan Nasional (FKN), yang diselenggarakan pada 16 Oktober 2024 di Jakarta. Rakor FKN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran, fungsi, dan jejaring FKN RAN PE melalui koordinasi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan di masyarakat dan terselenggara atas kerja sama Kesekretariatan Sekber RAN PE dan Wahid Foundation sebagai *co-chair* FKN dari unsur pemangku kepentingan masyarakat.

GAMBAR 2.2

Rakor Kedua Pokja Pilar 1, 2, 3, dan Pokja Tematis



Selain perwakilan pemerintah, Rakor FKN juga dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan di masyarakat lainnya (OMS, sektor swasta, lembaga filantropi, perguruan tinggi, dan media). Rakor FKN diawali dengan sesi pemaparan yang menggali pengalaman kemitraan antar pemangku kepentingan yang diwakili oleh OMS, pemerintah (BNPT), lembaga filantropi, sektor swasta, dan akademisi. Kemudian dilanjutkan dengan *break-out session* ke dalam empat tema untuk

berbagi pengalaman dan mendapatkan rekomendasi (Kelompok 1 Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pemuda; Kelompok 2 Pendidikan dan Keterampilan Kerja; Kelompok 3 Ketahanan Masyarakat; dan Kelompok 4 Tata Kelola FKN).

Rakor FKN RAN PE yang diselenggarakan telah memberikan inspirasi dan praktik-praktik kemitraan yang efektif guna memperkuat upaya kolektif dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, khususnya dalam pelaksanaan RAN PE 2025-2029. Sebagai langkah tindak lanjut, dengan pelibatan berbagai elemen masyarakat khususnya sektor swasta, filantropi, media dan perguruan tinggi, Ketua Forum Kemitraan Pemerintah, dan Ketua Pemangku Kepentingan Masyarakat perlu menentukan prioritas isu yang akan diangkat dalam kemitraan RAN PE di setiap tahunnya.

4. Selain tiga rakor di atas, Kesekretariatan Sekber RAN PE juga telah melaksanakan Rapat Koordinasi Sekber RAN PE bersama unsur Kemenko Polhukam, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan BNPT, pada 21 November 2024 di Jakarta. Rakor Sekber RAN PE dipimpin langsung oleh Kepala BNPT selaku Penanggung Jawab RAN PE dan Sekretaris Utama (Sestama) BNPT selaku Ketua Pokja RAN PE. Rakor ini membahas: (1) *update* perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 oleh Pokja Pilar 1, 2, 3, dan Pokja Tematis, serta *Co-chair* FKN. Di dalam rakor Sekber RAN PE ini Ketua Pokja Pilar 1, Pilar 2, Pilar 3, Ketua Pokja Tematis, dan *Co-chair* FKN menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAN PE dari awal hingga akhir tahun 2024; (2) keberlanjutan RAN PE tahun 2025-2029; dan (3) penguatan dan elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam naskah teknokratik RPJMN 2025-2029.

GAMBAR 2.3

Rakor Forum Kemitraan Nasional (FKN)



Berikut adalah **enam poin catatan hasil dari Rakor Sekber RAN PE pada 21 November 2024**:

- a. BNPT c.q. Ketua Pokja Pilar 2 RAN PE perlu melakukan kajian lebih lanjut kepada K/L penanggung jawab terhadap aksi yang belum dapat terlaksana pada Fase 1 RAN PE, khususnya pada Pilar 2 Fokus 4 dan 5 untuk kemungkinan dilanjutkan dalam pelaksanaan RAN PE Fase 2 (2025-2029).
- b. Dalam rangka menjaga kontinuitas upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah, Rakor Sekber RAN PE mendorong Kementerian Hukum untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Progres yang mencakup Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE tahun 2025-2029.
- c. Batang tubuh Perpres RAN PE tahun 2025-2029 memasukkan klausul tentang kewajiban daerah dalam mengimplementasikan RAN PE dalam bentuk RAD PE.
- d. BNPT segera mengoordinasikan penyiapan muatan substansi RAN PE tahun 2025-2029 dengan melibatkan K/L terkait dan mendorong partisipasi aktif organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga filantropi, media dan perguruan tinggi dalam proses penyusunan Aksi RAN PE.
- e. Mencermati meningkatnya tren potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia lima tahun ke depan, Rakor Sekber RAN PE sepakat untuk mendorong penguatan dan elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam Rancangan RPJMN 2025-2029. Terkait hal ini, Rakor Sekber RAN PE merekomendasikan BNPT, Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait lainnya secara bersama mendiskusikan penguatan dan elaborasi isu PE dalam dokumen Rancangan RPJMN 2025-2029.
- f. Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE Tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE, BNPT selaku *leading sector* kebijakan RAN PE dan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pelaksanaan RAN PE di daerah segera berkoordinasi untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BNPT dan Mendagri tentang Kajian Akademik RAN PE Tahun 2025-2029 kepada K/L terkait dan seluruh pemerintah daerah. SE tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bagi K/L di tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan Aksi RAN PE hingga terbitnya Perpres RAN PE Tahun 2025-2029.

GAMBAR 2.4.

Rakor Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE



5. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE tahun 2024, baik yang dilakukan terhadap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Monev dilaksanakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan Badan Kesbangpol daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota bersama Kementerian Dalam Negeri. Monev terhadap K/L dilaksanakan di beberapa kementerian/lembaga sebagai pelaksana aksi PE tahun 2024, sedangkan terhadap pemerintah daerah dilaksanakan sebanyak dua kali, khusus bagi daerah yang telah memiliki RAD PE, yakni secara luring dengan berkunjung ke Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

dan secara daring dengan melibatkan 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Monev pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE Tahun 2024 bertujuan untuk (a) melihat lebih jauh perkembangan, capaian, dan tantangan implementasi RAD PE di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (b) menyampaikan informasi terkait mekanisme pelaporan pelaksanaan RAN PE di daerah baik melalui pengisian *form* maupun modul di situs Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS); dan (c) mengidentifikasi serta mendiskusikan berbagai capaian dan dampak pelaksanaan aksi-aksi RAN PE di kementerian/lembaga dan daerah.

Beberapa Kegiatan di antaranya:

- a. Monev pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE terhadap Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah pada 1-4 Mei, di Bandar Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE, Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah.

Poin-poin yang dihasilkan selama proses monev yaitu: (1) regulasi RAD PE Provinsi Lampung berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur hanya berlaku selama satu tahun (setiap tahun diperbarui). Hal ini ditempuh karena Tim Terpadu yang telah dibentuk bersifat dinamis serta menyesuaikan dengan mitigasi dan pemetaan yang ada di Lampung; (2) pelaporan pelaksanaan RAD PE belum optimal dilaporkan melalui platform SIPKS untuk semester pertama 2024, disebabkan anggaran di Badan Kesbangpol masih terfokus pada kegiatan lain. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah menggandeng Bappeda, Densus 88

Anti-teror, dan penegak hukum lainnya untuk perencanaan dan implementasi program; (3) Kabupaten Lampung Tengah fokus pada sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan mengingat masih banyaknya kasus terkait pelaku tindak pidana terorisme dan merupakan daerah persinggahan pelaku tindak pidana terorisme; dan (4) Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah memiliki program pemberdayaan untuk keluarga narapidana dan mantan narapidana terorisme karena masih kuatnya stigma di masyarakat yang membuat mereka merasa terkucilkan. Pemberdayaan dimaksud diwujudkan melalui program menyekolahkan anak keluarga pelaku tindak pidana terorisme serta pembuatan kartu BPJS dan KTP bagi anak keluarga pelaku terorisme.

Beberapa masukan dalam pelaksanaan monev di Provinsi Lampung di antaranya: penyempurnaan regulasi Perpres RAN PE agar memudahkan pelaksanaan dan sistem koordinasi dan pelaporan RAD PE; penyempurnaan SIPKS sebagai situs pelaporan pelaksanaan RAD PE; dan

GAMBAR 2.5

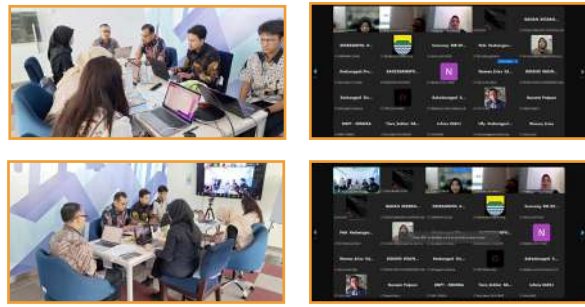
Monev Pelaksanaan dan Pelaporan RAN PE di Provinsi Lampung



permohonan dukungan Pemerintah Pusat dalam mendorong pelaksanaan RAN PE sebagai agenda prioritas di daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota.

- b. Monev pelaksanaan RAN PE dan pelaporan RAN PE secara daring (via *Zoom Meeting*) pada 22 November 2024 terhadap 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota se-Indonesia yang telah memiliki RAD PE. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE, Subdit Forkopimda Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Singkawang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bogor.

Adapun hasil dari kegiatan monev ini yaitu: (a) seluruh perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir sangat antusias dalam melaporkan implementasi RAD PE di daerahnya masing-masing; (b) dengan adanya pelaporan implementasi RAD PE dapat memberikan informasi utuh kepada Kesekretariatan Sekber RAN PE dan Kemendagri mengenai pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 di daerah; (c) hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan RAD PE menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah; dan (d) adapun daerah yang memiliki kendala terbatasnya akses



GAMBAR 2.6

Monev Pelaksanaan RAN PE dan Pelaporan RAN PE terhadap 8 provinsi dan 13 Kab/Kota secara daring

ke *platform* SIPKS disarankan untuk berkirim secara manual via WhatsApp (WA) kepada Direktorat Wawasan Nasional (Wasnas) Ditjen Polpum Kemendagri untuk diproses ke dalam *platform* SIPKS.

6. Penganugerahan RAN PE Awards tahun 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Sekber RAN PE sejak tahun 2023, diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 di Jakarta, yang untuk penyelenggaraan tahun 2024 bekerja sama dengan Harmoni-USAID. Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi kerja keras dan kontribusi seluruh pihak yang telah aktif berperan dalam pelaksanaan RAN PE di sepanjang tahun 2024, sekaligus menjaga semangat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan ancaman terorisme.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat negara terkait, yaitu Wakil Presiden RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BNPT, Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Agama RI, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Anggota I BPK RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perwakilan dari kementerian/lembaga, Kelompok Ahli BNPT, perwakilan dari Kedutaan Besar negara-negara sahabat, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan para pejabat internal BNPT. RAN PE Awards 2024 dibagi menjadi dua bagian: (a) seremoni penyerahan RAN PE Awards kepada para pemangku kepentingan; dan (b) diskusi panel (*talk show*).

Dalam kegiatan ini Wakil Presiden sebagai *Keynote Speaker* menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya: (a) menekankan pentingnya melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mendukung perumusan RAN PE Tahun 2025-2029 yang memberikan dampak signifikan; (b) pentingnya mempererat kolaborasi multipihak guna penguatan pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029; (c) meminta untuk menghapus sekat-sekat birokrasi yang kaku dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan nasional dan kesatuan bangsa; (d) mendorong peningkatan peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme; (e) dukungan terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAN PE; dan (f) RAN PE fase berikutnya (2025-2029) dapat terus membantu untuk meningkatkan kondisi aman tanpa ancaman bagi bangsa Indonesia.

Pada penganugerahan RAN PE Awards, Wakil Presiden RI dan Kepala BNPT memberikan penghargaan kepada para *stakeholder* yang telah berkontribusi secara positif dan aktif dalam implementasi RAN PE Tahun 2024, dengan beberapa kategori, yaitu:

- a. Kategori Inisiator dan Berkomitmen dalam Pelaksanaan RAN PE: Kemen dagri, Kemenkopolkukam, Kemenlu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kategori Inovatif dan Berkelanjutan: Kemendikbud, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), LPSK, Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Foundation, AMAN Indonesia, Yayasan Empatiku, dan Setara Institute.
- c. Kategori Inspiratif dan Berdampak Nyata: Kementerian Agama, Kota Surakarta, Peace Generation, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dan Pusat Kajian Anti Radikalisme (PAKAR).
- d. Kategori Komitmen Prinsip-Prinsip dalam RAN PE: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID).
- e. Mitra Pembangunan Pemerintah: United States Agency for International Development-Harmoni (USAID-Harmoni), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Australia

Gambar 2.7
RAN PE Awards Tahun 2024



Indonesia Partnership for Justice-2 (AIPJ2), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), dan Uni Eropa.

Pada sesi diskusi panel (*talkshow*) mengusung tema: “Kontribusi RAN PE dalam Mencapai Pembangunan Nasional” dengan narasumber dari BNPT, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Jawa Timur, Wahid Foundation, dan Evaluator Independen. Beberapa catatan tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu: (1) kehadiran Wapres RI menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RAN PE mendapatkan perhatian pimpinan negara, dan arahan Wapres RI mengenai keberlanjutan RAN PE fase berikutnya (2025-2029) agar lebih inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sipil, perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh BNPT; (2) guna lebih memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, BNPT secara lebih intensif melakukan komunikasi dengan Bappenas untuk mendorong RAN PE fase selanjutnya agar masuk ke dalam prioritas nasional sesuai saran Bappenas pada beberapa kesempatan, termasuk dalam diskusi panel; dan (3) hasil evaluasi menyeluruh RAN PE tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk penyusunan RAN PE tahun 2025-2029.

Kedua, kegiatan non-rutin. Serangkaian kegiatan non-rutin

Kesekretariatan Sekber RAN PE yang dilaksanakan selama tahun 2024 di antaranya sebagai berikut.

1. Diseminasi dan sosialisasi RAN PE di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Semarang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta. Selama tahun 2024, serangkaian kegiatan ini dilaksanakan oleh OMS dan mitra pembangunan bekerja sama dengan Kesekretariatan Sekber RAN PE, BNPT, kementerian/lembaga terkait, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah.
 - a. Diseminasi RAN PE tahun 2020-2024 dan Penyerahan Panduan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan RAN PE di daerah, yang dilaksanakan 17-19 Januari 2024 di Makassar. Kegiatan ini merupakan kerja sama Kesekretariatan Sekber RAN PE, Ses-tama BNPT, Ditjen Polpum Kemen-dagri, Wahid Foundation, AIPJ2, dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan berbentuk seminar dan FGD pembahasan isu-isu strategis terkait PE di Sulawesi Selatan dan usulan pembentukan Pokja RAD PE Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengundang representasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, OMS, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan *stakeholder* lain yang relevan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan Per-pres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 di Provinsi



GAMBAR 2.8

Diseminasi RAN PE dan Penyerahan Panduan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan RAN PE di Daerah, Makassar

Sulawesi Selatan dengan membentuk RAD PE Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini berhasil merumuskan isu-isu strategis terkait PE dan usulan pembentukan Pokja RAD PE Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengedepankan prinsip *whole of government and whole of society approach*. Sebagai langkah tindak lanjut, dalam upaya percepatan perumusan RAD PE di Provinsi Sulawesi Selatan, diselenggarakan pertemuan lanjutan dengan mengundang Badan Kesbangpol daerah se-Sulawesi Selatan yang telah berhasil menyusun RAD PE untuk dapat menyampaikan *best practices* kepada Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk rapat terkait pembentukan Pokja RAD PE melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan selanjutnya, pasca kegiatan ini telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 391/IV/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Perumus Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan 5 April 2024.

- b. Seminar Implementasi RAN PE di Kota Semarang, 23-25 Januari 2024, merupakan kerja sama Kesekretariatan Sekber RAN PE, Ditjen Polpum Kemendagri, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dan Harmoni-USAID. Kegiatan ini juga berbentuk seminar dan FGD pembahasan isu-isu strategis terkait PE di Kota Semarang dan usulan pembentukan Pokja RAD PE Kota Semarang dengan mengundang representasi OPD terkait dari Pemerintah Kota Semarang, OMS, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan *stakeholder* lain yang relevan, dan bertujuan mendiskusikan implementasi RAN PE di Kota Semarang dan isu-isu strategis PE yang akan dimasukkan ke dalam RAD PE Kota Semarang.

Kegiatan ini berhasil merumuskan isu-isu strategis terkait PE dan usulan



GAMBAR 2.9
Seminar Implementasi RAN PE di Kota Semarang

pembentukan Pokja RAD PE Kota Semarang dengan mengedepankan prinsip *whole of government and whole of society*. Sebagai langkah tindak lanjut, dalam upaya percepatan perumusan dan penyusunan RAD PE di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan rapat lanjutan pembentukan Pokja RAD PE Kota Semarang dengan mengundang pemangku kepentingan terkait, termasuk OMS, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Sebagai hasil dari serangkaian kegiatan sejak *kick-off* pada 23-25 Januari 2024, dengan koordinasi dan kolaborasi intensif Kesekretariatan Sekber RAN dan YPP, Pemerintah Kota Semarang

telah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang ditandatangani Walikota Semarang pada 26 September 2024, dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 200.1/1022 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kota Semarang, yang ditetapkan pada 1 November 2024.

- c. Konferensi Nasional dan Konvensi Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC) 2024 “Perempuan, Agensi, Pemberdayaan dalam Melawan Ekstremisme Berbasis Kekerasan”, 5-8 Mei, di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selama rangkaian kegiatan ini Kesekretariatan Sekber RAN PE menjadi *co-host* dalam salah satu *breakout session*, yang mendiskusikan tema “Implementasi RAD PE di Kabupaten Purwakarta”. Dari diskusi yang telah dilakukan, perlu ditunjuk/disampaikan personel dari Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sebagai penanggung jawab pelaporan dalam SIPKS Kemendagri guna meningkatkan pelaporan implementasi RAD PE.
- d. Sosialisasi dan Diskusi Terbatas RAN PE dan Strategi Implementasinya di Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada 18 September 2024, merupakan kerja sama Fahmina Institute, AMAN Indonesia, IMPARSIAL, dan Fatayat NU Jawa Barat sebagai Mitra JISRA Indonesia, WGWC dengan Kesekretariatan Sekber RAN PE. Kegiatan ini juga berbentuk seminar dan FGD pembahasan isu-isu strategis terkait PE di Kabupaten Cirebon dan usulan pembentukan Pokja RAD PE Kabupaten Cirebon dengan mengundang representasi OPD terkait dari Pemerintah Kota Semarang, OMS, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Kegiatan ini bertujuan menso-sialisasikan Perpres Nomor 7 tahun

2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang RAD PE Provinsi Jawa Barat serta identifikasi isu-isu strategis untuk kebutuhan penyusunan RAD Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini juga berhasil merumuskan isu-isu strategis terkait PE dan usulan pembentukan Pokja RAD PE Kabupaten Cirebon dengan mengedepankan prinsip *whole of government and whole of society*. Sebagai langkah tindak lanjut, dalam upaya percepatan perumusan dan penyusunan RAD PE di Kabupaten Cirebon, Fahmina Institute, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan rapat lanjutan perumusan draf RAD PE Kabupaten Cirebon dan pembentukan Pokja RAD PE Kabupaten Cirebon dengan mengundang pemangku kepentingan terkait, termasuk OMS, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.

GAMBAR 2.10

Sosialisasi dan Diskusi Terbatas RAN PE di Kabupaten Cirebon



2. *Focus Group Discussion* (FGD) Tematik RAN PE Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE bekerja sama dengan Setara Institute dan Harmoni-USAID sejak pertengahan Mei hingga akhir Juli 2024 di Jakarta. Sebagaimana diketahui, RAN PE tahun 2025-2029 terdiri dari sembilan tema pokok yang berfokus pada keamanan insani (*human security*) dalam konteks pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. RAN PE tahun 2025-2029 mengambil pendekatan tematik, tidak lagi berbasis pilar sebagaimana RAN PE tahun 2020-2024.

Keputusan ini berangkat di antaranya dari pertimbangan tujuh area utama (*key areas*) UN Plan of Action to Prevent Violent Extremism yang dilaporkan Sekjen PBB 24 Desember 2015 agar setiap negara anggota PBB memasukkannya dalam rencana aksi nasional masing-masing negara. Tujuh area utama tersebut meliputi (1) *dialogue and conflict prevention*; (2) *strengthening good governance, human rights, and the rule of law*; (3) *engaging communities*; (4) *empowering youth*; (5) *education, skill development, and employment facilitation*; (6) *gender equality and empowering women*; dan (7) *strategic communication, internet, and the social media*.¹⁶ Selain itu, pertimbangan pelaksanaan RAN PE tahun 2020-2024 yang berbasis pilar dan evaluasi yang dilaksanakan di antara

aksi PE bersifat tematik dan fokus pada isu dan tema tertentu, termasuk juga keanggotaan Pokja Tematis yang secara struktural bidang-bidang di dalamnya terdiri dari beberapa tematik.

FGD tersebut bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam dan spesifik setiap tema dari sembilan tematik sebagaimana draf Perpres RAN PE tahun 2025-2029 dan menerima masukan, saran, serta tindak lanjut untuk memperkaya dan mempertajam setiap tema dan draf matriks aksi PE dari sembilan tema pokok dalam draf Perpres RAN PE Tahun 2025-2029. Pelaksanaan FGD sembilan tematik RAN PE Tahun 2025-2029 diformat dalam dua sesi diskusi dalam satu hari. Sebelum FGD dimulai, peserta dibekali dengan draf *concept paper* dan matriks aksi PE setiap tematik RAN PE tahun 2025-2029 yang telah disiapkan sebelumnya. *Sesi pertama*, dimulai pagi hingga siang hari. Pada sesi ini narasumber memaparkan materi terkait tema spesifik RAN PE tahun 2025-2029 dan mendiskusikannya dengan peserta FGD. Pada *sesi kedua*, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang mendiskusikan secara mendalam materi dan kisi-kisi materi yang disampaikan narasumber di sesi sebelumnya, draf *concept paper* setiap tematik RAN PE tahun 2025-2029, serta pendalaman dan penajaman permasalahan, strategi, aksi, dan kementerian/lembaga terkait.

Narasumber dalam rangkaian serial FGD Tematik RAN PE tahun 2025-2029 berasal dari akademisi, unsur pemerintah (BNPT dan/atau kementerian/lembaga

¹⁶ The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, "Plan of Action to Prevent Violent Extremism: Report of the Secretary General", available at: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/456/22/pdf/n1545622.pdf>.

GAMBAR 2.11
FGD Tematik Draf RAN PE Tahun 2025-2029



lain yang relevan), dan pegiat PCVE dari unsur OMS. Sedangkan peserta terdiri dari beberapa unsur berikut: Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE, kementerian/lembaga pelaksana RAN PE, lembaga pembangunan internasional, serta pemangku kepentingan di masyarakat, seperti OMS, pihak swasta, lembaga filantropi, media, dan perguruan tinggi. Dari serial FGD tersebut telah menghasilkan kajian akademik dan draf matriks aksi PE setiap tematik RAN PE Tahun 2025-2029. Versi *soft file* (pdf) kajian akademik dimaksud dapat diunduh melalui tautan <https://s.id/BukuAcuan-PelaksanaanRANPE2025>.

Adapun rincian pelaksanaan FGD sembilan tematik draf RAN PE tahun 2025-2029 sebagai berikut.

- a. FGD Tema 1 Kesiapsiagaan Nasional, 16 Mei 2024.
 - b. FGD Tema 8 Pelindungan Saksi dan Korban, 17 Mei 2024.
 - c. FGD Tema 2 Ketahanan Komunitas dan Keluarga, 18 Juli 2024.
 - d. FGD Tema 3 Pendidikan, Keterampilan Masyarakat, dan Fasilitas Lapangan Kerja, 24 Juli 2024.
 - e. FGD Tema 4 Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Pemuda, 25 Juli 2024.
 - f. FGD Tema 5 Komunikasi Strategis, Media, dan Sistem Elektronik, 26 Juli 2024.
 - g. FGD Tema 6 Deradikalisasi dan Pemutusan Kekerasan (*Disengagement*) untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, 29 Juli 2024.
 - h. FGD Tema 7 Hak Asasi Manusia, Tata Pemerintahan yang Baik, dan Keadilan, 30 Juli 2024.
 - i. FGD Tema 9 Kemitraan (Sinergisitas) dan Kerja Sama Internasional, 31 Juli 2024.
3. Kunjungan Kepala BNPT terkait Kolaborasi Multi Pihak RAN PE di Provinsi Jawa Tengah ke Sekolah Damai di SMAN 13 Kota Semarang pada 12 Desember 2024 dan Desa Siap Siaga pada 13 Desember 2024 di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal. Kedua kegiatan ini bertempat di Aula SMAN 13 Kota Semarang dan di Balai Desa Sukorejo. Kunjungan ke SMAN 13 Kota Semarang merupakan kerja sama Kesekretariatan Sekber RAN PE, Wahid Foundation, eLSa Semarang, dan AIPJ2. Sedangkan kunjungan ke Desa Sukorejo merupakan kerja sama Kesekretariatan Sekber RAN PE dan Kedeputan 1 BNPT. Tujuan utama kegiatan adalah untuk meninjau dua program unggulan yang telah ditetapkan sebagai *champion story* RAN PE di tahun 2024. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan (a) mengumpulkan masukan, cerita sukses, dan dampak dari pelaksanaan program Sekolah Damai dan Desa Siap Siaga; (b) mendapatkan informasi dan pembelajaran dari masyarakat langsung untuk memperkaya strategi pengembangan program Sekolah Damai dan Desa Siap Siaga di masa depan; (c) menguatkan komitmen kerja sama BNPT dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Wahid Foundation, pihak sekolah, dan penggerak desa dalam memperluas

jangkauan dan efektivitas program; dan (d) menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Dalam kunjungan Kepala BNPT beserta rombongan ke SMAN 13 Kota Semarang dihadiri oleh internal BNPT dan Kesekretariatan Sekber RAN PE; Pj. Gubernur Jawa Tengah; Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah; Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; Kepala Sekolah, Guru, dan Perwakilan Pengurus OSIS 79 Sekolah Damai se-Provinsi Jawa Tengah; AIPJ2; Wahid Foundation; dan eLSa Semarang. Dalam kesempatan ini Kepala BNPT mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Damai sebagai salah satu upaya pemenuhan aksi RAN PE, Sekolah Damai merupakan implementasi Perpres RAN PE (turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) yang menunjukkan bukti konkrit seluruh pemangku kepentingan hadir untuk melindungi masyarakat dari aksi ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia, Program Sekolah Damai juga secara nyata memberikan dampak luas dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme, Program Sekolah Damai menjadi bahan evaluasi dan monitoring untuk RAN PE Fase II Tahun 2025-2029 yang lebih efektif. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan untuk sekolah-sekolah di Jawa Tengah yang telah mengadopsi Program Sekolah Damai dan diakhiri dengan peninjauan Kepala BNPT ke lingkungan Sekolah SMAN 13

Kota Semarang. Sebagai tindak lanjut, BNPT, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Wahid Foundation berkomitmen memperkuat serta memperluas praktik baik Sekolah Damai di seluruh sekolah di Jawa Tengah, agar dapat menjadi model bagi sekolah di daerah lain.

Sedangkan kunjungan ke Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, dihadiri oleh internal BNPT dan Kesekretariatan Sekber BNPT, Anggota DPR RI, Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Kendal, PT. PNM Cabang Kendal, unsur Kelurahan/Desa Sukorejo (Ketua BPD Desa Sukorejo, Penggerak Desa Siap Siaga, Perwakilan RT, Perwakilan RW, Perwakilan Dusun), serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Sukorejo. Dalam kesempatan di Desa Sukorejo juga dilakukan penyerahan bantuan *sound system* kepada Desa Sukorejo untuk memperkuat tugas Penggerak Desa Siap Siaga di Desa Sukorejo. Dalam kesempatan ini diadakan dialog antara perwakilan masyarakat Desa Sukorejo, Kepala BNPT, beserta undangan lainnya. Kepala Desa Sukorejo menyampaikan bahwa Desa Sukorejo telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas yang diadakan BNPT terkait Sosialisasi Desa Siap Siaga di Jakarta. Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Desa Sukorejo telah membentuk Tim Penggerak Desa Siap Siaga sekaligus melaksanakan sosialisasi pembentukannya kepada warga desa. Hingga saat ini Desa Sukorejo tidak memiliki permasalahan terkait toleransi beragama. Perwakilan Penggerak Desa Siap Siaga menyampaikan bahwa Penyuluhan Desa Siap Siaga berjalan



GAMBAR 2.12

Kunjungan Kepala BNPT ke Sekolah Damai SMAN 13 Kota Semarang

kurang karena, disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga desa terkait terorisme dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan sosialisasi, Tim Penggerak Desa Siap Siaga mengusulkan pengadaan program terkait kepemudaan di Desa Sukorejo dan harapannya pemerintah dapat memberikan

dukungan berupa honor kepada Pelaksana/ Penggerak Desa Siap Siaga. Sebagai catatan dan saran dalam dialog bahwa BNPT berkomitmen melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai upaya pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat desa.

GAMBAR 2.13

Kunjungan Kepala BNPT ke Desa Siap Siaga, Desa Sukorejo

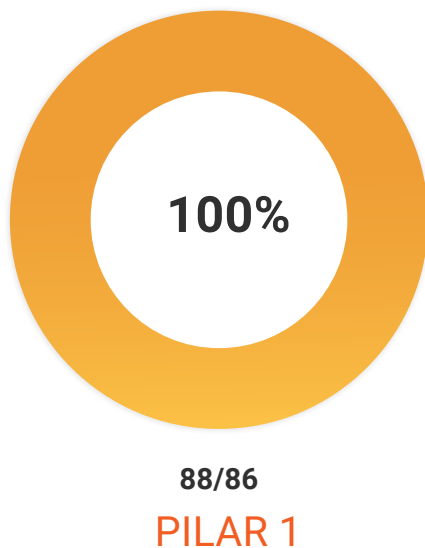


B. LAPORAN PILAR RAN PE

Pilar 1

Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi)

Pada Pilar 1, terdapat 86 aksi yang diamanatkan pada tahun 2020-2024. Semua aksi PE pada Pilar 1 yang diamanatkan dalam RAN PE di tahun 2020-2024 terlaksana dengan baik. Sementara itu untuk aksi pada tahun 2024, terdapat 49 aksi yang juga sudah terlaksana. Dari semua aksi yang terlaksana di tahun 2024, sebagian di antaranya merupakan tindak lanjut pelaksanaan aksi PE di tahun 2022-2023 sebelumnya yang belum terlaksana.



GAMBAR 2.14

Pelaksanaan Aksi RAN PE 2020-2024

Terdapat sejumlah 313 komitmen kegiatan pada Pilar 1 dengan 259 kegiatan sudah dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, 45 kegiatan sedang dilaksanakan, dan lainnya pada status yang bervariasi. Sebaran kegiatan kementerian/ lembaga banyak dilakukan pada Fokus 2 mengenai Kesiapsiagaan Nasional, yaitu berupa

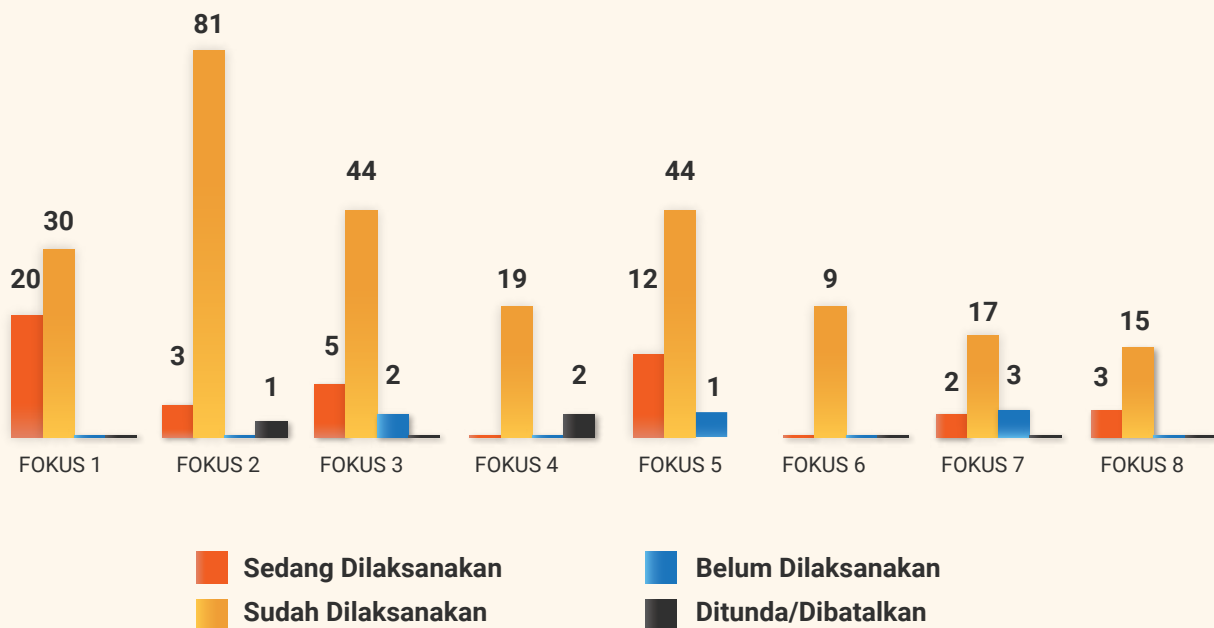
memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan. Realisasi aksi PE lebih banyak dilakukan dibanding dengan yang direncanakan dan hanya tersisa 83 kegiatan yang sedang dan/atau belum dilaksanakan. Fokus 4 dan 6 adalah fokus dengan aksi yang keseluruhan kegiatannya sudah dilaksanakan.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan aksi RAN PE tahun 2024 lebih kecil, kurang dari 50% dari total anggaran yang direncanakan kementerian/ lembaga pada Pilar 1. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Walaupun demikian, dengan jumlah kegiatan K/L yang masih banyak dan mencapai 100% dan realisasi anggaran yang sangat terbatas menunjukkan komitmen K/L yang masih cukup tinggi terhadap implementasi RAN PE pada Pilar 1.

Terdapat satu K/L pada Pilar 1 yang belum melaporkan aksinya untuk tahun 2024, yaitu Kemen ESDM. Pelaksanaan kegiatan

GRAFIK 2.1.

Sebaran Kegiatan kementerian/lembaga pada Pilar 1



K/L dalam rangka mendukung pencapaian aksi di Pilar 1 difokuskan pada isu-isu gender, pendidikan, pemuda, korban, ketahanan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah, data dan kolaborasi, kelompok rentan, pengamanan objek vital strategis, perlindungan anak, rehabilitasi dan reintegrasi, dan program deradikalisasi (dalam dan luar Lapas).

Pencapaian aksi RAN PE pada Pilar 1 untuk tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa tersisa satu aksi yang belum terpe-
nuhi (belum terlaksana), yaitu terdapat pada Fokus 7 (deradikalisasi dalam Lapas) mengenai penyusunan standar kompetensi minimum petugas menangani tahanan dan narapidana teroris yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam RAN PE, termasuk materi ketahanan terhadap potensi terpapar ideologi ekstrem. *Leading sector* aksi

Persebaran anggaran



GRAFIK 2.2

Anggaran pada Pilar 1

ini adalah Kemenkumham, yang saat ini telah berubah nomenklaturnya, di antaranya menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Hasil verifikasi Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE menunjukkan bahwa sebenarnya Kemenkumham

sudah mengalokasikan anggaran untuk aksi tersebut pada tahun 2025.

Pelaksanaan aksi PE pada Pilar 1 terdapat beberapa perubahan pencapaian aksi dari sebagian terpenuhi menjadi terpenuhi, yaitu:

1 Fokus 2 - Leading sector Kemenag: pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama;

4 Fokus 6 - Leading sector KPPPA: tersusunnya Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme; dan

2 Fokus 3 - Leading sector BNPT: *road map* komunikasi strategis PCVE;

5 Fokus 8 - Leading sector BNPT: indikator keberhasilan deradikalisasi luar Lapas yang *ter-update* 2024 melalui alat ukur AKURAD.

3 Fokus 3 - Leading sector Kemendikbudristek: kurikulum sekolah damai pada pendidikan dasar dan menengah;

Sementara itu, terdapat beberapa perubahan pencapaian aksi dari tidak terpenuhi menjadi sebagian terpenuhi, yaitu:

1 Fokus 2 - Leading sector BNPT: penyusunan alat ukur Desa Siap Siaga yang memiliki Indeks Kesadaran Masyarakat sebagai rujukan yang dapat menjadi landasan untuk alat ukur pencegahan ekstremisme kekerasan;

3 Fokus 3 - Leading sector Kemenkominfo: revisi P3SPS yang mengadopsi elemen pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;

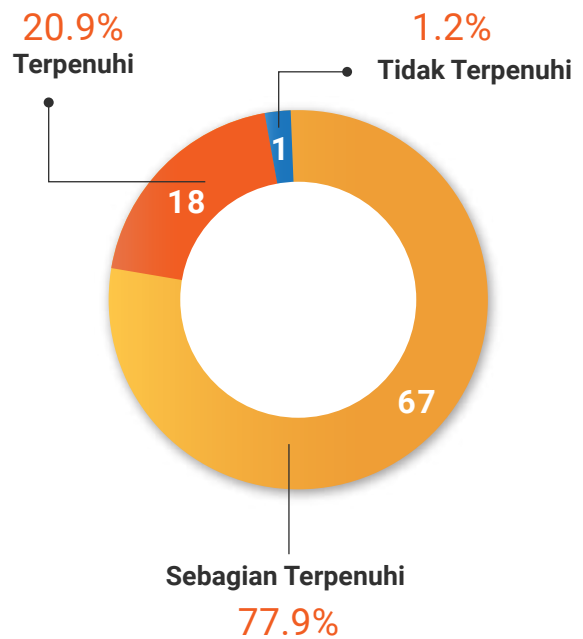
2 Fokus 3 - (1) leading sector Kemendikbudristek: materi berpikir kritis; dan **(2) leading sector** BNPT: mendorong adopsi PCVE dalam elemen jurnalistik;

4 Fokus 7 Leading sector Kemenkumham: (1) petugas yang menangani napiter harus kompeten (rekrutmen dan penanganan); dan (2) alat asesmen;¹⁷ dan

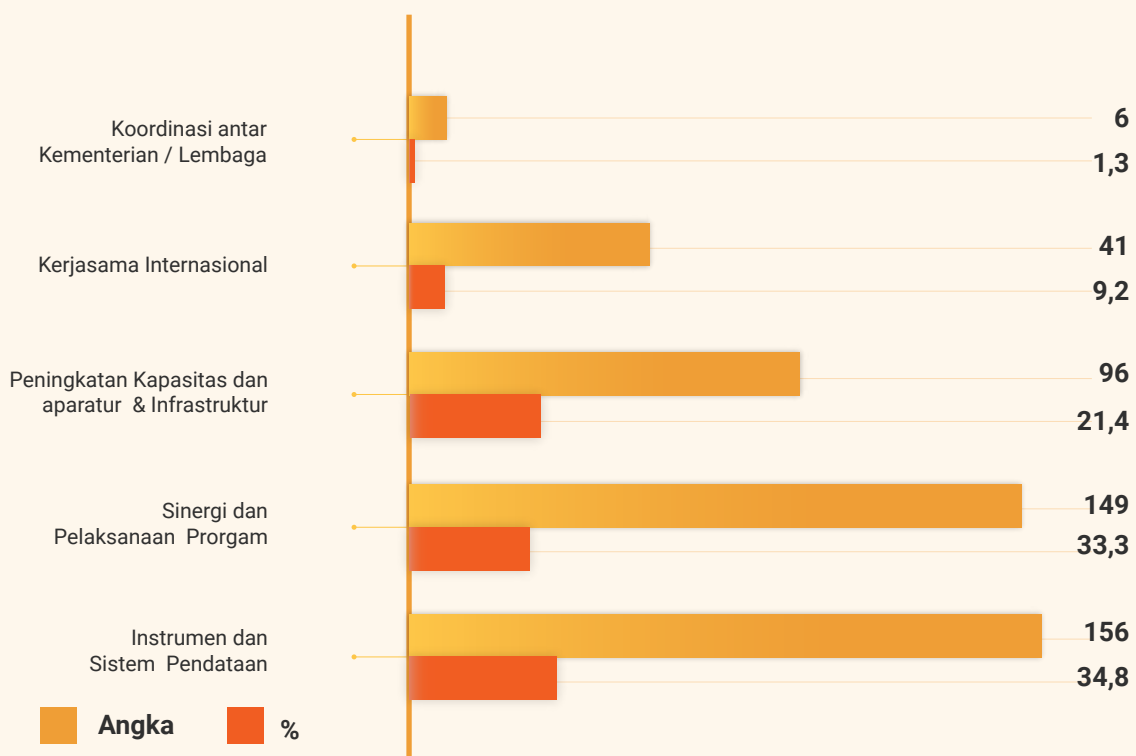
¹⁷ (Informasi dari PIC Fokus 7) kerja sama dengan salah satu OMS yaitu Yayasan Prasasti Perdamaian.

- 5 Hasil dari kegiatan kementerian/lembaga yang terlaksana dan sedang dilaksanakan hingga penghujung 2024 banyak berupa perangkat dan mekanisme (194), peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (70), dilanjutkan dengan peningkatan kemampuan aparatur dan lembaga pemerintah (39) dan kebijakan/regulasi (1).

Grafik 2.3
Pemenuhan Hasil RAN PE 2020-2024



GRAFIK 2.4
Hasil Kegiatan kementerian/lembaga pada Pilar 1



Berikut adalah ulasan beberapa rekam dari realisasi aksi/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam Pilar 1 sepanjang tahun 2024, yaitu:

Fokus 1.

Memperkuat data dukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Kesiapsiagaan Nasional).

- 1 Kajian perspektif gender dalam PCVE yang dilakukan Komnas Perempuan, dengan judul (1) Peta Awal Kerja Lembaga HAM dan Gerakan Sosial - Gerakan Perempuan dalam Merespons Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian HAM Perempuan; dan (2) Menelusuri Labirin Pemulihan dan Perjuangan Hidup Perempuan Korban Terorisme.
- 2 FGD yang diselenggarakan oleh BNPT terkait Indeks Risiko Terorisme melibatkan kementerian/ lembaga yang ada di dalam RAN PE.



GAMBAR 2.15

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 1

Fokus 2.

Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponsnya (Kesiapsiagaan Nasional)

- 1 Program Desa Siap Siaga yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan Kemendes PDTT terkait potensi penggunaan dana desa.
- 2 Pelatihan bagi penyuluh dan aktor resolusi konflik untuk pencegahan konflik berdimensi keagamaan.



GAMBAR 2.16

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 2

Fokus 3.

Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan (Kontra Radikalisasi)

- 1 Pencegahan ekstremisme kekerasan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.
- 2 Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang dilaksanakan oleh BNPT.
- 3 Sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui kanal perempuan kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Radio Republik Indonesia (RRI).



GAMBAR 2.17

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 3

Fokus 4.

Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Kontra Radikalisasi)

- 1 Program Keserasian Sosial berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Kemensos.
- 2 Program BNPT, yaitu meningkatkan resiliensi pemuda melalui duta damai.
- 3 Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui olahraga yang diselenggarakan oleh Kemenpora bekerja sama dengan *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT).



GAMBAR 2.18

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 4

Fokus 5.

Meningkatkan pengamanan objek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Kesiapsiagaan)

- 1 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan bimbingan teknis insiden siber, di antaranya bersama Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Organisasi Pemerintah Pusat, dalam melakukan respons dan penanganan insiden siber secara mandiri dan efektif.
- 2 BNPT bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melakukan *assessment* objek vital di bandar udara.



GAMBAR 2.19

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 5

Fokus 6.

Pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana terorisme kepada kelompok anak (Kesiapsiagaan)

- 1 KPPPA meluncurkan Pedoman Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.
- 2 Kemenkes menyelenggarakan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas *Emergency Medical Team* (EMT) dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Ketahanan Kesehatan (*Health Security*) yang juga diperuntukkan bagi anak korban jaringan terorisme.



GAMBAR 2.20

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 6

Fokus 7:

Deradikalisasi di dalam Lapas

1. Kemenkumham (cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) bekerja sama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) mengeluarkan petunjuk teknis penelitian kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak kasus terorisme.
2. Kemenkumham (cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) bekerja sama dengan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menyelenggarakan dialog antara korban dan narapidana kasus terorisme.



GAMBAR 2.21

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 7

Fokus 8.

Deradikalisasi di luar Lapas

1. BNPT mengeluarkan indikator keberhasilan deradikalisasi luar Lapas yang ter-update tahun 2024 melalui AKURAD (Alat Ukur Radikalisme) untuk penyelenggaraan program reintegrasi sosial.
2. KPPPA bekerja sama dengan Yayasan Empatiku dan AMAN Indonesia menyelenggarakan kegiatan kohesi dan reintegrasi sosial dengan pengarusutamaan gender.



GAMBAR 2.22

Hasil Kegiatan Aksi PE pada Fokus 8 Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional

Dari grafik di bawah ini, disimpulkan bahwa penerima manfaat (*beneficiaries*), sekaligus kelompok sasaran dari pelaksanaan aksi PE pada Pilar 1 berupa masyarakat adalah yang terbanyak dilakukan sebagai aksi dari kementerian/lembaga untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

GRAFIK 2.5
Capaian Kelompok Sasaran pada Pilar 1

134  MASYARAKAT	76  ASN	24  PENEGAK HUKUM	48  KOMUNITAS	41  SISWA	40  ANAK
41  PEMUDA	30  MAHASISWA	1  UMUM	3  POLISI	24  PETUGAS	20  DESA
16  NAPITER	14  KORBAN	14  GURU	6  FOREIGN TERRORIST FIGHTER	1  JAKSA	17  KELUARGA
11  DOSEN	8  DATA	9  MITRA DERAD	10  JURNALIS	3  PENYINTAS	1  PEKERJA MIGRAN

Pilar 2

Pelaksanaan aksi Pilar 2 RAN PE tahun 2024 sebanyak 13 aksi dari total 33 aksi sebagaimana diamatkan dalam matriks RAN PE Tahun 2020-2024. 13 aksi PE pada Pilar 2 tahun 2024 tersebar ke dalam lima fokus, sebagaimana gambaran pada tabel berikut:

TABEL 2.1. Sebaran Aksi Pilar 2 RAN PE Tahun 2024

NO	AKSI	PELAKSANA
Fokus 1. Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme		
1	1.1.1	Identifikasi bentuk-bentuk koordinasi yang ada saat ini. BNPT Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung LPSK
2	2.1.1	Pembuatan laporan tahunan penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE BNPT Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung LPSK

3	3.1.1	Pembentukan unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	BNPT Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung Kompolnas Komisi Kejaksaan Ombudsman RI
4	4.1.2	Peningkatan jumlah penyampaian informasi terkait penegakan hukum tindak pidana pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi, baik atas dasar permintaan maupun inisiatif masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	PPATK Kemenkeu BNPT Polri BIN Kejaksaan Agung
5	4.1.4	Peningkatan jumlah penanganan dan penanggulangan pendanaan Terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko pendanaan Terorisme pada instansi penegak hukum, untuk mendukung upaya PE.	PPATK Kemenkeu BNPT Polri BIN Kejaksaan Agung

Fokus 2.

Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

1	2.1.1	Penyelenggaraan pelatihan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE	BNPT Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung Mahkamah Agung LPSK PPATK
---	-------	---	---

2	2.1.2	Mengikutsertakan para penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme di universitas-universitas di dalam negeri, untuk mendukung upaya PE.	BNPT Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung Mahkamah Agung LPSK PPATK
3	2.1.3	Pengiriman aparat penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme ke luar negeri, untuk mendukung upaya PE.	BNPT Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung Mahkamah Agung LPSK PPATK

Fokus 3

Perlindungan Saksi dan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

1	1.1.2	Pengembangan wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kampus pada wilayah rentan, yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban dan pelapor	LPSK BNPT Kemendikbud Kemenag Kemenpan RB
2	1.1.4	Pemanfaatan basis data saksi, korban, dan pelapor dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, dalam upaya PE maupun penegakan hukum.	LPSK BNPT

Fokus 4

Penyelarasan Kerangka hukum nasional dan kerangka hukum internasional dalam pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

1	2.1.4	Sosialisasi muatan instrumen internasional terkait yang akan disahkan.	Kemlu BNPT Kemenkumham
---	-------	--	-------------------------------------

Fokus 5

Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi Peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah terorisme

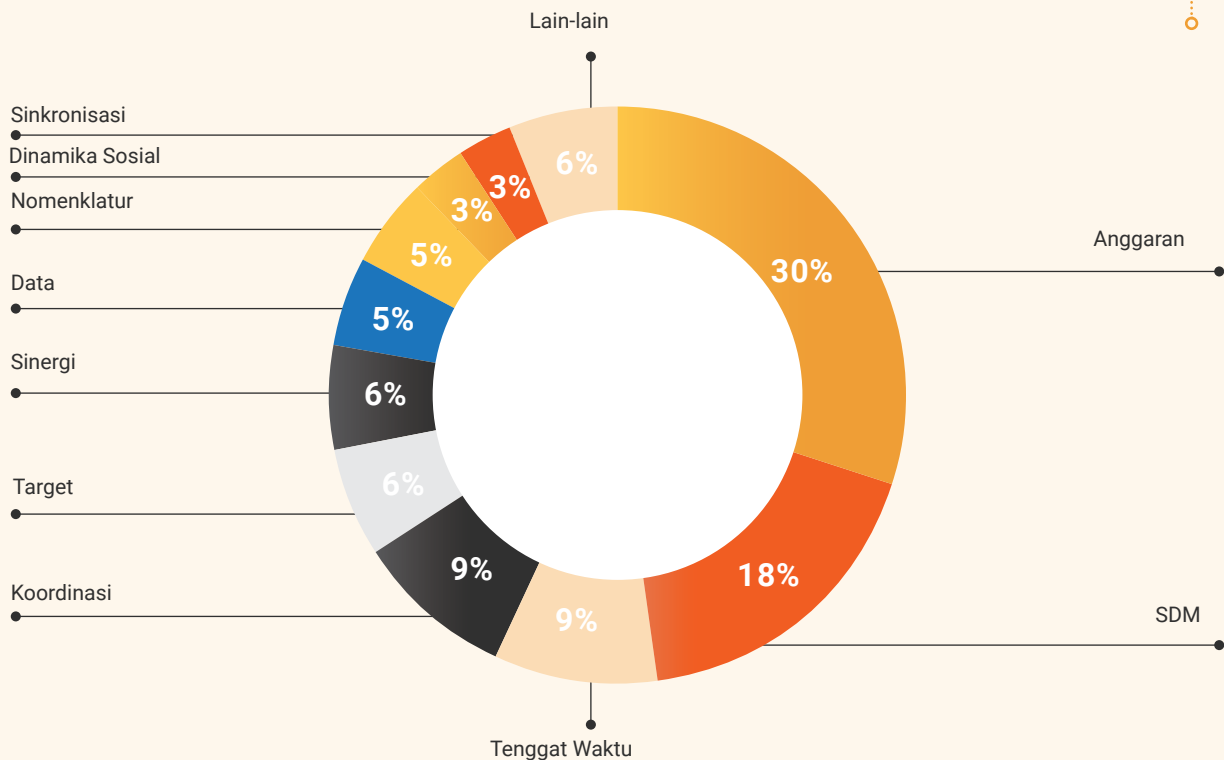
1	1.1.1	Menginventarisasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kemenkumham BNPT
2	1.1.3	Menyusun dan mengusulkan pembaruan (revisi) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kemenkumham BNPT

Antusiasme kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan aksi PE Pilar 2 RAN PE tahun 2024 relatif cukup tinggi. Berdasarkan monitoring pelaporan yang dilakukan oleh Kesekretariatan Sekber RAN PE diperoleh data jumlah aksi PE yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 22 aksi dari 13 aksi yang direncanakan pada tahun

2024. Penambahan pelaksanaan aksi Pilar 2 tahun 2024 disebabkan karena kementerian/lembaga beranggapan bahwa aksi-aksi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dirasa masih perlu dilanjutkan pada tahun 2024, khususnya untuk pelaksanaan aksi-aksi yang terkait, di antaranya:

- 1 Penyusunan kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pendanaan terorisme.
- 2 Pembentukan wadah pelaporan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan di kampus.
- 3 Inventarisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.

Gambaran umum sebaran pelaksanaan aksi PE Pilar 2 dapat dilihat pada grafik berikut:



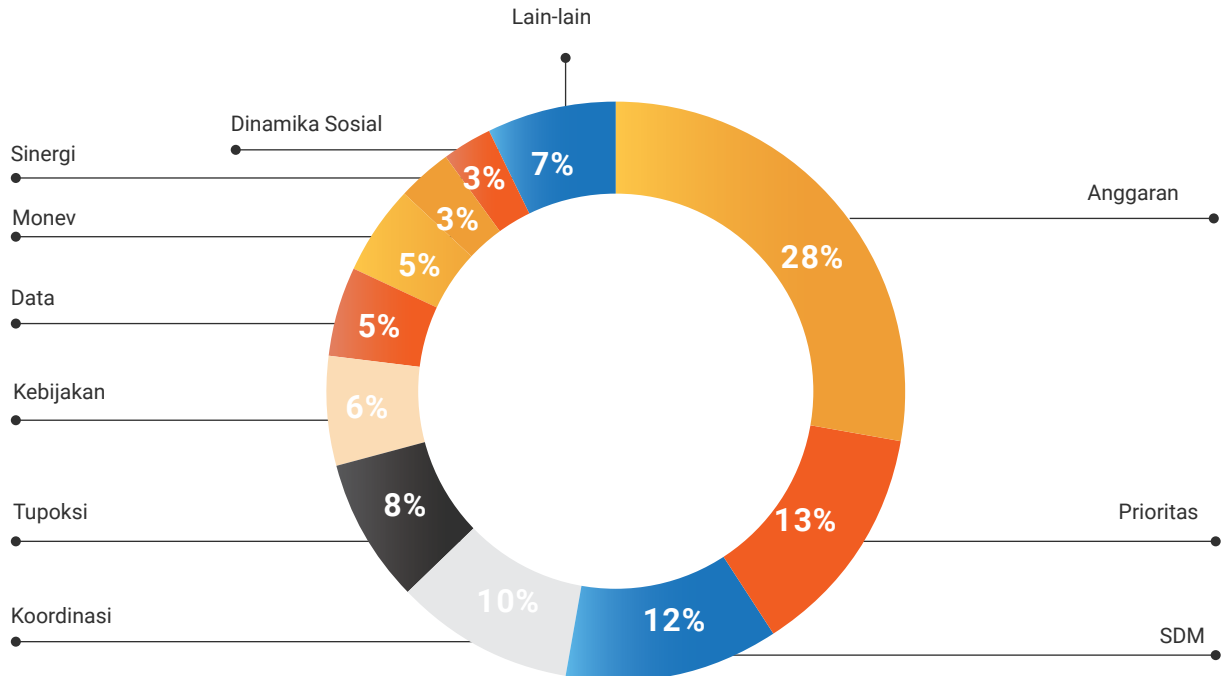
GRAFIK 2.6
Sebaran Pelaksanaan Aksi Pilar 2 Tahun 2024

Sampai dengan Desember 2024, berdasarkan laporan seluruh kementerian/ lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan aksi Pilar 2 tahun 2024, telah terlaksana 82 kegiatan dari 83 kegiatan yang dikomitmenkan oleh kementerian/ lembaga, sedangkan 1 kegiatan ditunda, yaitu MoU (*Memorandum of Understanding*) antara BIN dengan Kemenkumham terkait kerja sama penanganan warga binaan kasus tindak pidana terorisme. Kegiatan kerja sama ini rencananya akan direalisasikan pada tahun 2025.

Gambaran umum sebaran pelaksanaan kegiatan kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan aksi PE pada Pilar 2 dapat dilihat pada grafik berikut:

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa kontribusi kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan aksi PE pada Pilar 2 lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pada Fokus 1 yang terkait dengan penguatan koordinasi penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme dengan 46 kegiatan. Tingginya intensitas koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme selama tahun 2024 berdampak positif terhadap pencapaian target “zero attack” Indonesia tahun 2024 sebagaimana dirilis oleh *Global Terrorism Index* (GTI) 2024.

Dengan akan berakhirnya pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 pada Desember 2024,



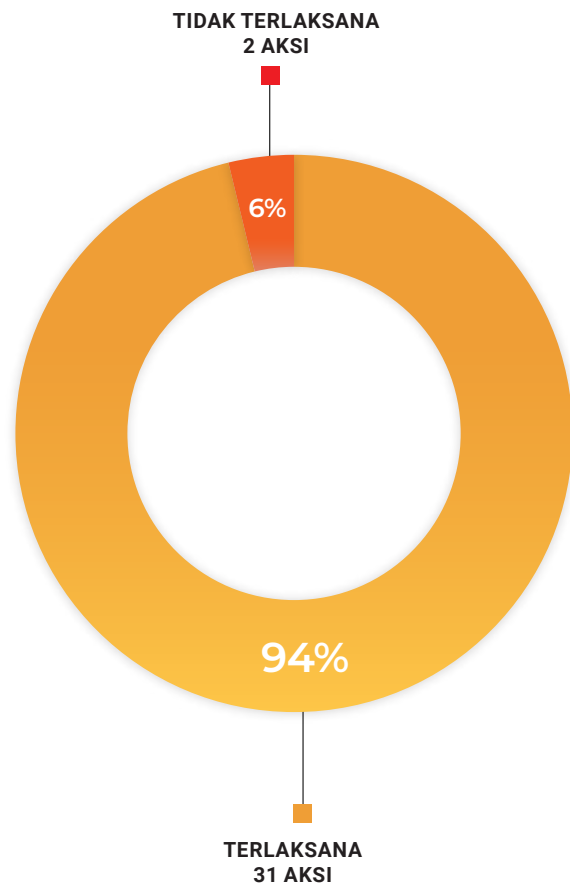
GRAFIK 2.7
Sebaran Kegiatan Pilar 2 Tahun 2024

pelaksanaan aksi PE Pilar 2 RAN PE periode 2020-2024 dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pencapaian/pemenuhan *output* sebagaimana diamanatkan dalam RAN PE dengan persentase 94% atau 31 aksi PE terlaksana dan terdapat 2 aksi PE hingga Desember 2024 belum dapat direalisasikan. 2 aksi PE yang belum terlaksana yaitu:

1 Fokus 4. Sosialisasi muatan instrumen internasional yang akan disahkan, khususnya yang terkait dengan (a) konvensi Internasional tentang pemberantasan tindak pidana yang terkait penerbangan sipil internasional; (b) konvensi Internasional tentang pemberantasan tindak pidana yang terkait keamanan pelayaran; dan (c) konvensi Internasional tentang bahan peledak plastik.

2 Fokus 5. Pembentukan RUU tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak.

Kedua aksi PE di atas belum dapat direalisasikan karena menghadapi berbagai kendala, salah satu di antaranya adalah masih kurangnya pemahaman dan urgensi dari kementerian/lembaga teknis untuk bersama-sama mendorong pengesahan kebijakan dimaksud.



Grafik 2.8

Capaian Pelaksanaan Aksi Pilar 2 Periode 2020-2024

Beberapa capaian penting pelaksanaan aksi RAN PE Pilar 2 yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait selama tahun 2024 di antaranya adalah:

Fokus 1.

Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme

- 1 Pertukaran informasi melalui pemanfaatan *platform* Sistem Pendeteksian dan Pelaporan Dana Terorisme (SIPENDAR).
- 2 Pertukaran informasi melalui koordinasi Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
- 3 Penyampaian Data dan Informasi pada Forum *Financial Action Task Force* (FATF) Indonesia Tahun 2024.
- 4 Operasionalisasi Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme BNPT.
- 5 BIN melakukan penyampaian *inquiry* analisis transaksi keuangan kepada PPATK terkait individu/entitas yang diduga berkaitan dengan pendanaan terorisme melalui platform SIPENDAR.
- 6 Kementerian Keuangan melakukan penyusunan *analytic tools* (tahap penyempurnaan) atas transaksi impor-ekspor atas barang yang diduga terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme dengan memanfaatkan tools manajemen risiko.
- 7 Kementerian PANRB telah memiliki kanal aduan yaitu **Aduanasn.go.id** sebagai wadah aduan aksi radikalisme yang dilakukan oleh oknum ASN, dan bekerja sama dengan Instansi terkait melalui SKB Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara.¹⁸

¹⁸ Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala BPIP, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 02 Tahun 2019 Nomor 300-5499 Tahun 2019, Nomor M.HH-03.PW.01.01 Tahun 2019, Nomor 977 Tahun 2019, Nomor 432/P/2019, Nomor 961/SKB/M. KOMINFO/HK.04.02/11/2019, Nomor KEP-250/XI/2019, Nomor 191 Tahun 2019, Nomor 39/K/KS/XI/2019, Nomor 01/SKB/Ka.BPIP/XI/2019, dan Nomor SKB.01/KASN/11/2019 tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara. SKB ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta November 2019.

Fokus 2

Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

- 1 Kementerian Keuangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transnational Organized Crime bagi Petugas Bea Cukai di level manajerial maupun operasional.
- 2 PPATK menyelenggarakan Pelatihan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dan pendanaan terorisme baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- 3 PPATK mengikutsertakan staf dalam pendidikan dan pelatihan di luar negeri terkait dengan anti teror yang diselenggarakan oleh Centinel Singapore.

Fokus 3

Perlindungan Saksi dan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

- 1 Kerjasama Kemenko Polhukam, BNPT, LPSK dan Kemendikbud dalam rangka sosialisasi pengembangan wadah pelaporan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kampus pada wilayah rentan, yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban dan pelapor.
- 2 Kemendikbud melakukan upaya Penanganan “4 Dosa Pendidikan”, yaitu perundungan, kekerasan seksual, intoleransi dan korupsi, melalui Rapat Koordinasi Nasional Satgas Penanganan Kekerasan (Melibatkan Satuan Tugas dan Pimpinan Perguruan Tinggi).

3 Diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan memasukkan isu Intoleransi di lingkungan Perguruan Tinggi.

4 Penyediaan data perlindungan LPSK dan Penyediaan data terkait korban yang menjadi terlindung LPSK.

Fokus 5.

Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi Peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah terorisme

1 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan inventarisasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Pilar 3

Kemitraan dan Kerja Sama Internasional

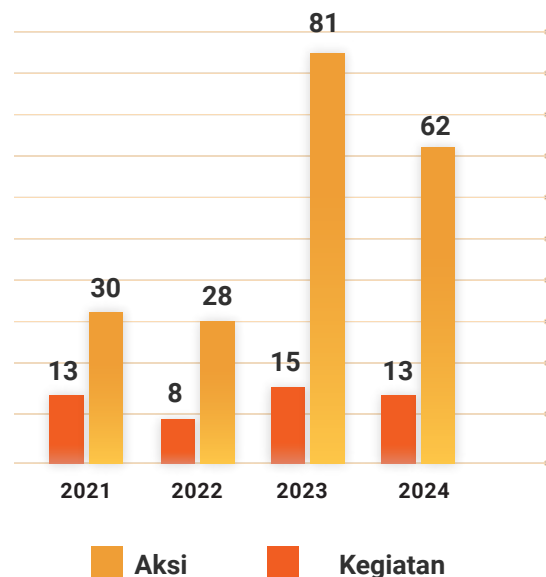
Pada Pilar 3, terdapat 16 aksi yang diamanatkan pada tahun 2024. Selain dari aksi yang diamanatkan 2024, terdapat pula kemungkinan adanya kementerian/lembaga menindaklanjuti aksi-aksi PE dari tahun sebelumnya yang belum terlaksana atau dipertimbangkan penting untuk dilaksanakan lagi pada tahun 2024. Terdapat dua fokus pada Pilar 3, yaitu Fokus 1 terkait Peningkatan Kapasitas Kemitraan para Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan Fokus 2 terkait Peningkatan Kerjasama Internasional pada pada Instrumen Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dibanding Pilar 1 dan Pilar 2, Pilar 3 terbi-lang gugus yang paling kecil. Hanya ada lima kementerian/lembaga yang disebutkan dalam matriks kerja Pilar 3, yaitu BNPT, PPATK, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, dan Bappenas/Kemen PPN (bukan sebagai lembaga pelaksana). BNPT menjadi penanggungjawab pada aksi-aksi PE di Fokus 1, sedangkan Kemlu menjadi penanggungjawab pada aksi-aksi PE di Fokus 2.

Sejak 2021 hingga 2024, terdapat total 201 kegiatan yang telah terlaksana pada Pilar 3 dengan jumlah dan sebaran aksi yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Pada 2021 terdapat 30 kegiatan yang tersebar di 13 aksi, 2022 terdapat 28 kegiatan pada 8 aksi, 2023 81 kegiatan pada 15 aksi, dan pada 2024 ini 62 kegiatan pada 13 aksi. Berdasarkan pendataan yang telah dihimpun, keseluruhan aksi keseluruhan 16 aksi yang diamanatkan baik pada Fokus 1 maupun Fokus 2 telah dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan selama rentang empat tahun pelaksanaan.

GRAFIK 2.9

Jumlah Aksi dan Kegiatan PE Pilar 3 Tahun 2021-2024



Dari 55 kegiatan yang tersebar pada 11 aksi di tahun 2024 ini, 41 kegiatan dilaporkan oleh BNPT, 10 kegiatan dilaporkan oleh PPATK, dan 4 kegiatan dilaporkan oleh Kemlu. Terdapat 20 kegiatan yang tersebar pada 9 aksi di Fokus 1, sedangkan 35 kegiatan tersebar pada 3 aksi di Fokus 2. Jadi dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan pada Pilar 3 dikonstruksikan oleh BNPT dengan dominasi pada Fokus 2 terkait Kerjasama Internasional.

Fokus 1

Peningkatan Kapasitas Kemitraan para Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

- 1 PPATK mendorong pegawai BNPT menjadi *FATF Lead Reviewer* untuk *Immediate Outcome* (IO) 10 mengenai pencegahan pendanaan terorisme untuk Nepal. Proses *reviewing* ini mendorong *knowledge sharing* dan *benchmarking* secara signifikan.
- 2 Integrasi data profil mitra pembangunan dan program dari Bappenas melalui *donor coordination platform* ke I-KHub.



GAMBAR 2.23

Peningkatan Kapasitas Melalui FATF Lead Reviewer

Fokus 2

Peningkatan Kerjasama Internasional pada Instrumen Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

- 1 Disahkannya resolusi ECOSOC "*Treatment of Children Associated with Terrorist Groups, Including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups*" yang telah diadopsi pada forum Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina, Austria, 17 Mei 2024 menjadi titik awal pengembangan prinsip dan pedoman penanganan anak terasosiasi terorisme di tingkat global.



GAMBAR 2.24

Pengesahan Resolusi ECOSOC yang diadopsi pada Forum CCPCJ

C. LAPORAN KELOMPOK KERJA (POKJA) TEMATIS RAN PE

Tahun 2024, Pokja Tematis kembali mendukung dan memperkuat implementasi RAN PE melalui penetapan Keputusan Kepala BNPT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Tematis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2024. Keputusan ini memperbarui Keputusan Kepala BNPT (SKEP BNPT) Nomor 299 Tahun 2022. Kelembagaan Pokja Tematis terdiri dari tujuh bidang yang merepresentasikan isu-isu strategis dalam implementasi RAN PE, yaitu Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban, Komunikasi Strategis, Pelibatan Pemuda, Rehabilitasi dan Reintegrasi, Kesiapsiagaan Nasional, dan Penegakan Hukum dan HAM.

Peran dan Fungsi Pokja Tematis

Posisi Pokja Tematis tidak sekedar sebagai wadah formal organisasi masyarakat sipil (OMS) terlibat dalam Sekber RAN PE, namun juga untuk melakukan *update* perkembangan kerja-kerja OMS terkait PCVE di Indonesia. Sebagai sebuah platform partisipasi publik, kehadiran Pokja Tematis diharapkan bisa melakukan tiga fungsi utama yaitu koordinatif, konsultatif, dan pemantauan/evaluasi. Tahun 2024 merupakan momentum kritis Pokja Tematis diuji efektivitasnya dalam memainkan peran transformatif, untuk menjaga dan mengawal proses di Sekber RAN PE tetap transparan dan akuntabel.

1. Fungsi Koordinasi

Memiliki legal hukum yang jelas, membuat Pokja Tematis selain mengikuti kultur birokrasi, tetapi harus secara luwes memainkan pola koordinasi di internal dan eksternal. Koordinasi secara internal Pokja Tematis dilakukan secara formal maupun non-formal. Secara formal, sejumlah pertemuan rutin Pokja

Tematis digelar untuk merespons situasi terkini, tetapi juga secara rutin diarahkan untuk mendapatkan update dari sejumlah anggota. Secara tidak langsung, pemetaan *“who do what”*, membantu sinergi atau kerja sama antar masyarakat sipil. Misalnya pembuatan film *“The Invisible Wall”* oleh Ruang Obrol, kami anggap sebagai kontribusi besar sejumlah organisasi seperti DASPR, WGWC, Yayasan Empatiku, Peace Generation, dan Ruang Obrol.

Sedangkan koordinasi non-formal, secara spontan dan responsif dalam grup WhatsApp, di mana seluruh koordinator dan anggota bertemu. *Update* reguler tentang perkembangan radikalisme dan tren terorisme, isu-isu terkini terkait dengan situasi korban ekstremisme berbasis kekerasan, undangan kegiatan anggota Pokja Tematis dan sebagainya. Ini merupakan penanda bahwa perhatian dan kepedulian antar anggota masih hidup.

Secara eksternal, Pokja Tematis masih berfokus pada Sekretariat Bersama RAN PE. Sebagai bagian dari pilar di Sekber RAN PE, koordinasi dengan BNPT dilaksanakan 3 bulan sekali, untuk melakukan *update*, membahas *gap*, dan mendorong sejumlah penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh anggota Pokja Tematis. Serta mendorong penguatan prinsip-prinsip (supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal), ke dalam seluruh proses implementasi pilar-pilar dalam Sekber RAN PE. Pola koordinasi secara formal memberikan efek positif, tidak saja pada efektivitas *update* implementasi program di masing-masing organisasi. Tampaknya pertemuan secara tatap muka dengan pihak BNPT dan lintas kementerian/lembaga, merupakan momentum strategis untuk menyampaikan sejumlah perhatian, termasuk hasrat kerja sama, yang sayangnya belum optimal ditindaklanjuti karena sejumlah alasan teknis.

2. Fungsi Konsultatif

Tahun 2024 merupakan tahun krusial bagi Pokja Tematis memainkan peran konsultasi dengan pihak pemerintah. Menjemput RAN PE fase II Tahun 2025-2029, meskipun tidak ditunjuk secara langsung sebagai bagian dari perwakilan masyarakat sipil dalam penyusunan RAN PE fase II, kehadiran Pokja Tematis cukup substansial dalam forum

konsultasi publik perumusan RAN PE Tahun 2025-2029. Keterlibatan Pokja Tematis dan anggotanya secara aktif dalam 9 seri konsultasi publik (FGD) penyusunan RAN PE tahun 2025-2029, yang berlangsung sejak Mei hingga Juli 2024, sebagai narasumber dan peserta aktif.

Untuk memastikan suara OMS lebih optimal, Pokja Tematis bekerja sama dengan *Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism* (WGWC) menyelenggarakan konsultasi publik secara daring untuk menggalang masukan dari OMS terkait isu-isu penting RAN PE fase II. Konsultasi Publik dilaksanakan 26 Juni 2024 dan dihadiri oleh 104 peserta (70 perempuan, 34 laki-laki perwakilan 55 lembaga/OMS dari berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku hingga Sumatera Barat. Jaringan WGWC juga menyelenggarakan konferensi dan konvensi bertajuk “Perempuan, Agensi, dan Pemberdayaan dalam Melawan Ekstremisme Kekerasan” pada 4-7 Mei 2024 di Purwakarta, merekomendasikan sejumlah isu kunci dalam implementasi RAN PE, di antaranya terkait akses pada keadilan korban terorisme agar memperoleh dukungan jangka panjang dan komprehensif.

Hasil tertulis masukan masyarakat sipil diserahkan secara formal kepada Deputy III Kerjasama Internasional BNPT, pada pertemuan audiensi 18 Oktober 2024 kantor Deputy Kerjasama Internasional di Gedung BUMN, Jakarta.

GAMBAR 2.25

Kertas Usulan Pengarusutamaan Gender dalam Rancangan Perpres RAN PE



(Dokumentasi WGWC dan AMAN Indonesia)

Sebagai sebuah *platform* NGO di tingkat nasional yang bekerja untuk PCVE, kehadiran Pokja Tematis seharusnya bisa dioptimalkan sebagai kekuatan kolektif masyarakat sipil Indonesia, yang perannya mumpuni bukan saja sebagai narasumber, tapi juga sebagai bagian dari penyusun rancangan Peraturan Presiden dan Matriks Aksi RAN PE fase II. Khususnya, sejumlah ahli sensitivitas gender, HAM, dan perlindungan anak, akan mampu membantu perumusan indikator yang sensitif gender, dan inklusif, serta peka kepada kebutuhan korban terorisme, maupun perempuan dari keluarga mitra deradikalisasi.

Peran konsultatif Pokja Tematis lainnya adalah upaya advokasi untuk memastikan “pertemuan antar pilar” akhirnya bisa tercapai di tahun 2024, dengan dukungan Kesekretariatan Sekber RAN PE. *Trust* (kepercayaan) dan *collective responsibility* (tanggung jawab bersama), adalah kunci utama dalam meruntuhkan tembok prasangka antar birokrasi dan

OMS. Mekanisme koordinasi reguler antara anggota Sekber RAN PE, dengan menghadirkan orang kunci di tiap pilar, merupakan proses panjang untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan OMS, dengan saling mendengarkan capaian pilar dan *gap* yang ditemukan selama implementasi.

3. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi

Meskipun Pokja Tematis belum pernah menjalankan pemantauan dan evaluasi secara sistematis, tetapi pertemuan reguler secara internal maupun eksternal memberikan ruang observasi dan penilaian pada efektivitas implementasi program. Dari sejumlah seri rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pokja Tematis, khususnya Ketua Pokja Tematis, menunjukkan tingkat sensitivitas gender masih rendah pada program. Meskipun pelibatan aktor perempuan sudah mulai banyak, tetapi upaya membongkar ketimpangan gender masih malu-malu. Kami khawatir bahwa persoalan ketimpangan gender kemudian dijawab dengan pelibatan lebih banyak tokoh perempuan, bukan membongkar kesadaran kritis atas relasi kuasa gender yang timpang di keluarga dan masyarakat, yang meletakkan perempuan dan laki-laki terdampak berbeda dalam konteks ekstremisme berbasis kekerasan.

Untuk itu, melalui jaringan WGWC, advokasi untuk mendorong Peraturan Kepala BNPT (Perka) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dijalankan dengan mengirimkan draf Perka BNPT, pada 18 Oktober 2024 kepada Deputi

III Kerjasama Internasional BNPT. Draf ini telah dibahas oleh masyarakat sipil dalam jaringan WGWC dan juga sejumlah ahli pada 18 Juli 2024. Ada sejumlah langkah yang diharapkan dijalankan oleh BNPT, yaitu Biro Hukum melakukan kajian draf, diskusi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta pelibatan Kementerian/Lembaga dalam pembentukan Pokja PUG yang akan mengawal implementasi PUG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Ketua Pokja Tematis juga diwawancarai oleh tim evaluator UN Women, terkait efektivitas implementasi RAN PE Tahun 2020-2024. Partisipasi dalam evaluasi RAN PE merupakan kontribusi penting, dilihat dari perspektif masyarakat sipil dan sensitivitas gender. Pada konteks pelibatan masyarakat sipil, keberadaan Pokja Tematis dianggap lebih efektif dalam mengkoordinasi dan mengkonsolidasi suara masyarakat sipil untuk menebalkan prinsip-prinsip RAN PE, khususnya PUG, HAM, dan perlindungan anak. Dalam hal penguatan sensitivitas gender, gerbong besar WGWC, tidak saja memberikan catatan kritis pada ketimpangan gender, tetapi juga rekognisi agensi dan kepemimpinan perempuan.

Capaian Pokja Tematis berbasis Bidang

1. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam menjalankan mandat memastikan prinsip pengarusutamaan gender pada implementasi RAN PE, Bidang PUG menjalankan sejumlah agenda transformatif dalam mendorong kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang responsif gender dan penguatan agensi dan kepemimpinan perempuan dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Sebagai perwujudan advokasi kolektif masyarakat sipil dalam perumusan RAN PE fase II, Pokja Tematis berkolaborasi dengan WGWC dan AMAN Indonesia menyelenggarakan Konsultasi Masyarakat Sipil untuk RAN PE fase II yang menghasilkan (1) eksplorasi tantangan dan tren isu ekstremisme berbasis kekerasan 5 tahun mendatang; (2) rekomendasi agenda PUG dalam 9 tematik draf RAN PE fase II Tahun 2025-2029; hingga (3) peran transformatif Sekber RAN PE dalam mendorong agenda dan prinsip PUG dalam rancangan yang tengah disiapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks mendorong reformasi birokrasi yang responsif gender dalam kelembagaan BNPT, WGWC berkolaborasi dengan AMAN Indonesia dan Institut Perempuan telah menyusun rancangan Peraturan Kepala BNPT tentang Pengarusutamaan Gender di bidang Penanggulangan Terorisme. Dihasilkan dari

serangkaian diskusi dengan para aktivis dan praktisi di lingkungan WGWC sejak 2022, rancangan peraturan ini mencakup strategi pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh program dan perencanaan anggaran, serta implementasi di berbagai bidang, termasuk pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kerangka legislasi dan kerja sama internasional. Selain itu, Pedoman Pengarusutamaan Gender juga telah dikembangkan sebagai dokumen pendukung Rancangan Perka BNPT tentang PUG.

Upaya penguatan agensi dan kepemimpinan perempuan juga menjadi capaian penting Bidang Pengarusutamaan Gender dalam Pokja Tematis. Melalui kolaborasi lintas pihak, di antara WGWC, DASPR, dan AMAN Indonesia, dukungan dan pendampingan untuk penguatan kapasitas kemandirian dan kelembagaan Forum Support Perempuan Tangguh dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembentukan forum ini pada 2022 silam.

Gambar 2.26

Pelatihan Active Listening bagi Pengurus Fospeta



(Dokumentasi DASPR-WGWC)

Rangkaian penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam agenda pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme juga dilakukan dengan memperkuat kelembagaan daerah dalam menjalankan RAD PE, termasuk menyiapkan program dan kebijakan PE yang responsif gender. AMAN Indonesia bekerja sama dengan LIBU Perempuan di Sulawesi Tengah dan La Rimpu di Nusa Tenggara Barat menggelar Lokakarya Penguatan Kapasitas bagi Pemangku Kepentingan Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat terkait keterhubungan PVE dengan women, peace, and security (WPS). Selain kepada pemangku kepentingan di pemerintah daerah, penguatan agensi perempuan juga dilakukan kepada OMS melalui pelatihan WPS bagi OMS di Bima, NTB dan Palu, Sulawesi Tengah.

Gambar 2.27

Lokakarya Penguatan Kapasitas bagi Pemangku Kepentingan Sulawesi Tengah terkait keterhubungan PVE dengan WPS



(Dokumentasi LIBU Perempuan dan AMAN Indonesia)

Gambar 2.28

Lokakarya Penguatan Kapasitas bagi Organisasi Perangkat Daerah Nusa Tenggara Barat terkait keterhubungan PVE dengan WPS, di Mataram, 30 September-1 Oktober 2024;



(Dokumentasi La Rimpu dan AMAN Indonesia).

2. Bidang Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban

Permasalahan yang dihadapi oleh korban dan penyintas terorisme mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya akses terhadap layanan pemulihan yang berkelanjutan, keterbatasan dalam memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, hingga minimnya rasa aman dan perlindungan yang diperlukan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Selain itu, banyak korban dan penyintas yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemandirian ekonomi, terutama di tengah stigma sosial yang masih melekat serta terbatasnya dukungan berbasis komunitas yang inklusif.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Bidang Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak Korban telah mendorong berbagai agenda intervensi strategis yang bertujuan memperkuat kemandirian, pemulihan berkelanjutan, dan perlindungan bagi korban dan penyintas. Salah satu langkah penting adalah pelaksanaan “Pelatihan Bimbingan Teknis di Sektor Kuliner bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif” yang ditujukan kepada penyintas di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Kegiatan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandung ini diharapkan dapat memberdayakan penyintas secara ekonomi, sehingga mereka mampu meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan.

Dalam aspek mendorong pemenuhan hak dan pemulihan korban, Yayasan Keluarga Penyintas (YKP), LIBU Perempuan, dan AMAN Indonesia telah mengambil peran penting melalui sejumlah program. Yayasan Keluarga Penyintas berfokus pada pendampingan pengajuan hak perlindungan ke LPSK, yang mencakup layanan kompensasi, medis, psikososial, dan psikologi. Selain itu, dukungan langsung berupa penyaluran santunan kepada penyintas turut menjadi bagian dari upaya ini.

Gambar 2.29

Advokasi dan Penyerahan Dokumen Surat Permohonan Layanan LPSK untuk Penyintas Wilayah Jawa Barat, Bali, Jabodetabek dan Poso, Sulawesi Tengah



(Dokumentasi Yayasan Keluarga Penyintas)

Di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, intervensi juga difokuskan pada pendampingan psikososial korban terorisme yang dilakukan oleh LIBU

Perempuan dan AMAN Indonesia. Langkah ini diperkuat dengan upaya membangun jaring pengaman sosial berbasis komunitas melalui pengembangan Dialog Reflektif Terstruktur (*Reflective Structured Dialogue/RSD*) dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan di sekitar tempat tinggal para penyintas. Hal ini diharapkan tidak hanya mendukung pemulihan jangka panjang korban, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif untuk peduli dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

3. Bidang Keterlibatan Pemuda

Tiga capaian penting dalam bidang keterlibatan pemuda dalam implementasi RAN PE tahun 2024, di antaranya: *pertama*, menguatnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) pemuda melalui sejumlah peningkatan kapasitas dalam isu-isu yang bersinggungan dengan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti isu kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga isu pemuda, perdamaian, dan keamanan (*youth, peace, and security*). Sejumlah program seperti SHIFT (*Strengthening Interfaith Forums and Youth Engagement in Indonesia to Promote Tolerance*), PREVENT, dan konsorsium Inklusi yang dimotori oleh INFID berhasil meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemuda mengenai peran-peran mereka dalam mengelola isu keberagaman. Sementara itu, MOVERS Workshop yang digagas oleh KAMI Damai telah berhasil meningkatkan kapasitas pemuda terkait agenda *youth, peace, and*

security (YPS), sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan.

Gambar 2.30

Pelatihan Orang Muda (Training for Youth Leaders) di Cirebon



(Dokumentasi INFID)

Kedua, meluasnya ruang perjumpaan untuk merayakan keberagaman. Peace Leader Indonesia secara konsisten menyelenggarakan rangkaian Peace Service (bersih-bersih rumah ibadah) yang tidak hanya mendekatkan pemuda pada nilai keberagaman, tetapi juga memperkuat solidaritas antar kelompok melalui kerja sama dan gotong royong.

Gambar 2.31

Pelatihan Orang Muda (Training for Youth Leaders) di Cirebon



(Dokumentasi INFID)

Ketiga, tersedianya dukungan pendanaan untuk memperkuat inisiatif pemuda sebagai agen perubahan. Youth-Led Impact Grant oleh Indika Foundation dan Peace Generation memberikan kesempatan kepada pemuda untuk menciptakan dampak nyata di komunitas

mereka. Hibah ini mendorong pemuda untuk melaksanakan program-program yang mendukung perdamaian dan keberagaman. Selain itu, Art For Peace Grant yang didukung oleh AMAN Indonesia memberikan ruang kepada komunitas seni anak muda untuk mengampanyekan kesetaraan gender, perdamaian, keberagaman melalui gelaran seni pertunjukan musik, teater, tari, instalasi seni rupa, dan *stand up comedy*.

4. Bidang Komunikasi Strategis

Meluasnya narasi damai dan praktik baik dalam pencegahan ekstremisme menjadi salah satu upaya strategis dalam menghadapi tantangan meningkatnya radikalisme dan polarisasi sosial. Bidang Komunikasi Strategis telah memberikan sumbangsih melalui sejumlah program untuk menyebarkan kesadaran dan narasi positif yang mendukung perdamaian.

Pertama, terkonsolidasinya pengetahuan masyarakat sipil tentang PCVE melalui pengelolaan pengetahuan. Pengelolaan K-Hub Komunitas, Peluncuran K-Hub PCVE Outlook, merupakan visualisasi kompilasi hasil penelitian dan proyeksi tren di ranah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang dilakukan oleh Peace Generation. Saat ini tersedia dua *outlook* yang berisi ensiklopedia modul pendidikan bina damai dan modul deradikalisasi, yang memberikan wawasan komprehensif bagi pelaku pendidikan dan komunitas. Sementara itu, WGWC melalui produksi konten reguler di WGWC K-HUB di laman www.womenandcve.id

www.womenandcve.id menjadi langkah penting untuk memperkuat narasi perempuan dalam pencegahan ekstremisme.

Gambar 2.32

K-HUB Forum 2024 Potret Cerita dan Data Jadi Makna



(Dokumentasi Peace Generation)

Kedua, penguatan narasi alternatif dan kontra narasi melalui media kreatif. Publikasi buku komik cerpen *Cinta Islam Cinta Indonesia* oleh El Bukhari Institute menargetkan anak-anak sebagai segmen strategis untuk membangun kesadaran dini tentang pentingnya mencintai perdamaian dan keberagaman. Film dokumenter “Road to Resilience” dan buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” yang diterbitkan oleh Ruangobrol menggambarkan pengalaman individu yang kembali dari konflik ekstremisme berbasis kekerasan, yang tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tetapi juga membantu meredakan ketegangan dan mempererat kohesi sosial.

Di kalangan anak muda, kampanye kreatif seperti “Breaking Down the Wall #Friendship4Peace” yang digagas oleh Peace Generation memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian. Kampanye ini mengajak anak muda berkontribusi secara aktif melalui

aplikasi Campaign untuk mendukung narasi damai dan menjadi agen perubahan. Serupa tapi tak sama, INFID juga mendukung kampanye penyebaran narasi perdamaian dengan menggagas kerja sama dengan tujuh mitra media, termasuk media alternatif dan individu kreator yang fokus pada isu kesetaraan gender, inklusi sosial, dan disabilitas, serta media berbasis Islam moderat seperti Konde.co; FeminisThemis, BandungBergerak, Bincang Syariah, Bincang Muslimah, Islami.co, serta IB Times. Screening film “The Invisible Wall”, sebuah dokumentasi mengenai proses reintegrasi dan tantangan yang dihadapi oleh para *credible voices* dalam gelaran PeaceFestival di Bandung, Jawa Barat.

5. Bidang Kesiapsiagaan Nasional

Pokja Tematis terus berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat sebagai upaya strategis untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dengan pendekatan yang holistik, inisiatif ini berfokus pada tiga pilar program.

Pertama, penguatan resiliensi atau daya tangguh komunitas. *Piloting* program penguatan resiliensi desa/kelurahan untuk mencegah radikalisme dengan mengadopsi praktik baik OMS merupakan agenda utama Pokja Tematis di bidang Kesiapsiagaan Nasional. Program ini penting karena menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mencegah radikalisme di tingkat akar rumput. Dengan menggabungkan pemberdayaan perempuan,

sistem deteksi dini, dan dialog, program ini diharapkan mengatasi akar permasalahan radikalisme dan membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi ekstrem. Selama tahun 2024 terdapat 53 inisiasi penguatan kesiapsiagaan desa dalam mencegah ekstremisme melalui inisiasi Desa Damai oleh Wahid Foundation dan Desa Damai Berkelanjutan yang dijalankan AMAN Indonesia. Inisiasi ini tersebar di tujuh provinsi seperti Sulawesi Tengah, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Selatan. Selain elemen pencegahan konflik dan ekstremisme berbasis kekerasan, AMAN Indonesia menambahkan indikator resiliensi dari ancaman bencana dan perubahan iklim sebagai isu keamanan perempuan.

Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan dan konflik sosial dengan modal sosial, agama/kepercayaan, budaya, dan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, mereka dapat lebih memahami bahaya radikalisme, mengidentifikasi individu atau kelompok yang terpapar, dan secara proaktif mencegah penyebaran ideologi tersebut. Di Sumenep, Madura, Serve Indonesia bersama masyarakat menginisiasi terbentuknya Satgas Anti Radikalisme untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Sementara itu, di Desa Kandangsemangkon, Lamongan, dibentuk Tim Tangguh yang berfokus pada reintegrasi sosial dan penguatan

kohesi sosial. Tim Tangguh merupakan hasil kerja sama WGWC, AMAN Indonesia, dan PW Fatayat NU Jawa Timur. Di sejumlah provinsi AMAN Indonesia memfasilitasi desa untuk membangun Tim Tangguh Desa Damai Berkelanjutan, yang dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah radikalisme dan menjaga perdamaian.

Yayasan Empatiku dan WGWC melakukan pendampingan untuk memperkuat kapasitas Tim Tangguh yang telah terbentuk pada tahun sebelumnya agar lebih solid dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan reintegrasi sosial. Yayasan Empatiku fokus pada penguatan Tim Tangguh di Kebalen, Kabupaten Bekasi, sementara WGWC menyelenggarakan program penyegaran pengetahuan tentang deteksi dini dan penguatan internal Tim Tangguh Mekarjaya Depok untuk memperkuat agenda reintegrasi sosial dan pencegahan ekstremisme.

Gambar 2.33

Pendampingan Tim Tangguh di Kebalen, Kabupaten Bekasi



(Dokumentasi Yayasan Empatiku)

Gambar 2.34

Pembentukan Tim Tangguh Desa Damai Berkelanjutan di Desa Kelei, Pamona Timur, Poso, Sulawesi Tengah, 27 Oktober 2024



(Dokumentasi AMAN Indonesia)

Ketiga, pengembangan riset untuk kesiapsiagaan. Selain intervensi pada level komunitas sejumlah anggota dan mitra Pokja Tematis melakukan pengembangan riset untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi radikalisme. Riset dilakukan untuk memahami tren dan dinamika radikalisme, serta mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. SeRVE Indonesia fokus pada riset yang membaca radikalisme *online* dan *offline* untuk memetakan pola penyebaran ideologi radikal, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan mengembangkan strategi kontra narasi yang tepat sasaran. Wahid Foundation meluncurkan “Laporan Riset Sekolah Damai Jawa Tengah: OMS Berperan Penting dalam Mendorong Kebijakan Pendidikan yang Inklusif”. Riset ini mengungkapkan peran OMS dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah. Temuan riset diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan bebas dari radikalisme.

6. Bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi

Rehabilitasi dan reintegrasi merupakan investasi berharga sekaligus langkah penting untuk memutus siklus kekerasan dengan membantu individu yang pernah terpapar dan terlibat terorisme memahami dan meninggalkan ekstremisme berbasis kekerasan, serta membangun masa depan yang lebih baik. Sepanjang tahun 2024 terdapat tiga capaian penting kerja Pokja Tematis untuk mendukung efektivitas RR (Rehabilitasi dan Reintegrasi).

Pertama, penguatan legislasi terkait Rehabilitasi dan Reintegrasi. Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak yang terlibat dalam kasus terorisme melalui intervensi, antara lain dengan legalisasi Standar dan Modul Penanganan Narapidana Teroris Perempuan, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan mereka. Penguatan legislasi lainnya pada legalisasi Standar dan Modul Perlakuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme di Pemasyarakatan untuk memastikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Di provinsi Jawa Timur, INFID dan Fatayat NU mengadvokasi lahirnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur untuk Bupati/Walikota Se Jawa Timur Nomor 200.1.3/3992/209/5/2024 tentang Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial

bagi Mantan Narapidana dan Orang atau Kelompok Orang Terpapar Paham Radikal termasuk Deportasi dan Returni.

Kedua, penguatan kapasitas aktor dalam penanganan kasus terorisme. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan dan pendampingan bagi individu terpapar paham radikal terorisme, terutama perempuan dan anak, sejumlah anggota Pokja Tematis memfasilitasi ruang peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran akan isu gender dan hak anak bagi instansi pemerintah maupun masyarakat sipil. INFID telah dan sedang memperkuat keterampilan pendampingan yang integratif dan komprehensif serta pendekatan penanganan yang memerhatikan isu gender dan hak anak kepada OMS dan instansi pemerintah daerah Jawa Timur, termasuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Lamongan. Selain itu, pertemuan reguler Forum *Multi-Stakeholder* Jawa Timur juga terus aktif digelar untuk mendorong kolaborasi penanganan dan pendampingan individu terpapar paham radikal terorisme, khususnya perempuan dan anak. *National Advisory Meeting* digelar untuk penyiapan daerah dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan deradikalisasi dan reintegrasi sosial deportasi dan *returnee* perempuan dan anak. Salah satu capaian positif Forum Multi-Stakeholder di Sidoarjo dan Lamongan adalah memberikan pendampingan intensif terhadap 14 klien yang terdiri dari eks narapidana dan

keluarganya, dengan pendekatan yang berbeda di masing-masing kabupaten.

Peningkatan kapasitas petugas pema-
syarakatan dan pembimbing kemasyara-
katan difasilitasi YPP melalui pelatihan
dan penyediaan modul khusus tentang
penanganan perempuan dan anak dalam
kasus terorisme. Modul yang diproduksi
antara lain Modul Juknis Litmas Sidang
Pengadilan terhadap Anak Kasus Teror-
isme, Modul Peningkatan Kapasitas bagi
Pembimbing Kemasyarakatan, Panduan
Teknis Sistem Deteksi Dini dan Respons
Dini Ekstremisme Berbasis Kekerasan
dan Terorisme Provinsi Jawa Tengah.
Secara khusus YPP memberikan layanan
berupa pelatihan bagi Petugas Pema-
syarakatan Perempuan, serta peningkatan
Kapasitas Petugas Pema-
syarakatan dalam Perlakuan Anak. Upaya-upaya ini
diharapkan dapat menciptakan sistem
penanganan kasus terorisme yang lebih
komprehensif, humanis, dan berper-
spektif HAM.

Gambar 2.35

Pelatihan Pedoman Teknis Penanganan dan Pendampingan
Deportan/Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham
Radikal Terorisme di Provinsi Jawa Timur, 20-22 Februari 2024 di
Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya



(Dokumentasi INFID)

Gambar 2.36

FGD Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Pembimbing
Kemasyarakatan di Jakarta, 17-18 September 2024



(Dokumentasi YPP)

Gambar 2.37

Peningkatan Kapasitas Petugas Pema-
syarakatan dalam Perla-
kuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme



(Dokumentasi YPP)

Ketiga, penguatan agensi perempuan
dan kolaborasi antar aktor dalam rein-
tegrasi sosial. WGWC, AMAN Indo-
nesia, dan Fatayat NU Jawa Timur
telah memperkuat kapasitas para
pemangku kepentingan utama Peme-
rintah Daerah Lamongan, khususnya
Desa Kandangsemangkon untuk meli-
batkan dan memperkuat agensi perem-
puan dalam mendukung reintegrasi
sosial mantan pendukung ISIS dengan
menerapkan praktik restoratif dan alat
dialog terstruktur yang reflektif (*Reflec-
tive Structured Dialogue/RSD*). Peme-
rintah Daerah mengadopsi skenario

reintegrasi sosial berbasis komunitas yang ditandai dengan pembentukan Tim Tangguh yang keanggotaannya diisi lebih 50% perempuan dari latar tokoh agama, tokoh perempuan. Tim Tangguh disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kandangsemangkon Nomor 188/86/KEP/413.314.3/2024 telah mendapat penguatan pengetahuan dan keterampilan deteksi dini, reintegrasi dan elemen pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan dilengkapi peta jalan atau rencana kerja mitigasi dan kontijensinya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kohesi sosial.

Bersama Tim Tangguh, WGWC, AMAN Indonesia, dan Fatayat NU telah melakukan upaya penguatan kohesi sosial melalui pendampingan dan 13 seri dialog yang melibatkan 104 perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok perempuan, anak muda, instansi pemerintah, dan keluarga deportan di Desa Kandangsemangkon, Lamongan, yang membuka ruang percakapan rekonsiliasi dan komitmen berbagai pihak untuk memberdayakan masyarakat termasuk mantan deportan dalam upaya mencegah radikalisme dan ekstremisme kembali di masyarakat.

Gambar 2.38

Tim Tangguh Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan, terdiri Unsur Perangkat Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan Pemuda



(Dokumentasi AMAN Indonesia)

Gambar 2.39

Konferensi untuk Reintegrasi Sosial yang digelar WGWC, AMAN Indonesia, dan Fatayat NU Jawa Timur Oktober 2024



(Dokumentasi AMAN Indonesia)

7. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Terdapat tiga capaian utama Pokja Tematis dalam mendorong kebijakan yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mempromosikan penghormatan terhadap HAM.

Pertama, penguatan pendidikan publik tentang HAM. Agenda ini difokuskan pada pembangunan generasi yang sadar HAM, mencegah pelanggaran HAM, mewujudkan masyarakat demokratis, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Program-program yang telah dijalankan anggota Pokja tematis seperti INFID, di daerah telah meningkatkan kesadaran anak muda dan pemahaman guru tentang HAM, serta mendorong penerapan Sekolah Ramah HAM di berbagai daerah. Program “Youth Fellowship: Orang Muda Pejuang HAM dan Demokrasi” yang difasilitasi INFID memberi ruang anak muda di Kota Bitung untuk memahami pentingnya peran mereka dalam memajukan demokrasi

dan menegakkan HAM. Program ini juga telah menciptakan metode berpikir kritis dan menyuarakan pendapat.

Kolaborasi INFID dengan Yayasan Cahaya Guru dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) membawa dampak positif dengan meningkatnya pemahaman guru dan kepala sekolah di Padang dan Bogor tentang prinsip-prinsip HAM dan GEDSI. Pelatihan didesain sebagai ruang pembelajaran yang dinamis dan reflektif, di mana para guru tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga merumuskan langkah konkret untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam praktik pengajaran sehari-hari. Para alumni pelatihan di berbagai daerah seperti Medan, Surakarta, Semarang, dan Medan secara aktif mensosialisasikan Sekolah Ramah HAM, menetapkan Duta Ramah HAM, dan menerbitkan peraturan tentang Kebijakan Ramah HAM di sekolah masing-masing.

Gambar 2.40

Pelatihan Youth Fellowship 25-27 Juli 2024 di Pusdiklat BPPP Kota Bitung



(Dokumentasi INFID)

Gambar 2.41

Pelatihan Pendidikan Ramah HAM bersama AGPAII di Kota Padang, 23-25 Mei 2024



(Dokumentasi INFID)

Kedua, membangun Kota atau Komunitas peka HAM. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai potensi konflik etnis dan agama yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Pembangunan kota atau komunitas yang memiliki perspektif HAM diperlukan untuk mempromosikan dialog dan toleransi antar kelompok yang berbeda, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. INFID dan Komnas HAM menggelar Festival HAM Kota Bitung, Sulawesi Utara, 2024 yang mempertemukan 514 peserta dari pemerintah, OMS, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk berbagi praktik terbaik dalam memajukan HAM di Indonesia. Festival ini menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti diskusi, kunjungan lapangan, deklarasi, pertunjukan seni, dan pameran, serta disiarkan secara daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Festival HAM juga memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya komunikasi, kolaborasi, kemitraan setara, dan mitigasi risiko dalam memperjuangkan HAM.

Sebagai rangkaian Festival, INFID juga melaksanakan pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Kota Bitung, dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan OMS dalam penerapan prinsip-prinsip HAM di tingkat lokal. Pelatihan ini telah membangun fondasi kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah yang menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan isu-isu HAM seperti perlindungan minoritas, perempuan, dan anak. Para pegiat HAM yang terlibat memahami mekanisme penghormatan, pemenuhan, perlindungan HAM, serta pemulihan korban.

Gambar 2.42

Pelatihan Kabupaten/Kota HAM di Kabupaten Bitung, 2-4 Juli 2024 yang difasilitasi INFID dan Komnas HAM



Gambar 2.43

Deklarasi Festival HAM di Kota Bitung, 29-31 Juli 2024



Ketiga, advokasi pembentukan dan implementasi kebijakan RAD PE. Peran OMS dalam pembentukan dan implementasi kebijakan RAD PE sangat signifikan dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia, terutama dalam mendorong pendekatan yang lebih sensitif gender dan membuka partisipasi perempuan serta kelompok rentan. Pendekatan yang sensitif gender diyakini agar kebijakan dan program yang dirancang dan dijalankan tidak diskriminatif dan mempertimbangkan keragaman pengalaman dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Jaringan WGWC memobilisasi masyarakat sipil di tingkat provinsi untuk berpartisipasi secara bermakna baik dalam penyusunan, implementasi serta monitoring RAD PE. Di Jawa Timur, bersama Fatayat NU, WGWC, dan BNPT menggelar Kenduri Perdamaian merayakan Lahirnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai ruang memperkuat kerja-kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam penanganan ekstremisme. Sebelumnya, INFID juga menggelar sosialisasi Pergub tersebut bersama anggota Forum *Multi-Stakeholder* Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo.

AMAN Indonesia juga bersama mitra JISRA (*Joint Initiative for Strategic Religious Action*) Indonesia, di antaranya Fahmina Institute, Fatayat NU Jawa

Barat, dan Imparsial, mengadvokasi lahirnya RAD PE Kabupaten Cirebon melalui Forum Sosialisasi dan diskusi penyusunan kebijakan dan program. Wahid Foundation memberikan dukungan teknis dan substansial kepada Pemerintah Kota Depok dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan kebijakan RAD PE. Wahid Foundation juga mendorong pelibatan lembaga filantropi dan sektor swasta dalam mendukung implementasi agenda pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan pada umumnya dan RAN PE secara khusus di nasional maupun daerah. Capaian progresif lainnya adalah lahirnya RAD PE Kota Semarang, yang diadvokasi oleh YPP bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Kota Semarang dan RAD PE Kota Depok di penghujung Desember 2024, yang diadvokasi oleh Wahid Foundation dan Yayasan Inklusif bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Kota Depok.

Gambar 2.44

Sosialisasi RAN PE dan Diskusi Penyusunan RAD PE Kabupaten Cirebon, 18 September 2024, kerja sama Mitra JISRA Indonesia (Fahmina Institute, AMAN Indonesia, Fatayat NU Jawa Barat, Imparsial) bekerja sama dengan Pemkab Cirebon



Gambar 2.45

Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2023, di Surabaya 6 Januari 2024 (Dokumentasi INFID)



Di Aceh, Balai Syura aktif terlibat memastikan implementasi dan keberlanjutan upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang responsif gender. Sebuah lokakarya digelar bersama OMS, Perguruan Tinggi, FKPT, FKUB, Badan Kesbangpol dan OPD lainnya untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan RAD PE. Di Sulawesi Tengah, LIBU Perempuan dan AMAN Indonesia memberikan pendampingan teknis untuk evaluasi penyelenggaraan RAD PE periode 2022-2024 sekaligus menyusun rancangan program fase keduanya. Di Nusa Tenggara Barat, La Rimpu dan AMAN Indonesia memberi dukungan kepada Badan Kesbangpol NTB melalui Tim Percepatan Pembentukan RAD PE agar menjadi agenda prioritas gubernur terpilih sebagai kerangka legislasi kolaborasi multi-pihak untuk perlindungan masyarakat dari ekstremisme berbasis kekerasan.

Gambar 2.46

Workshop Refleksi, Evaluasi, dan Strategi Keberlanjutan RAD PE Aceh, 23 November 2024 yang digelar WGWC dan Balai Syura Aceh

**Gambar 2.47**

Workshop Konsolidasi Pokja RAD PE Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, 24 Desember 2024, Difasilitasi LIBU Perempuan, AMAN Indonesia, dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah



D. LAPORAN FORUM KEMITRAAN NASIONAL (FKN) RAN PE

Forum Kemitraan Nasional (FKN) turut serta terlibat mendorong maksimalnya kolaborasi antara BNPT dan Kemendagri untuk mendukung implementasi kebijakan terkait RAN PE di daerah melalui penyusunan panduan implementasi kebijakan RAN PE di daerah. Panduan ini juga didorong bersama-sama oleh Kemendagri, BNPT, Wahid Foundation, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, dan Yayasan Inklusif. Panduan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman menyusun kebijakan implementasi RAN PE di berbagai daerah di Indonesia. Dokumen panduan ini kemudian diperkuat dengan surat himbauan dari Kemendagri yang menghimbau daerah-daerah di Indonesia untuk menggunakannya sebagai panduan menyusun kebijakan implementasi RAN PE di wilayah mereka masing-masing.

Dengan menggunakan panduan tersebut, Forum Kemitraan Nasional (FKN) memfasilitasi kemitraan para pemangku kepentingan untuk mendorong pembentukan dan penyusunan RAD PE Provinsi Sulawesi Selatan. Para pemangku kepentingan yang terlibat antara lain BNPT, Kemendagri, AIPJ2, dan Pemprov Sulawesi selatan, selain juga OMS di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, Wahid Foundation yang mewakili FKN RAN PE mendorong kemitraan para pemangku kepentingan menginisiasi RAD PE di Kota Depok. Bersama dengan Yayasan Inklusif, Yayasan Empatiku, serta berbagai pemangku kepentingan di masyarakat Kota Depok, FKN terlibat penuh selama proses advokasi dan penyusunan RAD PE Kota Depok. FKN juga memfasilitasi kemitraan dalam rangkaian penyusunan rekomendasi kebijakan RAN PE Fase II Tahun 2025-2029. Untuk mendorong pelaksanaan RAN PE periode kedua ini, saat ini tengah

berlangsung serangkaian kajian dan kegiatan melalui forum-forum *multi stakeholder* antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Capaian-capaian ini selaras dengan sejumlah rekomendasi untuk Forum Kemitraan pada Pertemuan Koordinasi 1 Agustus 2023 di Jakarta. Di antaranya, yaitu menyusun panduan dan mekanisme kemitraan, menyelenggarakan aktivitas untuk mendorong kesamaan persepsi tentang tujuan, peran, dan indikator keberhasilan FKN, dan mendorong keberlanjutan RAN PE setelah tahun 2024.

Di tengah capaian-capaian ini, disadari masih terdapat sejumlah tantangan seperti tata kelola organisasi, pemetaan regulasi terhadap para anggota, mendorong sektor swasta terlibat dalam RAN PE, termasuk pertemuan rutin FKN. Peran Sekretariat FKN dirasakan belum berjalan sesuai harapan.

Guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut, FKN bekerja sama dengan BNPT menggelar pertemuan koordinasi Forum Kemitraan Nasional pada Oktober 2024 untuk memastikan keterlibatan lembaga filantropi. Dua alasan pentingnya peran lembaga filantropi dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, yaitu *pertama*, filosofi lembaga filantropi yang lahir dengan tujuan merespons masalah-masalah publik. *Kedua*, dunia usaha — sumber pembiayaan sebagian lembaga filantropi— menghadapi dampak dan risiko aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan.¹⁹

Dalam forum yang dihadiri lebih dari 100 perwakilan dari berbagai kementerian/ lembaga serta para pemangku kepentingan

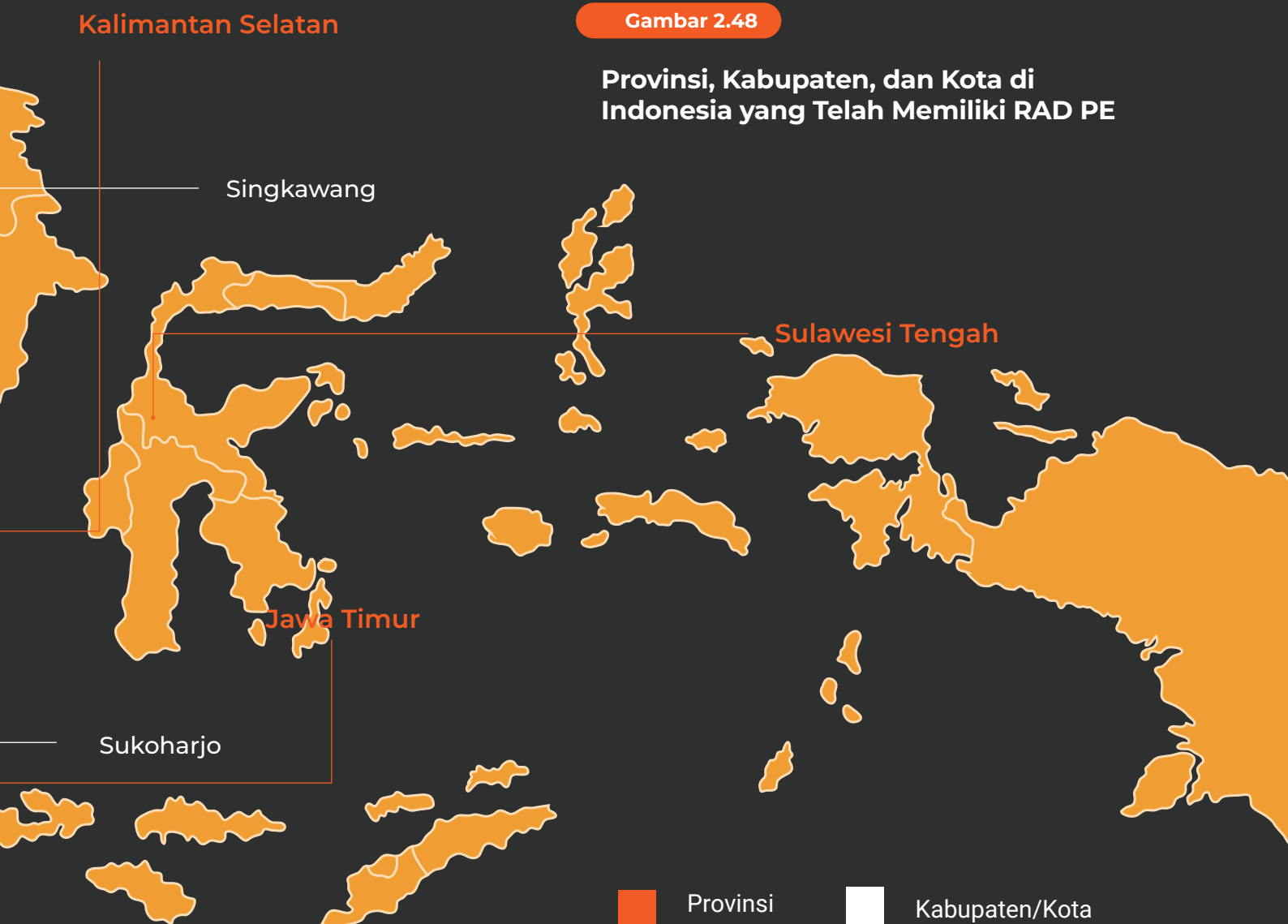
di masyarakat tersebut, lembaga filantropi diharapkan berperan lebih signifikan dan terlibat lebih maksimal dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga dari sektor kelompok usaha juga diharapkan mendukung implementasi RAN PE. Keberadaan FKN di tahun 2024 di antaranya mendorong penyusunan panduan kemitraan pemerintah dengan lembaga filantropi dan swasta, termasuk media, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan RAN PE, termasuk mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, serta menegaskan dukungan terhadap upaya perpanjangan periodisasi keketuaan dan keanggotaan FKN RAN PE.

¹⁹ Djafar, Alamsyah M., dan Libasut Taqwa. “Memperkuat Kemitraan Organisasi Filantropi: Catatan Pertemuan Tahunan Forum Kemitraan Nasional RAN PE 2024.” Wahid Foundation, Jakarta Pusat, 2024.

E. LAPORAN IMPLEMENTASI DI DAERAH

Terkait implementasi RAN PE di daerah, saat ini sudah terdapat 8 provinsi dan 13 kabupaten/kota yang memiliki perangkat penunjang implementasi RAN PE karena adanya kebijakan daerah, yaitu salah satunya RAD PE. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun untuk kabupaten/kota adalah Kota Pematang Siantar, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kota Singkawang, dan Kota Depok.



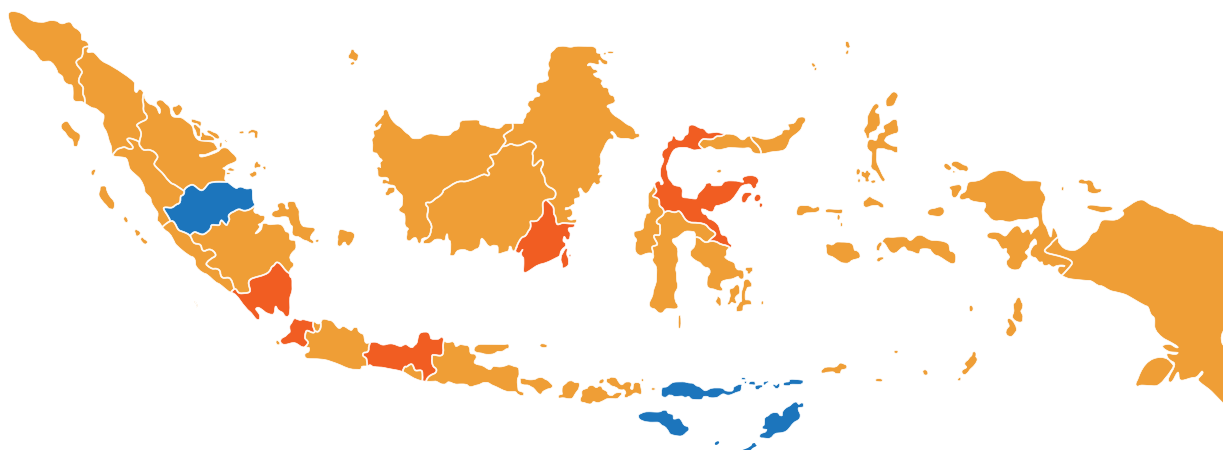


Terdapat 11 provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan pelaksanaan RAN PE di daerah yang terbagi kepada daerah yang memiliki RAD PE dan yang tidak memiliki RAD PE. Daerah yang sudah melaporkan kepada SIPKS Kemendagri dan memiliki RAD PE adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan daerah yang sudah melaporkan pelaksanaan RAN PE, namun belum memiliki RAD PE adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jambi, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Lebak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala. [Lihat Gambar 2.49]

Berdasarkan hasil pemantauan (monitoring) dan data yang berhasil dikompilasi oleh Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE melalui SIPKS mencakup berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki RAD PE dan/atau melaporkan aksinya ke SIPKS. Setiap daerah memiliki berbagai kegiatan spesifik yang sebagian besar terkait sosialisasi dan persiapan pembentukan Tim dan RAD PE, seperti: (1) Provinsi Banten: rapat tim terpadu dan pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan; (2) Provinsi Jambi: sosialisasi nilai-nilai toleransi, pemantauan pelaksanaan Pemilu 2024, dan fasilitasi penyelesaian konflik sosial. Target yang

Gambar 2.49

Daerah yang Memiliki RAD PE dan/atau Melaporkan ke Platform SIPKS

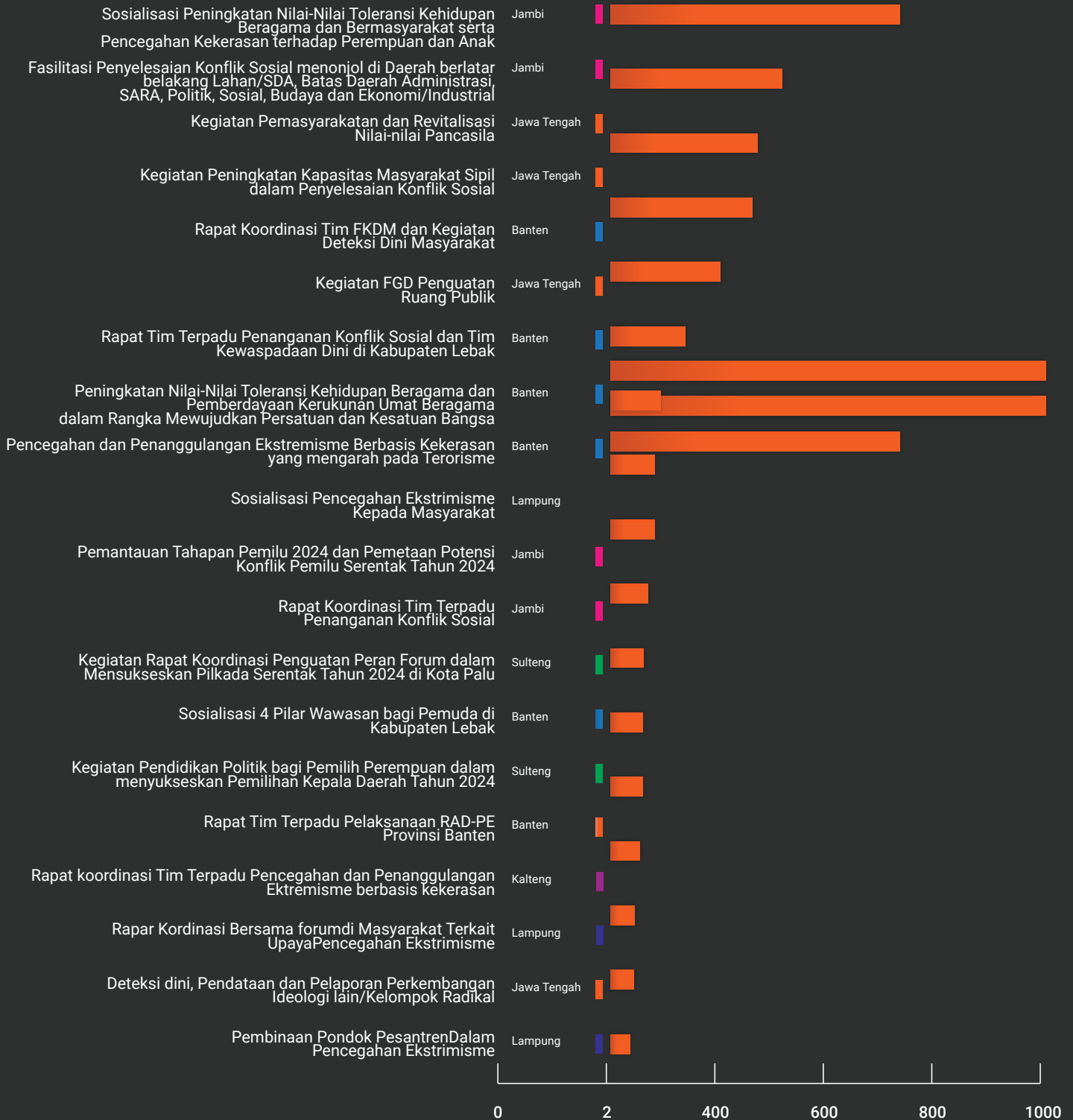


Sudah mengumpulkan laporan:

■ Sudah memiliki	Lampung Banten Jawa Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah	■ Belum memiliki	Jambi NTT Lebak Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Tabalong
--	---	--	--

GRAFIK 2.10

Kegiatan Implementasi RAN PE di Daerah dengan Anggaran Tertinggi



ingin dicapai mencakup hasil yang spesifik, seperti tersusunnya RAD PE, pelaksanaan sosialisasi, dan fasilitasi konflik sosial. Beberapa target memiliki fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas lokal. Provinsi Jambi adalah daerah dengan kegiatan yang anggarannya tertinggi dilaporkan pada SIPKS sekalipun belum memiliki RAD PE, dengan kegiatan terkait peningkatan nilai toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait perbandingan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan, Provinsi Banten memiliki anggaran yang dilaporkan lebih rendah dari Provinsi Jambi, namun memiliki jumlah kegiatan yang lebih banyak.

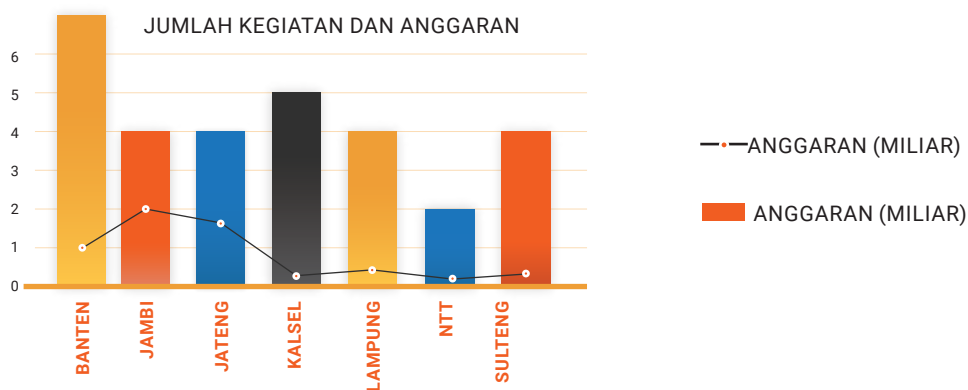
Dalam data grafik di atas terlihat bahwa upaya daerah terkait pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme

tidak terhambat dengan ketersediaan anggaran. Provinsi Banten memiliki anggaran yang lebih rendah dari Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Tengah, namun jumlah kegiatan yang dilakukan lebih banyak dibanding dua provinsi tersebut. Begitupun dengan Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki anggaran lebih rendah dibanding Provinsi Lampung, namun memiliki kegiatan lebih banyak dibanding provinsi tersebut.

Hal yang dapat menjadi contoh adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Provinsi Banten dengan OMS dalam melakukan upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yaitu dengan Yayasan Empatiku terkait deteksi dini. Penyusunan RAD PE Provinsi Banten juga melibatkan peran OMS sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih beragam dan pertemuan rutin terjalin antara para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan RAD PE.

Grafik 2.11

Perbandingan Anggaran dan Kegiatan di Tingkat Provinsi



F. ANALISA CAPAIAN OUTPUT DAN OUTCOME

Dari uraian laporan kegiatan Sekber RAN PE, pilar 1, pilar 2, pilar 3, Pokja Tematis, dan Forum Kemitraan Nasional (FKN) sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya, keseluruhan aksi, program, dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagian besar terlaksana dengan baik, *outstanding*, dan mendapat atensi yang luar biasa dari masyarakat, berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa *whole of government dan whole of society approach* yang menjadi salah satu prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024 dalam upaya PE menunjukkan hasil yang signifikan dan patut mendapat apresiasi.

Sebagaimana definisi aksi PE di dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 5). Dengan demikian setiap aksi PE yang dimaksud dan tertulis di dalam Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dapat dimaknai terdiri dari berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Aksi PE dimaksud, mewujudkan dalam berbagai program dan kegiatan serius pada isu PCVE di Indonesia juga dilaksanakan oleh berbagai OMS dan pemangku kepentingan di masyarakat yang tergabung secara struktural di dalam Pokja Tematis dan FKN.

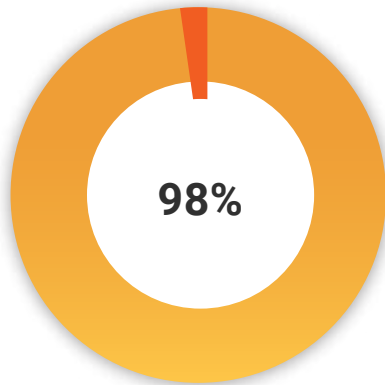
Secara lebih rinci, berdasarkan data pelaksanaan aksi PE yang dilaksanakan dan dilaporkan Kementerian/Lembaga melalui

platform I-KHub dan hasil olah data monitoring Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE hingga akhir tahun 2024, sebanyak 98% aksi PE terlaksana selama periode RAN PE Tahun 2020-2024, secara kuantitatif sebanyak 132 aksi PE terlaksana, dari total 135 aksi PE. Dari 98% aksi PE yang sudah terlaksana sebagaimana gambaran Grafik 2.12, Pilar 1 telah melaksanakan 99% aksi PE (85 dari 86 aksi PE), Pilar 2 telah melaksanakan 94% aksi PE (31 dari 33 aksi PE), dan Pilar 3 telah melaksanakan 100% aksi PE yang diamanatkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan jumlah aksi PE di tahun 2024 sebagaimana amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 secara total terdapat 76 aksi.

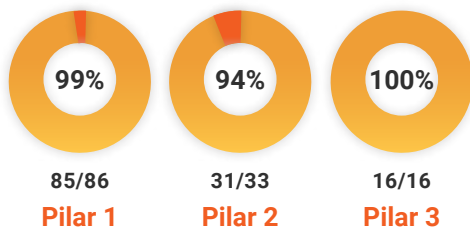
Hanya 2% (3 aksi PE) yang hingga penghujung Desember 2024 belum dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga anggota Pokja Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 3. Ketiga aksi PE yang belum terlaksana atau belum dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di tiga pilar tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 2.12

Progress Pemenuhan Aksi PE Tahun 2020-2024



132 Aksi terlaksana 3 aksi tidak terlaksana



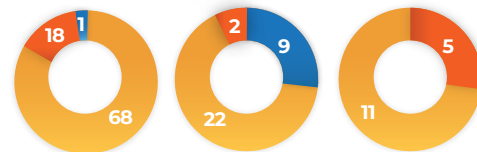
1. Pilar 1 dari 86 aksi PE, terdapat 1 aksi PE yang belum terlaksana, pada Fokus 7 (deradikalisasi dalam lapas), yaitu 'penyusunan standar kompetensi minimum petugas menangani tahanan dan narapidana terorisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam RAN, termasuk materi ketahanan terhadap potensi terpapar ideologi ekstrem'. *Leading sector* aksi ini adalah Kemenkumham, yang saat ini berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasaran.
2. Pilar 2 dari 33 aksi PE, terdapat 2 aksi PE yang belum terlaksana pada Fokus 4, yaitu sosialisasi muatan instrumen

Grafik 2.13

Progress Pemenuhan Aksi PE per Pilar RAN PE 2020-2024



60% Aksi sebagian terpenuhi; 81 aksi
38% aksi terpenuhi; 51 aksi
2% aksi tidak terpenuhi; 3 aksi



internasional yang akan disahkan, khususnya yang terkait dengan: a) konvensi Internasional tentang pemberantasan tindak pidana yang terkait penerbangan sipil internasional; b) konvensi Internasional tentang pemberantasan tindak pidana yang terkait keamanan pelayaran; c) konvensi Internasional tentang bahan peledak plastik; dan Fokus 5, yaitu pembentukan RUU tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak.

Ketiga aksi PE di atas belum dapat dilaksanakan atau diselesaikan oleh Kementerian/ Lembaga penanggung jawab di antaranya disebabkan berbagai kendala internal dan

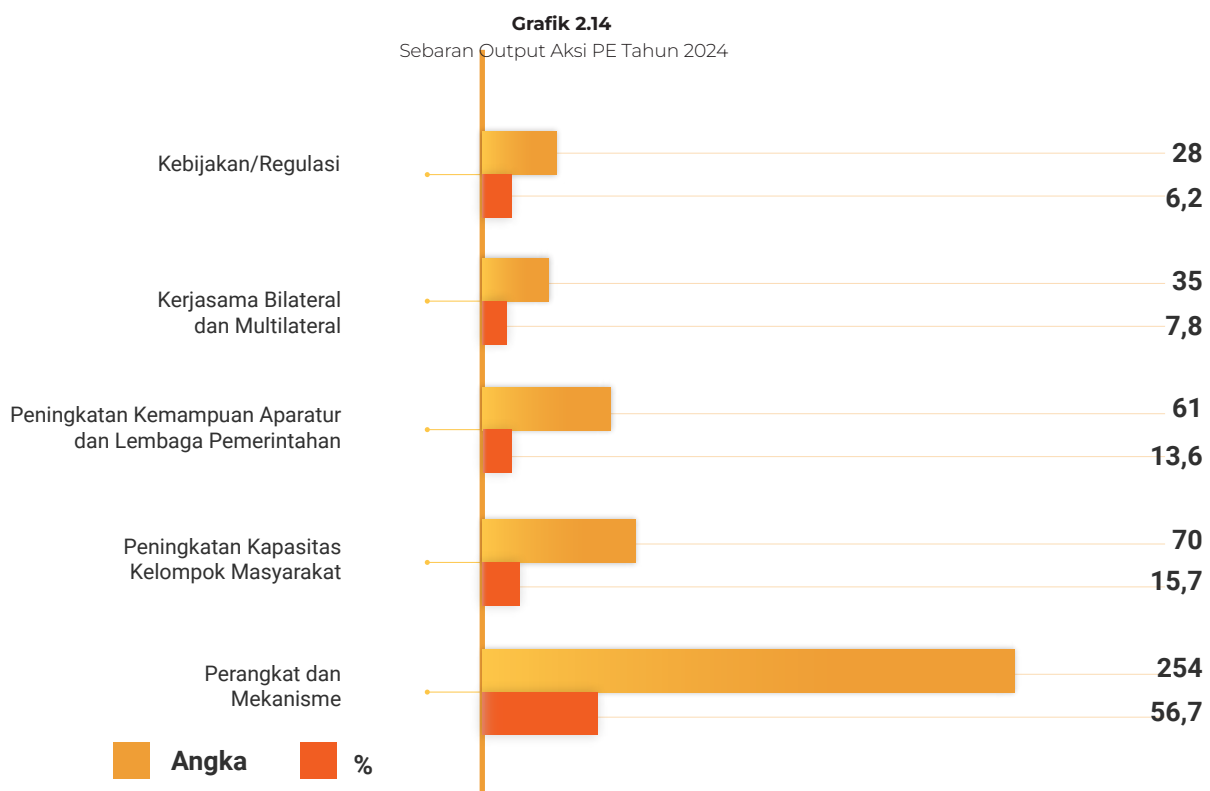
eksternal yang dihadapi, salah satunya masih kurangnya pemahaman dan urgensi dari Kementerian/Lembaga teknis untuk bersama-sama terlibat dalam pelaksanaan aksi PE dan mendorong pengesahan kebijakan yang dimaksud.

Dalam konteks *output* (luaran) dari pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 oleh Kementerian/Lembaga kebanyakan adalah *output* yang berkaitan dengan perangkat dan mekanisme, yaitu sebanyak 254 *output* (56,7%). Hal ini berkaitan dengan perangkat dan mekanisme di internal kementerian/ lembaga teknis pelaksana aksi PE di tahun 2024. Selanjutnya *output* kedua paling banyak adalah aksi PE tahun 2024 yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, yaitu sebanyak 70 *output* (15,7%) yang dilaporkan oleh Kementerian/Lembaga.

Aksi PE yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparatur dan lembaga

pemerintah dengan *output* terbanyak ketiga, yaitu 61 *output* (13,6%). Sedangkan kerja sama multilateral dan bilateral hanya sebanyak 35 *output* (7,8%) dan terakhir *output* dari aksi PE yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang terdiri dari kebijakan/regulasi teridentifikasi sebanyak 28 *output* (6,2%). Sebaran *output* aksi PE selama tahun 2024 sebagaimana amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2024 dapat dilihat grafik berikut.

Sedangkan dari sisi *outcome* (capaian) dari pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 oleh kementerian/ lembaga, dua urutan *outcome* paling banyak adalah terkait dengan instrumen sebanyak 156 *outcome* (34,8%) dan sistem pendataan serta sinergi dan pelaksanaan program sebanyak 149 *outcome* (33,3%). Tingginya kuantitas dan kualitas dua *outcome* tersebut berangkat dari kebutuhan kementerian/ lembaga dalam



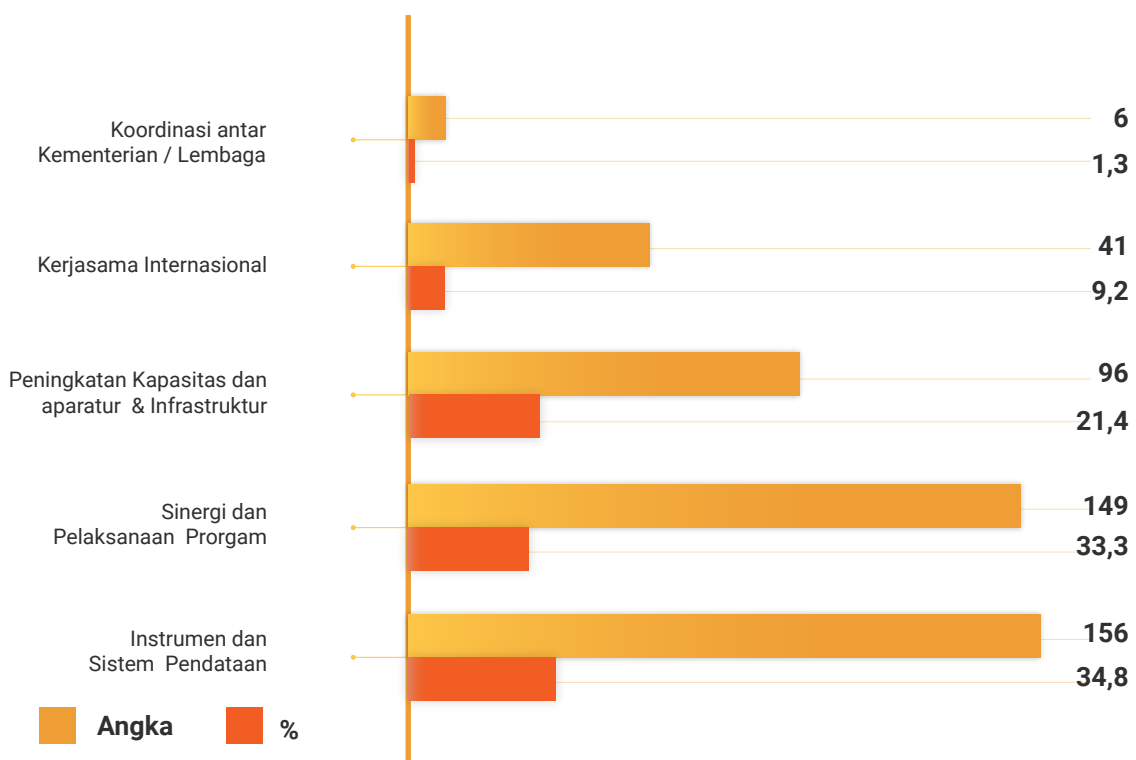
upaya melakukan pendataan dan sinergi (kolaborasi) internal K/L maupun antar K/L dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan amanat dari aksi PE di tahun 2024.

Outcome selanjutnya yang dicapai selama pelaksanaan aksi PE tahun 2024 adalah peningkatan kapasitas aparatur dan infrastruktur, yaitu sebanyak 96 *outcome* (21,4%). Disamping kebutuhan akan perlunya meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam upaya PE, khususnya sumber daya manusia, dalam proses pelaksanaan aksi PE di tahun 2024, kementerian/lembaga juga membutuhkan peningkatan infrastruktur guna menunjang kerja-kerja mereka dalam

melaksanakan aksi PE yang telah dimandatkan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Terkait dengan kerja sama internasional dalam upaya PE, tercapai sebanyak 41 *outcome* (9,2%) selama tahun 2024. Sebagaimana diketahui bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di ranah domestik (nasional Indonesia), namun juga secara internasional dan regional, dengan *leading sector*-nya Kementerian Luar Negeri dan Kedeputan Kerjasama Internasional BNPT. Di antara keberhasilan dalam advokasi di level internasional adalah diadopsinya Resolusi PBB tentang

Grafik 2.15
Sebaran Outcome Aksi PE Tahun 2024



Treatment of children associated with terrorist groups, including children who are recruited and exploited by those groups pada 23 Juli 2024 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.²⁰ Draf resolusi ini merupakan usulan dari Pemerintah Indonesia kepada the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice PBB pada Mei 2024. Sebaran *outcome* dari pelaksanaan aksi PE tahun 2024 dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Hasil dan *progress* dari pelaksanaan aksi PE sejak tahun 2020 hingga akhir Desember 2024 tidak hanya mengukur berapa banyak aksi yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan dari sisi *output* dan *outcome* yang dicapai, namun juga termasuk kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat langsung (*direct beneficiaries*) dari pelaksanaan aksi PE, termasuk selama tahun 2024.

Karena itu, di dalam laporan tahun 2024 ini juga disampaikan jumlah kelompok sasaran yang menerima manfaat langsung dari pelaksanaan aksi PE selama tahun 2024. Dari grafik berikut terlihat bahwa penerima manfaat yang paling banyak adalah masyarakat (secara umum), yaitu sebanyak 163 kelompok masyarakat. Selain itu, pada posisi kedua penerima manfaat langsung terbanyak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sebanyak 92 orang. Sama halnya dengan ASN, aparat penegak hukum, yang juga sebagai ASN menjadi penerima

manfaat terbanyak ketiga dari pelaksanaan aksi PE selama tahun 2024, yaitu sebanyak 66 orang. Selanjutnya diikuti oleh komunitas sebanyak 55 komunitas, siswa dan anak tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing 48 dan 43 orang, diikuti oleh pemuda sebanyak 41 orang dan mahasiswa 33 orang.

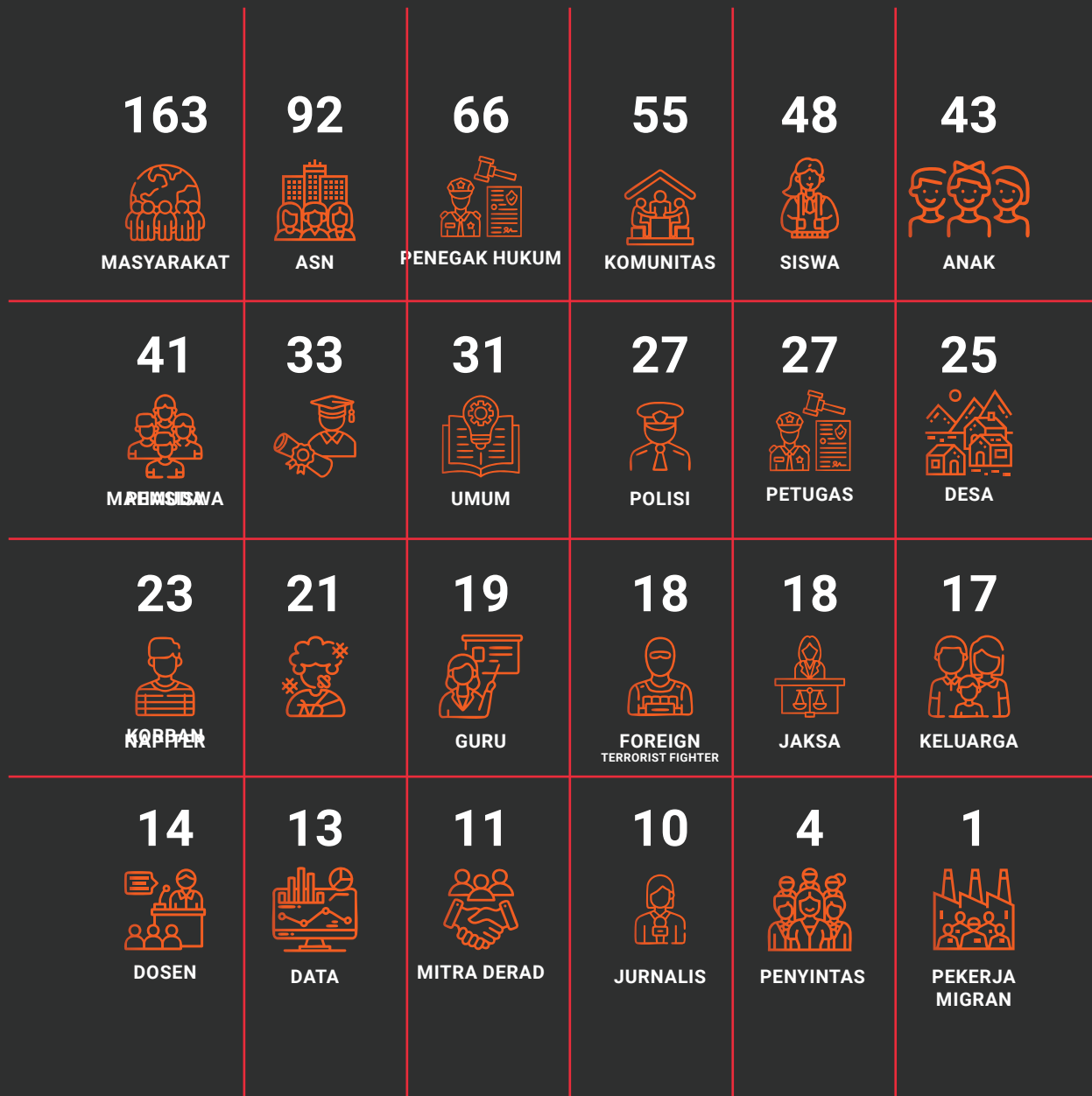
Dari Grafik 2.16 terlihat bahwa kelompok sasaran (penerima manfaat) dari serangkaian aksi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya PE yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selama tahun 2024 sangat beragam. Keberagaman tersebut memberikan gambaran dan kesimpulan kepada kita bahwa masyarakat secara umum, ASN, aparat penegak hukum, pemuda (termasuk di dalamnya kategori siswa dan mahasiswa), dan komunitas merupakan kelompok terbanyak penerima manfaat dari pelaksanaan RAN PE tahun 2024 oleh kementerian/lembaga. Hal ini selaras dengan misi RAN PE untuk mencapai tujuan bahwa negara hadir untuk memberikan dan menjamin rasa aman dan keselamatan warga negara dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Walaupun judul Perpres Nomor 7 Tahun 2021 adalah tentang RAN PE Tahun 2020-2024, namun Perpres tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden pada 6 Januari 2021 dan dalam pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2021, bukan 2020. Saat ini, tahun 2024 memasuki tahun keempat atau tahun terakhir pelaksanaan RAN PE Tahun 2020-2024. Karena itu, terkait realisasi anggaran selama 4 tahun pelaksanaan RAN PE sejak 2021 hingga 2024 disampaikan dalam penjelasan dan grafik 2.17.

²⁰ United Nations Economic and Social Council (UN-ECOSOC). "Resolution adopted by the Economic and Social Council on 23 July 2024 [on the recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (E/2024/30)]. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/229/35/pdf/n2422935.pdf>.

Grafik 2.16

Sebaran Kelompok Sasaran Pelaksanaan Aksi PE Tahun 2024



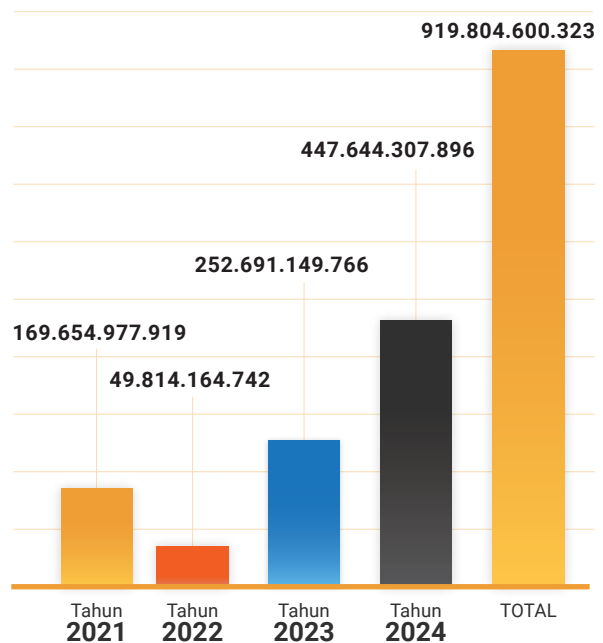
Sebagaimana uraian analisa *output* dan *outcome* di atas, dari sisi realisasi anggaran pelaksanaan RAN PE sejak awal 2021 hingga akhir 2024 berbanding lurus dengan berbagai capaian *output* dan *outcome* RAN PE. Dalam Grafik 2.17 di bawah ini, berdasarkan monitoring dan analisa data yang dilakukan Tim Kesekretariatan Sekber RAN PE dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan aksi PE selama empat tahun pelaksanaan RAN PE secara total menyentuh angka hingga Rp919,8 miliar, yang tersebar di berbagai kementerian/ lembaga pelaksana RAN PE. Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 menyerap realisasi anggaran paling banyak, yaitu Rp447,6 miliar lebih (48,7% dari total realisasi anggaran pelaksanaan aksi PE selama empat tahun, 2021-2024). Sedangkan pelaksanaan RAN PE Tahun 2022 menyerap realisasi anggaran paling sedikit, yaitu Rp49,8 miliar lebih (5,4% dari total anggaran empat tahun pelaksanaan RAN PE 2021-2024).

Realisasi anggaran pelaksanaan aksi dan kegiatan RAN PE Tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, paling utama disebabkan sebagian realisasi aksi dan kegiatan PE yang tidak terealisasi di tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, dan 2022), direalisasikan sepanjang tahun 2024, sebagai tahun terakhir pelaksanaan RAN PE Tahun 2021-2024. Karena itu, tidak mengherankan jika jumlah realisasi (serapan) anggaran pelaksanaan RAN PE Tahun 2024 lebih banyak dibanding tiga tahun sebelumnya.

Sedangkan realisasi anggaran pelaksanaan RAN PE selama tahun 2024 oleh Kementerian/Lembaga pelaksana aksi PE berjumlah total Rp447 miliar lebih. Dikarenakan aksi PE paling banyak dimandatkan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2021 berada di dalam Pilar 1, karena itu Pilar 1 merupakan pilar RAN PE yang merealisasikan anggaran pelaksanaan RAN PE tahun 2024 paling banyak dibanding Pilar 2 dan Pilar 3, yaitu Rp435,3 miliar lebih (97,2% dari total realisasi anggaran pelaksanaan aksi PE tahun 2024). Dan realisasi anggaran paling sedikit selama 4 tahun pelaksanaan RAN PE

Grafik 2.17

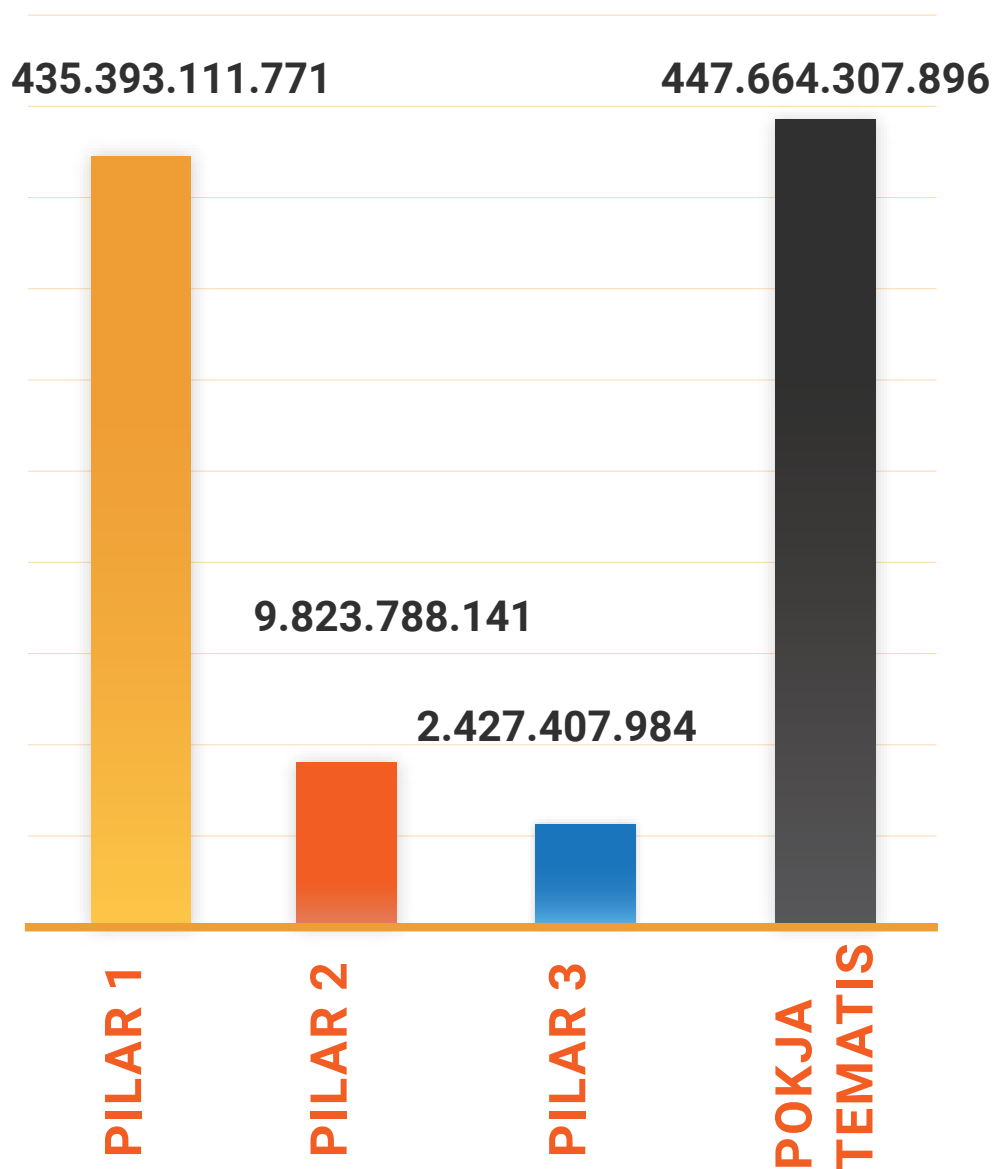
Realisasi Anggaran Pelaksanaan RAN PE Tahun 2021-2024



terdapat di Pilar 3, yaitu Rp2,4 miliar lebih (0,5% dari total realisasi anggaran pelaksanaan aksi PE tahun 2024). Selanjutnya dapat dilihat dalam tampilan Grafik 2.18 berikut.

Grafik 2.18

Realisasi Anggaran Pelaksanaan RAN PE Tahun 2024



G. CHAMPION STORY AKSI PE

Champion Story Pilar 1

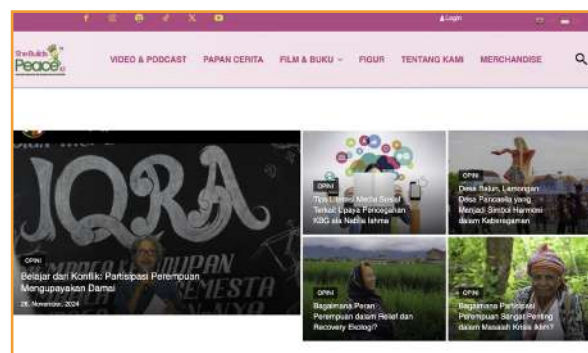
Dari hasil evaluasi evaluator independen atas implementasi RAN PE 2020-2024 terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalisasi, yaitu (1) implementasi RAN PE terkait dengan prinsip RAN PE, di antaranya pengarusutamaan gender; (2) kolaborasi antara pelaksana RAN PE baik dari K/L maupun OMS; dan (3) implementasi RAN PE di daerah. Bagian ini menyampaikan *champion story* dari tiga hal tersebut.

1. Kolaborasi KPPPA, Yayasan Empatiku, dan AMAN Indonesia

Sebagai bentuk respons positif terhadap hasil temuan evaluator independen terkait pentingnya kegiatan K/L dihubungkan dengan prinsip-prinsip RAN PE, selama tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Yayasan Empatiku dan AMAN Indonesia melaksanakan kegiatan terkait kohesi dan reintegrasi sosial dengan pendekatan pengarusutamaan gender. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pencapaian Fokus 2, yaitu peningkatan kapasitas komunitas, khususnya komunitas perempuan dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan; Fokus 3 dalam hal peningkatan partisipasi perempuan sebagai agen perdamaian untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan; dan Fokus 8 terkait deradikalisasi di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

AMAN Indonesia memiliki pengalaman di bidang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dengan pengarusutamaan gender. Cerita baik perempuan agen perdamaian dikompilasi oleh AMAN Indonesia di dalam satu laman berjudul *She Builds Peace* (<https://shebuildspeace.id/>). Sedangkan Yayasan Empatiku, dalam laporan RAN PE Tahun 2023 mengangkat kerja sama dengan WGWC dalam mendorong program ketahanan masyarakat, dengan membangun dan mengenali tanda peringatan dini ekstremisme berbasis kekerasan yang mereplikasi Program Tim Tangguh.

Gambar 2.50
Website *She Builds Peace*



Pada tahun 2024, KPPPA bersama AMAN Indonesia melaksanakan pelatihan perempuan perdamaian yang diawali dengan FGD yang dilaksanakan 13 Agustus 2024 dan melibatkan 45 peserta dari kementerian/ lembaga; lokakarya penguatan kerangka berpikir, *Women, Peace and Security* (WPS) 14-15 Agustus 2024 yang dihadiri 53 orang (15 laki-laki dan 38 perempuan) dari 23 kementerian/ lembaga dan perwakilan OMS; dan pelatihan perempuan mediator perdamaian di Tasikmalaya 12-13 September 2024, dihadiri oleh 15 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengurus pesantren dan komunitas perempuan (fasilitator RSD,²¹ perwakilan dari Sekolah Perempuan Perdamaian Cipakat, Lajnah Imaillah [Kelompok Ahmadiyah], Fatayat NU, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga [PKK], Posyandu, Perwakilan Guru PAUD, Alumni Peserta RSD Desa Sukamaju, Pusat Pembelajaran Keluarga [PUSPAGA], dan Presidium Sekolah Perempuan).

Gambar 2.51

Pelatihan Perempuan Mediator Perdamaian



Tujuan dari Pelatihan Perempuan Mediator Perdamaian adalah untuk mendapatkan gambaran secara substantif mengenai implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) yang di antaranya terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Hasil langsung dari

²¹ *Reflective Structured Dialogue* sangat erat kaitannya dengan P6: Purpose, People, Prevent (Cegah), Promosi, Plan (Rencana), dan Persiapan.

serangkaian pelatihan tersebut di berbagai wilayah di Indonesia, adalah:

- (1) Tersusunnya strategi kementerian/ lembaga dalam memperkuat dan menjaga keberlanjutan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak dalam konteks konflik sosial.
- (2) Berkumpulnya 20 perempuan mediator dari relawan SAPA dan masyarakat desa di Poso yang dilengkapi kemampuan memfasilitasi RSD (*reflective structured dialogue*) untuk penanganan konflik.
- (3) Meningkatnya kemampuan 15 perempuan relawan SAPA dan masyarakat desa di Tasikmalaya dalam memfasilitasi dialog menggunakan *tools* RSD untuk penanganan konflik.

Saat ini KPPPA tengah menyusun Panduan Perempuan Pegiat Perdamaian. Diharapkan panduan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang akan mengembangkan program sejenis di masa depan.

Selanjutnya kerja sama KPPPA dengan Yayasan Empatiku melaksanakan kegiatan terkait kohesi sosial dan penguatan Tim Tangguh di Kota Depok (yang juga ditujukan untuk mengadvokasi RAD PE di Kota Depok) dan di Kabupaten Bekasi (Kecamatan Cilodong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulya, dan Kelurahan Sukamaju).

Gambar 2.52

Kegiatan Kohesi Sosial Yayasan Empatiku



Program ini mendapat respons positif dari penerima manfaat (*beneficiaries*). Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan pembentukan Tim Tangguh Kelurahan, yang bertujuan untuk memperkuat daya tangguh dan daya tangkal masyarakat terhadap ekstremisme berbasis kekerasan serta memperkuat kohesi sosial masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan, Kelurahan juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Lurah sebagai payung hukum Tim Tangguh dalam menjalankan kegiatan di masyarakat. Selain SK Kelurahan, Tim Tangguh juga mendapatkan pelatihan selama tiga hari untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan deteksi dan penanganan dini kasus ekstremisme berbasis kekerasan.

Sebelum pelaksanaan pelatihan, Pengurus Tim Tangguh dibekali pengetahuan awal

untuk bisa memahami tujuan pembentukan Tim Tangguh, termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus. Melihat kebutuhan tersebut, kegiatan orientasi bagi Pengurus Tim Tangguh dilakukan di masing-masing kelurahan, dengan mengundang seluruh Pengurus Tim Tangguh dan dihadiri juga oleh aparat kelurahan. Pertemuan dilakukan di aula kelurahan. Dalam pertemuan orientasi dijelaskan tujuan pembentukan Tim Tangguh, latar belakang serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain Yayasan Empatiku, Fasilitasi Daerah (Fasda) BNPT juga hadir untuk memperkuat bahwa persoalan ekstremisme berbasis kekerasan memerlukan keterlibatan banyak pihak, karena itu perlu kerja sama yang baik antara Tim Tangguh, Kelurahan, BNPT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan lain-lain.

Gambar 2.53

Kegiatan Kohesi Sosial Yayasan Empatiku



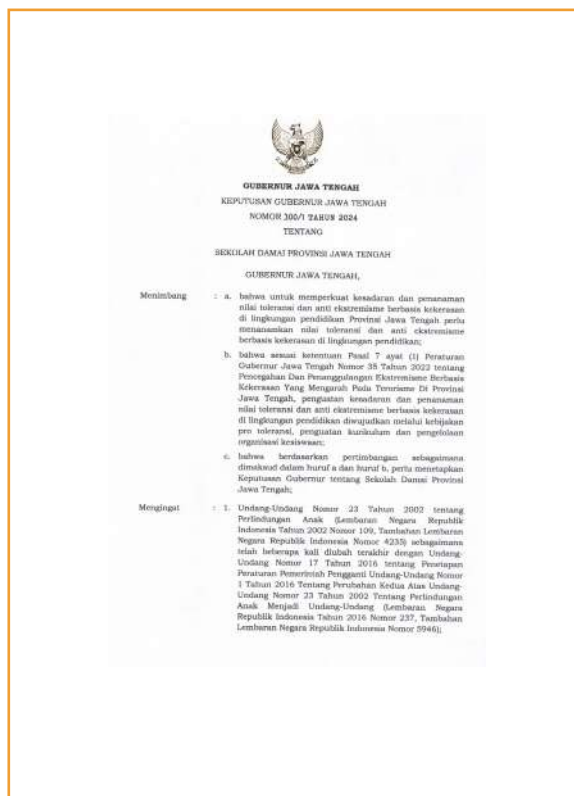
2. Implementasi RAN PE di Daerah: Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Dunia Pendidikan di Semarang

Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan sejalan dengan RAN PE Pilar 1, khususnya Fokus 2, yaitu terkait penguatan kesadaran pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan pendidikan dan Fokus 3 terkait meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Program Sekolah Damai merupakan program yang dimulai tahun 2017 oleh Wahid Foundation di beberapa sekolah di Jawa Tengah, yaitu SMAN 7, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 10, SMAN 11, dan SMAN 13. Program ini selaras dengan RAD PE Provinsi Jawa Tengah,²² RAD PE Kota Semarang yang diluncurkan Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kesenambungan program ini (*sustainability*) sangat baik karena masuk ke dalam implementasi RAD PE Jawa Tengah dan diperkuat dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1/2024 tentang Sekolah Damai Provinsi Jawa Tengah. Dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut, hingga saat ini sudah ada 79 Sekolah Damai dari SMA/SMK di seluruh Jawa Tengah.

²² Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme di Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 300/1/2024 tentang Sekolah Damai Provinsi Jawa Tengah



Sejak diluncurkan pada 2017, program Sekolah Damai Menjangkau 135 SMA dan SMK, 135 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), 180 pengurus Rohis (Rohani Islam), dan 5.750 peserta didik. Jumlah ini sudah termasuk 60 SMAN di empat provinsi, 65 Kepala Sekolah, dan 65 Guru PAI di 20 sekolah percontohan.

Terdapat tiga pilar pada Sekolah Damai: pilar kebijakan, pilar praktik toleransi dan damai, dan pilar pengelolaan organisasi kesiswaan. Ketiga pilar ini sekaligus mencirikan dan indikator sebuah sekolah disebut Sekolah Damai. Pilar kebijakan bertujuan menciptakan kebijakan strategis yang mendukung budaya damai. Pilar praktik toleransi dan perdamaian diterapkan baik di lingkungan sekolah dan di dalam kelas.

Pilar pengelolaan organisasi kesiswaan juga menjadi fokus penting dalam membangun budaya sekolah damai. Organisasi di sekolah, seperti OSIS dan Rohis serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai inklusif. Terkait pilar praktik toleransi dan damai, siswa diberikan keleluasan untuk mengekspresikan inisiatifnya menyuarakan toleransi dan damai kepada orang tua dan masyarakat dengan produk-produk yang menggambarkan aksi nyata sekolah damai. Salah satu *evidence base* implementasi Sekolah Damai di SMA 13 Semarang ditunjukkan saat kunjungan Kepala BNPT di SMA tersebut, yang juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.54

Kunjungan Kepala BNPT di SMAN 13 Kota Semarang



Dalam kunjungan tersebut, Kepala Sekolah SMAN 13 Kota Semarang, Rusmiyanto, S.Pd., M.Pd., menjelaskan mengenai implementasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui Program Sekolah Damai pada pilar praktik toleransi dan budaya damai melalui

Aksi Nyata Sekolah Damai. Kegiatan-kegiatan tersebut diunggah di situs web dan akun media sosial sekolah agar dapat digunakan untuk mengedukasi orang tua dan masyarakat.

Gambar 2.55

Aksi Nyata Sekolah Damai SMAN 13 Kota Semarang



Implementasi Sekolah Damai di SMAN 13 Kota Semarang dimulai dengan membangun kesadaran kolektif bersama, khususnya guru dan karyawan yang menjadi teladan dan agen perdamaian dalam penyebaran toleransi dan perdamaian serta anti kekerasan. Dengan kesadaran kolektif, maka kesepakatan dibangun dengan satu kesadaran di lingkungan SMAN 13 Kota Semarang sehingga tercipta toleransi dan budaya damai. Wujud dari kesepakatan ini menghasilkan kebijakan-kebijakan sekolah terkait toleransi dan perdamaian, dimasukkannya program ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, pengajaran guru, membangun komitmen sekolah dan kelas. Program ini kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga menjadi lebih terarah, sistematis, dan masif. Kepala Sekolah SMAN 13 Kota Semarang meyakini bahwa keberhasilan program terkait pluralisme kuncinya

dari kesadaran kolektif yang bergulir secara *bottom-up*. Karenanya, untuk mempertahankan keberhasilan diadakan Pokja Sekolah Damai sebagai penggerak untuk menindaklanjuti upaya toleransi dan budaya damai di lingkungan pendidikan.

Di antara praktik sederhana di SMAN 13 Kota Semarang adalah lagu-lagu identik Sekolah Damai yang dinyanyikan pada jam tertentu, baju daerah yang dikenakan pada hari Rabu/Kamis, kolaborasi antar agama dalam mendukung berlangsungnya acara keagamaan di sekolah. Kepala Sekolah juga mengidentifikasi bahwa potensi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dicegah melalui berbagai kegiatan, di antaranya beasiswa bagi siswa/siswi kurang mampu karena faktor ekonomi untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah ke dalam dan luar negeri yang diselenggarakan oleh sekolah. Begitupun dengan pekerjaan, sekolah ini mengupayakan penyaluran pekerjaan untuk siswa/siswi. Di dalam program ini SMAN 13 Kota Semarang membentuk *Talent Show* yang diunggah di situs web sekolah dan saluran YouTube. SMAN 13 Kota Semarang juga mengembangkan lagu dan mengangkat budaya nusantara melalui tarian nusantara yang selama tiga tahun berturut-turut menduduki posisi 3 besar tingkat nasional.

3. Implementasi RAN PE di Daerah melalui Desa Siap Siaga

Desa Siap Siaga adalah salah satu program yang dicanangkan oleh BNPT di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme, terorisme, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Desa Siap Siaga merupakan bagian dari upaya BNPT dalam membangun ketahanan masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Dalam membangun kesiapsiagaan diperlukan kerja sama antara perangkat Desa dan BNPT, khususnya kesiapsiagaan di tingkat desa.

Saat ini terdapat 50 Desa Siap Siaga di lima provinsi, yang setiap provinsi memiliki 10 Desa Siap Siaga, salah satunya Desa Sukorejo. Keunggulan Desa Sukorejo sebagai salah satu Desa Siap Siaga terletak pada peran aktif tokoh perempuan dalam mendukung program melalui sosialisasi ancaman terorisme. Penggerak Desa Siap Siaga terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh pemuda, perwakilan PKK/Posyandu, perwakilan RT dan RW, perwakilan pemuda, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerangka Desa Siap Siaga meliputi: (1) penyuluhan dan edukasi. Dalam hal ini BNPT bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang bahaya ekstremisme berbasis kekerasan dan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan berbasis budaya dan agama yang sesuai dengan nilai-nilai lokal; (2) pelatihan kesiapsiagaan. Masyarakat

dilatih untuk dapat mendeteksi ekstremisme berbasis kekerasan, yang melibatkan juga aparat keamanan seperti TNI dan Polri; (3) penguatan ekonomi desa. Program ini mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM untuk mengurangi kerentanan sosial akibat kemiskinan, yang sering dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis kekerasan; (4) penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan di tengah masyarakat untuk melawan narasi radikal; dan (5) peningkatan keamanan Desa melalui sistem keamanan desa, seperti sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang diintegrasikan dengan upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan.

Gambar 2.56

Kunjungan Kepala BNPT RI ke Desa Siap Siaga, Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal



Kunjungan Kepala BNPT ke Desa Sukerjo bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Desa Sukorejo yang telah berperan aktif dalam Program Desa Siap Siaga. Kunjungan juga dihadiri oleh anggota DPR RI dari Jawa Tengah dan perwakilan dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Kendal. Kehadiran perwakilan PT. PNM dapat membuka peluang usaha bagi warga desa, khususnya kelompok tani untuk mendapatkan bantuan finansial, bantuan sosial dan bantuan peningkatan intelektual. Dalam Dialog Interaktif dengan Kepala BNPT menghadirkan Ibu Kepala Desa dan para perangkat desa, termasuk Penggerak Desa Siap Siaga dan perwakilan masyarakat Desa Sukorejo, dengan berbagai masukan dan harapan yang disampaikan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Gambar 2.57

Penggerak Perempuan Desa Siap Siaga, Desa Sukorejo



Champion Story Pilar 2

Pada periode pelaksanaan aksi RAN PE Pilar 2 tahun 2024, beberapa kegiatan dapat dijadikan contoh baik pelaksanaan kolaborasi dan pencapaian *output* yang berkelanjutan serta mendorong terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, khususnya dalam memperkuat aspek penegakan hukum yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Beberapa kegiatan *champion story* yang teridentifikasi pada Pilar 2 di antaranya:

1. Kolaborasi antar kementerian/lembaga (Kemenko Polhukam, BNPT, LPSK, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama) dalam mendorong pembentukan/pengembangan Wadah Pelaporan tindak ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan mekanisme Perlindungan Saksi, Korban, dan Pelapor.

BNPT bersama Kemenkopolhukam, LPSK, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama menginisiasi pembentukan dan pengembangan wadah pelaporan saksi dan korban ekstremisme di lingkungan kampus, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

Upaya pembentukan dan pengembangan wadah pelaporan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan kampus pada dasarnya merupakan tanggung jawab LPSK. Namun dalam perkembangannya upaya

pembentukan wadah ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kemendikbudristek dan Kementerian Agama selaku penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi berbasis agama.

Melalui berbagai pertemuan intensif yang diinisiasi BNPT dan didukung oleh Kemenko Polhukam untuk memberikan pemahaman terkait tingginya potensi ancaman tindak ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang berpotensi mengarah pada terorisme, pihak-pihak terkait dapat memahami dan bersepakat untuk melakukan berbagai upaya dalam mendorong terbentuknya wadah pelaporan saksi dan korban tindak ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Atas dasar pemahaman dan kesepakatan bersama, beberapa langkah dilakukan, di antaranya:

- a. Kemendikbudristek mengkaji dan melakukan revisi kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan memasukkan isu diskriminasi dan intoleransi.
- b. Kementerian Agama mengkaji dan melakukan revisi kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama, untuk ditambahkan terkait isu ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi di lingkungan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama.

- c. LPSK melakukan upaya memperkuat pembentukan jaringan Sahabat Saksi dan Korban (SSK) dengan melibatkan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, serta mengintegrasikan wadah pelaporan tindak ekstremisme berbasis kekerasan di lingkungan perguruan tinggi ke dalam mekanisme perlindungan saksi, korban, dan pelaku di bawah koordinasi LPSK.
- d. Kemenko Polhukam mengoptimalkan peran koordinasi yang dimiliki untuk mendorong keterlibatan K/L terkait melalui surat rekomendasi Menteri untuk mendorong pembentukan wadah pelaporan saksi dan korban di lingkungan perguruan tinggi. Kemenko Polhukam juga melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi pembentukan wadah pelaporan saksi dan korban ekstremisme berbasis kekerasan dengan pihak perguruan tinggi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat untuk dijadikan contoh bagi perguruan tinggi lainnya.

Melalui berbagai kolaborasi dan koordinasi antar pihak terkait, saat ini Kemenkudikbudristek telah melakukan revisi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan diganti dengan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan menambahkan isu tindak intoleransi di lingkungan perguruan tinggi.

Gambar 2.58

Forum Diskusi Membangun Lingkungan Perguruan Tinggi Aman dari Radikalisme



2. Koordinasi dan Kolaborasi BNPT, POLRI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung dalam upaya peningkatan perlindungan penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme melalui pembentukan “Forum Komunikasi Pengamanan dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri”.

Salah satu bagian penting dari upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme adalah memastikan terpenuhinya hak perlindungan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan seluruh personel yang menangani kasus tindak pidana terorisme dari berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus terorisme merupakan bagian penting agar proses penanganan kasus tindak pidana terorisme dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan putusan yang adil tanpa ancaman, tekanan, dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Merespons kebutuhan tersebut, BNPT melakukan inisiasi pembentukan forum komunikasi aparat penegak hukum dalam rangka pengamanan dan pemberian perlindungan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri. Inisiatif ini mendapatkan respons sangat baik dari seluruh aparat penegak hukum, di antaranya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri, serta hakim-hakim pengadilan negeri yang menangani kasus tindak pidana terorisme untuk bersama-sama membentuk Forum Komunikasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus terorisme.

3. Rekonsiliasi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Terorisme

BNPT memfasilitasi rekonsiliasi antara penyintas atau korban dari tindak pidana terorisme dengan mantan pelaku tindak pidana terorisme (napiter) yang sudah mengikuti program deradikalisasi atau mitra deradikalisasi. Program rekonsiliasi dimaksudkan untuk membangun komunikasi yang damai, saling menghargai, dan memaafkan antara pelaku dan korban tindak pidana terorisme. Kegiatan rekonsiliasi pelaku dan korban terorisme dilakukan melalui silaturahmi kebangsaan antara penyintas dan mitra deradikalisasi dengan tujuan untuk memupuk ikatan persaudaraan dan memaafkan kesalahan masa lalu. Di samping itu, upaya rekonsiliasi pelaku dan korban terorisme diharapkan dapat mendukung upaya pemulihan dan penyembuhan bagi para penyintas, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan mantan pelaku tindak pidana terorisme, serta diharapkan dapat

Gambar 2.59

Forum Komunikasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus terorisme



menjadi titik balik bagi para mantan narapiditer untuk meninggalkan masa lalu kelam mereka dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi perwujudan dari komitmen negara terhadap pemulihan korban tindak pidana terorisme

sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023, yang memberikan ruang bagi korban dari tindak pidana terorisme masa lalu untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui pengajuan permohonan.

Gambar 2.60

Rekonsiliasi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Terorisme



Champion Story Pilar 3

Sepanjang tahun pelaksanaan RAN PE 2020-2024, terdapat berbagai kegiatan dan capaian yang dapat diidentifikasi sebagai praktik baik. Pada Pilar 3, kegiatan dan capaian ini dirunut secara berkesinambungan sejak RAN PE mulai dijalankan sejak tahun 2021. Jika dibagi dalam dua fokus, kegiatan dan capaian yang diidentifikasi sebagai praktik baik dibagi dalam Fokus 1 terkait Peningkatan Kapasitas Kemitraan para Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan Fokus 2 terkait Peningkatan Kerjasama Internasional pada Instrumen Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Pada ranah Peningkatan Kapasitas Kemitraan dan para Pemangku Kepentingan, terdapat beberapa praktik baik yang dilaksanakan dengan capaian yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, di antaranya inisiasi dan pemanfaatan I-KHub sebagai *platform*, proses pembentukan Forum Kemitraan Nasional (FKN), dan kolaborasi PPATK dengan BNPT dalam pencegahan pendanaan tindak pidana terorisme.

Pada 19 Oktober 2020, BNPT meluncurkan *platform* digital I-KHub yang dirancang untuk menghubungkan perencanaan dan pelaksanaan program, serta produk pengetahuan antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor, Organisasi Multilateral, OMS, dan sektor swasta. Dalam perkembangannya, I-KHub dapat menjawab

banyak permasalahan yang dipetakan pada bagian peningkatan kapasitas kemitraan dan pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan wadah kemitraan antar kementerian/lembaga dan antara kementerian/lembaga dengan Masyarakat Sipil.

Pada 2023, I-KHub dikembangkan lagi menjadi I-KHub 2.0 untuk mengakomodasi pelaporan kegiatan RAN PE dari kementerian/lembaga secara digital. Pada tahun yang sama, I-KHub juga menyelenggarakan *Donor Coordination Meeting* sebagai upaya konkret untuk mempertemukan mitra pembangunan dengan aktor negara dan program-program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Pada 2024 ini, dilakukan integrasi data profil mitra pembangunan dan program dari Bappenas melalui *donor coordination platform* ke *platform* I-KHub. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan bantuan dari berbagai lembaga, terutama bantuan teknis non-finansial terkait penanggulangan ekstremisme.

Sedangkan pada ranah peningkatan kerja sama internasional juga terdapat beberapa praktik baik yang capaiannya dapat dilihat berkesinambungan dari tahun ke tahun, di antaranya yaitu peran aktif Indonesia di berbagai lembaga internasional yang dapat mendorong terbitnya berbagai dokumen hingga terbentuknya standar dan norma internasional. Pada tahun 2024, BNPT berhasil mengupayakan Pengesahan resolusi ECOSOC mengenai Perlakuan terhadap

**Gambar 2.61**

Serah Terima Server I-KHub dari PeaceGeneration kepada BNPT di Jakarta, 10 Januari 2024
dan Donor Coordination Meeting di Jakarta, 3 Juni 2024

Anak-Anak yang Terhubung dengan Grup Teroris, termasuk anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok tersebut, berlangsung pada forum Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina, Austria, pada 17 Mei 2024. Keputusan ini menandai awal pengembangan prinsip dan pedoman penanganan anak yang terkait dengan terorisme di tingkat internasional.

Praktik baik di Pilar 3 juga dapat dilihat pada kolaborasi antar dua kementerian/ lembaga yang terlibat di Pilar 3, yaitu PPATK dan BNPT. Pada 2023, Indonesia akhirnya mendapatkan keanggotaan penuh dalam Financial Action Task Force (FATF). Status keanggotaan penuh dalam FATF ini tentunya meningkatkan peran aktif dan kredibilitas Indonesia di aras global. Capaian ini kemudian berlanjut pada 2024, di mana melalui

kolaborasi PPATK dengan BNPT, PPATK mendorong pegawai BNPT untuk berperan sebagai FATF *Lead Reviewer* dalam *immediate outcome* (IO) 10 yang berkaitan dengan pencegahan pendanaan terorisme di Nepal. Proses peninjauan ini diharapkan dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan dan menjadi acuan yang signifikan. Selain satu orang *Lead Reviewer* dari BNPT dalam isu pencegahan pendanaan terorisme, terdapat empat orang *Lead Reviewer* dari PPATK untuk isu-isu penting lainnya. Pelibatan awal lima *Lead Reviewer* dari Indonesia telah mulai dilaksanakan dalam pertemuan tertutup FATF ICRG Asia Pacific Joint Group Analysis Meeting yang dilaksanakan di Bali pada Mei 2024.

Champion Story Pokja Tematis

Membangun Kembali Kehidupan: Perspektif Perempuan pada Reintegrasi Sosial di Lamongan

Alhamdulillah. Semua orang lega melihat keluarga mitra derad, Pak Musta'in dan Bu Harmin, berjalan memasuki ruangan Aula Institute Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Paciran, Lamongan. Pagi itu, 23 November 2024, menjadi momen bersejarah bagi warga Desa Kandangsemangkon, untuk bertemu langsung dengan mitra derad secara langsung, dan melakukan rekonsiliasi. Kami menyebutnya, Konferensi Restoratif (Restorative Conference), adalah forum mempertemukan mantan pelaku, korban dan masyarakat yang peduli, untuk mendengarkan pertobatan mantan pelaku, lalu korban dan masyarakat memberikan pemaafan, dan kemudian menata komitmen bersama.

Ada dua lingkaran duduk peserta diatur. Warga desa yang menjadi saksi atas pertemuan ini duduk di lingkaran besar. Mereka mewakili berbagai macam organisasi. Di lingkaran tengah, lebih kecil, diduduki oleh sejumlah tokoh masyarakat, perempuan, pemuda dan aparat desa, yang akan bicara selama proses Konferensi Restoratif. Pak Musta'in dan Bu Harmin, mitra derad yang kembali ke Desa Kandangsemangkon, ditempatkan di lingkaran kecil, mengapit dua fasilitator yaitu Yeni (mewakili NU) dan Ella (mewakili Muhammadiyah). Pak Agus, Kepala Desa duduk disamping kiri Pak Musta'in. Secara berurutan ke kanan, ada wakil BPD, BUMDES, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat NU, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Ketua PKK, Ketua Tim Tangguh, dan sebagainya. Mereka semua telah terlibat secara aktif, selama tiga bulan terakhir mempersiapkan pembentukan Desa Tangguh di Kandangsemangkon, termasuk terlibat dalam 12 seri dialog untuk memastikan penerimaan mitra derad.

Direktur AMAN Indonesia, Ruby Kholifah, duduk di lingkaran besar dan membuka acara dengan statemen yang sejuk dan berorientasi pada rekonsiliasi. Dia beberapa kali mengingatkan forum bahwa tujuan berkumpul bukan untuk menghakimi mitra derad, tetapi membangun kebersamaan. Yang terpenting adalah memastikan setiap orang solid. Ini bukan konferensi restoratif pertama yang digagas AMAN Indonesia. Tapi deg-degan dan rasa khawatir tidak bisa dihindari.

Fasilitator membacakan sejumlah tata aturan komunikasi dalam konferensi, agar setiap orang berkomunikasi dengan sopan, tidak menghakimi, dan bicara dari hati dan pengalaman sendiri. Suara Yeni, sempat sedikit serak ketika membacakan kalimat-kalimat dalam naskah panduan fasilitator. Mungkin dia merasa terharu setelah kerja keras, akhirnya bisa duduk bersama semua pihak. Awalnya tegang, tapi kemudian semua pihak bisa rileks setelah Pak Musta'in menyampaikan perasaannya atas kesalahan yang dia lakukan, yaitu

percaya dengan propaganda ISIS dan meninggalkan keluarga ke Syria. Ini yang menyebabkan keluarganya mengalami kesulitan sampai sekarang. Dia berharap masyarakat mau memaafkan dan membantu keluarganya agar bisa kembali ke masyarakat. Setelah mendengarkan semua orang yang duduk di lingkaran kecil berbicara, fasilitator mengajak peserta yang hadir memikirkan agenda bersama untuk membangun ketangguhan, di mana semua orang terlibat, termasuk mitra derad. Komitmen ini kemudian dituliskan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh semua yang hadir. Semua orang bersalaman dan saling berpelukan. Senyum sumringah terpancar dari wajah-wajah mereka.

Cerita di atas adalah sepenggal dari perjalanan panjang proses reintegrasi di Lamongan, menggunakan pendekatan *peacebuilding*. Sebagai lembaga yang bekerja untuk penguatan perempuan dan perdamaian, AMAN Indonesia yakin bahwa kepemimpinan perempuan di akar rumput bisa menjadi kunci suksesnya reintegrasi sosial. Belajar dari kesuksesan Kota Depok, di mana kader PKK menjadi mobilisator warga desa, terlibat dalam rangkaian dialog menggunakan pendekatan RSD. AMAN Indonesia menggandeng Fatayat NU Jawa Timur dan WGWC, untuk sekali lagi menguji premis bahwa kepemimpinan perempuan kunci dari reintegrasi sosial di Desa Kandangsemangkon.

Untuk membaca konteks Desa Kandangsemangkon dan Lamongan secara umum, kami menurunkan peneliti dan mobilisator. Semua perempuan. Tim peneliti WGWC terdiri dari Debby Affianti (UMJ) dan Erin Gayatri (UGM), melakukan bacaan kerentanan sosial, budaya, ekonomi, dan radikalisme, mulai tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten. Mereka ditemani oleh perempuan mobilisator seperti Alimul, Khosiah, Reni, Mega, Ul, melakukan pendekatan *door to door* kepada sejumlah aktor kunci perempuan dan laki-laki, agar

memberikan informasi yang valid tentang seputar desanya. Tim kami juga menggandeng Bakesbangpol Kabupaten Lamongan, untuk pengayaan data dan informasi, dan menciptakan *security net*.

Bagian kedua proses adalah merencanakan pembangunan Desa Tangguh, dihadiri oleh seluruh perangkat desa, perwakilan organisasi, termasuk kelompok perempuan, untuk mendengarkan hasil asesmen tentang kerentanan dan kapasitas Desa Kandangsemangkon. Kombinasi data temuan lapangan dan data intelijen Badan Kesbangpol, berhasil menyakinkan Kepala Desa dan seluruh warga, untuk bersama-sama menjawab tantangan kembalinya mantan pendukung ISIS di kampung mereka. Proses dilanjutkan dengan pembentukan Rencana Aksi Bersama dan Pembentukan Tim Tangguh untuk mengawal program jangka panjang. Termasuk melakukan *refreshment workshop* khusus untuk Fasilitator RSD di Surabaya pada 4-5 September 2024.

Prinsip membangun ketangguhan adalah *No One Left Behind*. Itu artinya semua orang harus terlibat dalam pembangunan ketangguhan desa, termasuk mantan pendukung ISIS. Keberadaan mitra derad, menjadi

PR (pekerjaan rumah) khusus yang harus diselesaikan oleh semua orang. Kami menawarkan pendekatan dialog, dengan melibatkan warga Kandangsemangkon dalam merespons kembalinya warga yang pernah mendukung ISIS. Dalam kurun waktu tiga bulan, sejumlah pertemuan komunitas, dan 12 seri dialog dijalankan dengan mengundang 104 perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Naswiatul Aisyiah, Fatayat NU, Pemuda Muhammadiyah, Ansor NU, PKK, dan sejumlah lainnya.

Para perempuan mobilisator dan anggota Tim Tangguh, secara sabar melakukan pertemuan satu per satu setiap orang yang diundang dalam dialog. Menjelaskan mekanisme dialog *Reflective Structured Dialogue (RSD)*, dan aturan main, serta memastikan niat setiap orang hadir di dialog untuk kebaikan bersama. Para fasilitator perempuan kita juga secara intensif melakukan pertemuan dengan Bu Harmin, istri dari mitra derad, secara reguler dengan berbagai pendekatan seperti membeli kue-kue dagangan, mengupayakan BPJS, menjadi tempat curhat, dan sebagainya. Sampai akhirnya tiba, bertemu Pak Musta'in. Dibantu Kepala Desa dan sejumlah Pimpinan Muhammadiyah yang dekat dengan beliau, akhirnya beliau berkenan bertemu di dengan Tim Fasilitator dan terlibat dalam kegiatan RSD. Mas Bagus dari Badan Kesbangpol Kabupaten Lamongan ikut memastikan proses berjalan kondusif tanpa ada gangguan dari siapapun, termasuk dari sejumlah mantan napiter di sekitar Desa Kandangsemangkon. Ini yang kemudian membawa sukses Konferensi Restoratif, yang diceritakan di atas. Proses dialog

kecil dihadiri oleh keluarga mitra derad, memberikan ruang mereka bicara dari hati ke hati tentang kepergian mereka ke Syria. Ketakutan tidak diterima oleh masyarakat, dijelaskan dengan elegan oleh para fasilitator perempuan. Ini yang membuat keluarga Pak Musta'in merasa didengarkan dan diterima tanpa disalahkan.

Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari proses reintegrasi sosial di Kabupaten Lamongan, bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kepekaan khusus membaca kerentanan dan sekaligus kapasitas Desa Kandangsemangkon sekitarnya. Berbagai pendekatan atas nama kemanusiaan, dan khas perempuan diterapkan untuk menumbuhkan perasaan *welas asih*, tanggung jawab bersama sebagai warga, untuk merangkul kembali saudaranya yang pernah salah jalan. Kepemimpinan perempuan membuka cara-cara khusus, tanpa dicurigai politis, berfokus pada menunjukkan peduli dan pentingnya menjaga kehidupan bersama.

BAB III

TANTANGAN DAN HAMBATAN



POSSIBLE

A. PERIODE PERENCANAAN

Pada 2024 ini, keterlambatan dalam pengumpulan laporan dari kementerian/lembaga masih menjadi kendala yang menghambat proses analisis data dan pelaporan Sekber RAN PE. Pada periode perencanaan, masih terdapat enam kementerian/lembaga yang belum melaporkan tantangan dan hambatan pada tahap perencanaan. Penggantian PIC dari kementerian/lembaga terkait juga kerap kali menjadi kendala bagi Sekber RAN PE dalam melakukan koordinasi.

Dari keseluruhan yang melaporkan tantangan dan hambatan, faktor yang paling banyak muncul adalah terkait anggaran yaitu 28 persen. Kendala anggaran di kementerian/lembaga ini menjadi kendala yang secara rutin muncul dari tahun ke tahun, hal ini lantaran ketiadaan anggaran khusus dalam penanggulangan ekstremisme. Beberapa kementerian tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang berpotensi menyebabkan terorisme, karena belum terdapat istilah yang jelas mengenai RAN PE, terutama terkait ekstremisme berbasis kekerasan, dalam tugas, fungsi, atau rencana kerja kementerian/lembaga. Hal ini mengakibatkan kementerian/lembaga tersebut tidak dapat merencanakan program yang tepat untuk melaksanakan RAN PE sesuai dengan ketentuan Perpres No. 7/2021.

Kendala berikutnya yang muncul adalah terkait prioritas dari kementerian/lembaga terkait, yaitu sebanyak 13 persen. Hal ini patut dijadikan catatan penting lantaran pada tahun penghujung pelaksanaan RAN

PE 2020-2024 masih terdapat kementerian/lembaga yang belum menjadikan penanggulangan ekstremisme sebagai bagian dari prioritasnya. Pada pelaksanaan RAN PE selanjutnya, penting untuk memasukkan penanggulangan ekstremisme dalam RPJMN agar kementerian/lembaga dapat menjadikan penanggulangan ekstremisme sebagai bagian dari prioritas. Kendala serupa yang senada juga dilaporkan dalam diksi yang berbeda, yaitu Tupoksi kementerian/lembaga yang sulit dikaitkan dengan penanggulangan ekstremisme sebanyak 8 persen.

Kendala selanjutnya yang cukup signifikan dan patut menjadi catatan adalah terkait SDM internal sebanyak 12 persen dan koordinasi antar kementerian/lembaga sebanyak 10 persen. Baik tantangan terkait SDM maupun koordinasi ini dapat diurai salah satunya melalui optimalisasi *platform* dan forum kemitraan baik antar kementerian/lembaga maupun antar kementerian/lembaga dengan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Selain membantu dalam melancarkan koordinasi,

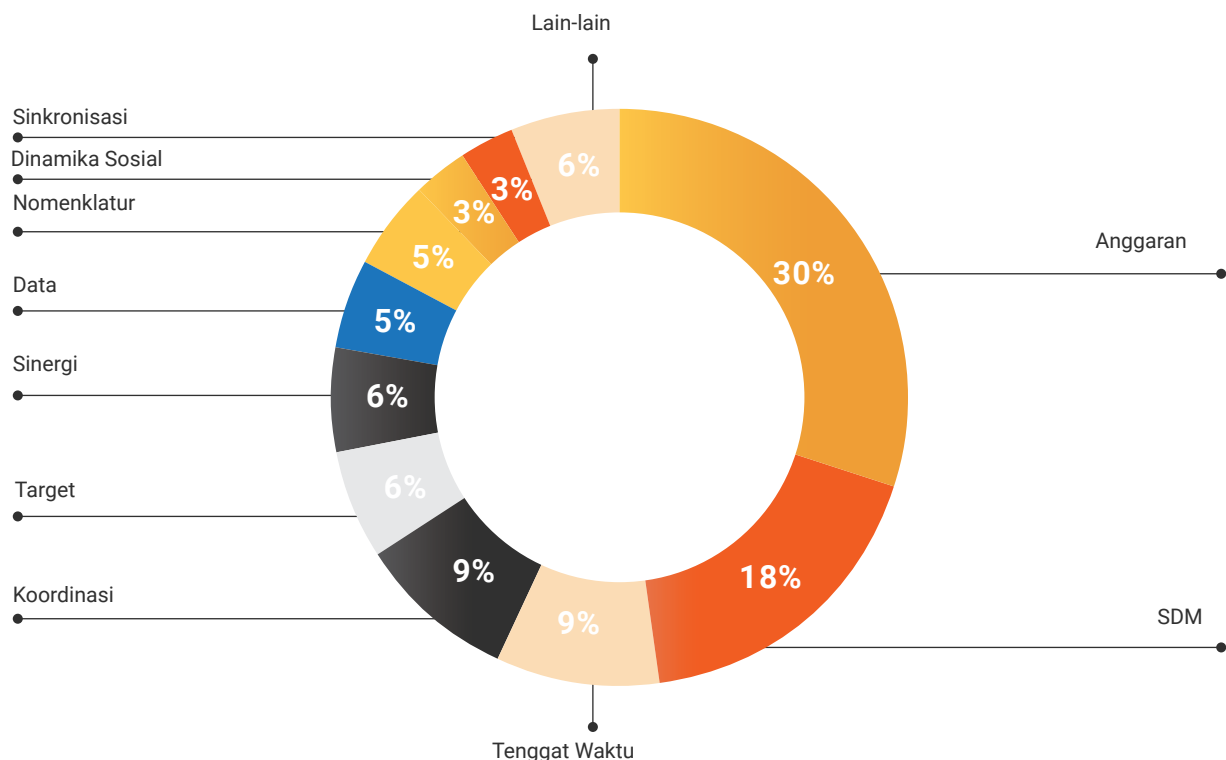
forum dan platform ini dapat menjadi ajang berbagi informasi terkait praktik baik dan menjalin kerja sama yang dapat mengatasi keterbatasan SDM di kementerian/lembaga.

Kendala lain yang juga dilaporkan yaitu terkait kebijakan sebanyak 6 persen, integrasi data 5 persen, mekanisme pemantauan dan evaluasi 5 persen, sinergi 3 persen, dinamika sosial 3 persen, dan berbagai kendala lainnya. Dari 38 kementerian/lembaga yang melaporkan tantangan dan hambatan pada periode perencanaan, terdapat tujuh kementerian/lembaga yang tidak mengalami kendala.

B. PERIODE PELAKSANAAN

Pada periode pelaksanaan, faktor anggaran kembali menjadi kendala dominan yang dihadapi kementerian/lembaga, bahkan secara persentase meningkat hingga 30 persen. Dominannya faktor anggaran baik di periode perencanaan maupun pelaksanaan ini menjadi penanda bagi urgensi anggaran tersendiri untuk program-program penanggulangan ekstremisme yang cakupannya luas dan melibatkan banyak kementerian/lembaga.

GRAFIK 3.1
Tantangan yang Dihadapi dalam Perencanaan RAN PE



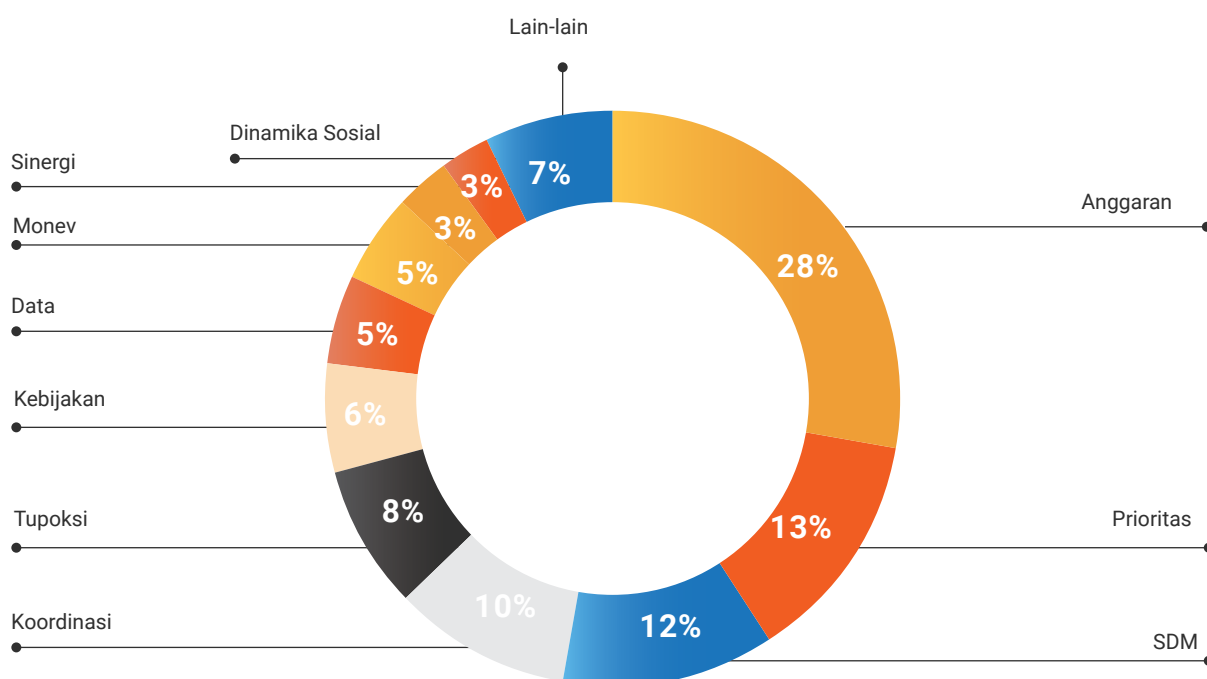
Aspek selanjutnya yang juga menjadi kendala yang banyak dihadapi kementerian/lembaga adalah aspek Sumber Daya Manusia, yaitu sebanyak 18 persen. Kendala Sumber Daya Manusia ini seringkali disebabkan tidak tersedianya awak internal kementerian/lembaga untuk menggarap agenda-agenda penanggulangan ekstremisme. Masih adanya kendala ini menunjukkan bahwa kerja-kerja peningkatan kapasitas masih dibutuhkan dalam keberlanjutan RAN PE.

Kendala paling jamak ketiga dalam periode pelaksanaan adalah terkait tenggat waktu dan koordinasi yang sama-sama pada angka 9 persen. Kendala tenggat waktu ini tidak muncul pada periode perencanaan, namun kemudian muncul sebagai salah satu kendala yang paling banyak dihadapi pada periode pelaksanaan. Hal ini dapat

diakibatkan oleh pelaksanaan Pemilihan Umum yang pada beberapa bulan dalam tahun 2024 menjadi fokus banyak kementerian/lembaga. Sedangkan kendala koordinasi yang secara konsisten muncul pada periode perencanaan dan pelaporan menandakan masih dibutuhkannya upaya-upaya untuk mengoptimalkan koordinasi.

Kendala-kendala lain yang juga dilaporkan pada periode pelaksanaan antara lain terkait target, sinergi, integrasi dan ketersediaan data, nomenklatur, dinamika sosial, sinkronisasi, dan kendala-kendala lainnya. Dari 38 kementerian/lembaga yang melaporkan, terdapat pula 10 kementerian/lembaga yang tidak mengalami kendala berarti dalam periode pelaksanaan.

GRAFIK 3.2
Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan RAN PE





BAB IV

PEMBELAJARAN DAN TINDAK LANJUT



A. PEMBELAJARAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan RAN PE tahun 2024, beberapa pembelajaran penting yang dapat dipetik (*lesson learned*) di antaranya adalah:

1

MENEMPATKAN NOMENKLATUR EKSTREMISME berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam narasi dokumen perencanaan dan sekaligus menjadi program prioritas nasional merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan bagi kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah. Hal ini bisa dipahami karena sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran kegiatan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sangat tergantung pada rujukan substansi yang tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah (RPJPN, RPJMN, dan RPJMD).

2

PERCEPATAN (AKSELERASI) pelaksanaan RAN PE di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kebijakan/regulasi di tingkat pusat yang secara jelas mencantumkan kewajiban dan/atau kewenangan daerah dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Kebijakan yang jelas dan kuat akan mempermudah daerah dalam menyusun kebijakan teknis pelaksanaan RAN PE di masing-masing daerah.

3

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) dalam pelaksanaan RAN PE menjadi bagian yang penting dan strategis dalam rangka memperkuat capaian substansi pelaksanaan aksi-aksi RAN PE, khususnya penguatan aksi pada level akar rumput. Keleluasan gerak dan pemikiran OMS dalam mengimplementasikan aksi-aksi RAN PE tanpa dibatasi sekat birokrasi, memberikan keleluasaan bagi OMS untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru yang lebih inovatif dan kreatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh sebab itu, memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan yang lebih bermakna antara pemerintah dan OMS menjadi agenda yang harus diperkuat ke depan.

B. TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

Berangkat dari capaian, tantangan, dan pembelajaran terpetik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berikut rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, yaitu:

1

MENCERMATI MENINGKATNYA TREN potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia lima tahun ke depan, maka perlu dan penting untuk mendorong penguatan dan elaborasi isu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, serta memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan aksi-aksi RAN PE oleh kementerian/lembaga terkait.

2

PERLU DILAKUKAN PENGKAJIAN lebih lanjut terhadap substansi aksi-aksi RAN PE yang belum dapat dilaksanakan dan/atau aksi-aksi yang belum sepenuhnya tercapai selama RAN PE Tahun 2020-2024 untuk dapat dilanjutkan dalam pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029.

3

DALAM RANGKA MENJAGA KONTINUITAS upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat pusat dan daerah, perlu dilakukan percepatan proses pembahasan dan pengesahan Program Penyusunan (Progsun) Perpres Tahun 2025 untuk mengakomodir Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun 2025-2029.

4

PERLU DILAKUKAN KOORDINASI intensif dalam rangka penyiapan muatan substansi RAN PE Tahun 2025-2029 dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dan mendorong partisipasi aktif Organisasi Masyarakat Sipil, Sektor Swasta, Lembaga Filantropi, Media, dan Perguruan Tinggi dalam proses penyusunan Aksi RAN PE Tahun 2025-2029.

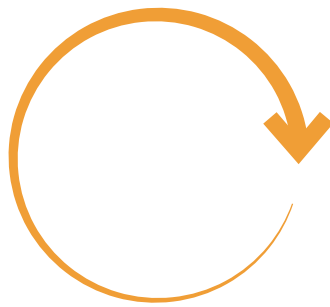
5

UNTUK MEMPERKUAT DAN MENDORONG peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai situasi dan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah, maka perlu disusun aturan/ klausul dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN PE Tahun 2025-2029 tentang kewajiban daerah dalam mengimplementasikan RAN PE dalam bentuk RAD PE.

6

DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PERENCANAAN, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan RAN PE Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penatakelolaan mekanisme koordinasi antar kementerian/ lembaga dengan melibatkan Biro Perencanaan kementerian/ lembaga terkait sebagai *leading sector* di masing-masing kementerian/ lembaga.

LAMPIRAN



PUTAR UNTUK MEMBACA LAMPIRAN

PILAR 1

FOKUS 1:

Memperkuat data pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kesiapsiagaan)

STRATEGI: Menyediakan dan mengintegrasikan data termasuk bentuk data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kerentanan serta hasil-hasil analisis terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Data dan hasil analisis yang dimaksud terkait jejaring, kasus, linimasa, wilayah prioritas, pola aksi, peta aktor, korban, penyanggah dana, pesan, faktor-faktor penarik dan pendorong, dampak, peran, posisi perempuan dan prinsip perlindungan anak, serta evaluasi penanganan kasus dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

NO	AKSI	KELUARAN	K/L	KEGIATAN	CAPAIAN
1	Mendokumentasikan data dan kajian hasil-hasil riset terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Sistem manajemen data terpadu terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan menggunakan sistem Big Data antar KIL atau instansi riset. Data dalam pusat data secara berkala akan selalu diperbarui.	- BNPT - BPS - BRIN - BSSN - Kejagung - Kemenag - Kemendagri - Komnas Perempuan - KPPPA - LPSK - PPATK	- Penyusunan kajian NPO yang masuk dalam kategori FATF, melakukan penilaian risiko dan NPO. Kajian ini juga sebagai bagian dari enhance Follow Up Report yang harus disampaikan kepada FAFT dalam rangka memitigasi defisiensi yang ada dalam Rekomendasi 8. - Penyusunan penilaian risiko sectoral tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada tindak pidana siber tahun 2024 (SRA Siber). - Kajian Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menggunakan Sarana Kripto. - PPATK telah diikutsertakan dalam penyusunan kajian Indeks	- Tersusunnya kajian/direktori NPO yang masuk dalam kategori FATF oleh PPATK bersama stakeholder terkait. - Tersusunnya penilaian risiko sectoral tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada tindak pidana siber tahun 2024 (SRA Siber). - Tersusunnya kajian Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menggunakan Sarana Kripto yang ditargetkan selesai pada Desember 2024. - PPATK diikutsertakan dalam penyusunan kajian Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR). - Terlaksananya "Diseminasi Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme yang

				Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR). • Dashboard Hasil Riset terkait Ekstrimisme. • FGD Penyusunan Roadmap Implementasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan • Forum Koordinasi Perlindungan Anak Kondisi Khusus • International Conference On Religious Moderation ICROM • Khusus Bidang Pidum telah ada aplikasi "Satu Data" yang telah diluncurkan kurang lebih sejak akhir tahun lalu. di mana dalam aplikasi "Satu data" statistic pelaku tindak pidana telah memuat fitur jenis kelamin, usia, Pendidikan, warga negara, agama dan pekerjaan • Melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk pengumpulan data dalam mendukung kegiatan pemetaan Indeks Risiko Terorisme yang dilakukan oleh BNPT (BPS). • Pembinaan Statistik Sektor kementerian/lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (BNPT) • Pengembangan Sistem Deteksi Konten • Pengumpulan data melalui zoom meeting dengan daerah-	dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 secara hybrid." . Dihadiri oleh 70 peserta luring dan 130 peserta daring dari K/L dan mitra LM. • Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektor kementerian/lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yakni BNPT • Terkumpulnya data dukung hasil kajian yang dilakukan oleh daerah terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi daerah yang telah melaksanakan RAN-PE • Tanggapan dan Rekomendasi Pemetaan kebijakan untuk Perlindungan Perempuan terkait dengan Ekstrimisme berbasis kekerasan dan terorisme • Tanggapan dan Dokumen Konsep dan Pemetaan Reparasi untuk Perempuan Korban Terorisme • Dokumen Pemetaan Advokasi dan strategi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan PE oleh NHRI, Organisasi Masyarakat Sipil • Rekomendasi Komnas Perempuan Pada Rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2025-2030
--	--	--	--	--	--

				daerah yang sudah melaksanakan RAN-PE • Penyusunan Publikasi Statistik Politik dan Keamanan • PUBLIKASI KAJIAN: Instrumen dan Konsep Reparasi untuk Korban Terorisme di Indonesia • "PUBLIKASI KAJIAN: SUARA PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN • Riset Kebijakan Ekstremisme Kekerasan dan Gender Indonesia" • PUBLIKASI KAJIAN:Peta awal kerja nhri dan gerakan sosial-gerakan perempuan dalam merespons radikalisme dan ekstremisme kekerasan: Kajian ham perempuan • Rapat koordinasi Tripartit LPSK-BNPT- Densus 88 • Updating data paham keagamaan Islam			
2	Riset dan kajian berkala dan insidental terkait isu-isu Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Hasil riset dan kajian, baik berkala maupun insidental mengenai Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• PPATK • BRIN • Kemenag • BSSN • Komnas Perempuan • BNPT • KPPPA • Kemendagri • Kejaksaan	• Penyusunan kajian NPO yang masuk dalam kategori FATF, melakukan penilaian risiko dan NPO. Kajian ini juga sebagai bagian dari enhance Follow Up Report yang harus disampaikan kepada FAPT dalam rangka memitigasi defisiensi yang ada dalam Rekomendasi 8. • Penyusunan penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	• Tersusunnya kajian/direktori NPO yang masuk dalam kategori FATF oleh PPATK bersama stakeholder terkait. • Tersusunnya penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan dan tindak pidana pendanaan terorisme pada tindak pidana siber tahun 2024 (SRA Siber). • Tersusunnya kajian Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang		

				pada tindak pidana siber tahun 2024 (SRA Siber). • Kajian Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menggunakan Sarana Kripto. • PPATK telah diikutsertakan dalam penyusunan kajian Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR). • Deradikalisasi dan Napiter di Tiga Provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan NTB). • FGD piloting sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan • Filantropi Keagamaan dan Pendanaan Terorisme oleh Non-Profit Organization Asing di Indonesia: Studi Kasus pada Kelompok Mujahidin Indonesia Timur. • Identifikasi dan pemetaan kelompok aliran paham keagamaan bermasalah • Kajian tematik ekstrimisme dan terorisme di ruang siber • Konsultasi Penajaman Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Perlindungan Pada Perempuan Dalam Isu Ekstrimisme Dan Terorisme • Kontribusi Filantropi Islam bagi Program Deradikalisasi Narapidana dan Mantan Narapidana Terorisme di Indonesia.	menggunakan Sarana Kripto yang ditargetkan selesai pada Desember 2024. • PPATK diikutsertakan dalam penyusunan kajian Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR). • Adanya masukan untuk rekomendasi komnas perempuan Untuk Perlindungan Pada Perempuan Dalam Isu Ekstrimisme Dan Terorisme • Mengetahui isu-isu terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada daerah yang telah melaksanakan RAN-PE
--	--	--	--	---	--

				- Melakukan Riset Survei Indeks Risiko Terorisme Melalui FKPT 34 Provinsi yang dilakukan BNPT. - Memberikan masukan terkait Survei Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) - Monitoring dengan daerah melalui media whatsapp terkait isu-isu yang terjadi di daerah yang telah melaksanakan RAN-PE - Seminar Kementerian Agama dengan Majelis Taklim dalam Semangat Indonesia Hebat Bersama Umat - Sosialisasi Kegiatan RAN PE di 3 Kejaksaan - Tinggi; Kejati Sumatera Selatan, Kejati - Bengkulu Dan Kejati Kalimantan Barat"		- PPATK akan menyediakan data yang dibutuhkan dalam penyusunan riset/kajian pengalaman individu (laki-laki, perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. - PPATK akan memanfaatkan data/informasi BNPT mengenai penanggulangan terhadap pelaku ekstremisme berbasis	- PPATK - Kemenag - Kemendagri - Komnas Perempuan - KPPPA - Kejagung	Hasil riset/kajian mengenai persepsi dan pengalaman individu (laki-laki, perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Riset/kajian tentang persepsi dan pengalaman individu (laki-laki, perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	3
				- Telah dilaksanakannya penelaahan kajian tentang pengalaman individu yang mengarah pada terorisme dengan melibatkan ahli yaitu Bapak Noor Huda pada 14 Oktober 2024 - Adanya masukan strategi pelaksanaan peran Komnas Perempuan pemenuhan dalam mendorong situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan pada skema Rancangan RANPE fase kedua						

				(2025-2030) serta adanya masukan strategi kolaboratif dengan kementerian/lembaga dan Masyarakat Sipil pada upaya pemenuhan situasi yang kondusif bagi HAM perempuan pada isu ekstremisme kekerasan mengarah terorisme. • Pemanfaatan data/inforasi BNPT dalam penyusunan Kajian NPO 2024 oleh PPATK
	kekerasan melalui Penyusunan Kajian NPO dan SRA Siber 2024. • PPATK telah diikutsertakan dalam penyusunan kajian Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR). • Dialog pemuda lintas paham keagamaan Islam untuk penguatan moderasi beragama • dilaksanakan daerah yang telah melaksanakan RAN-PE dan diawasi oleh KEMENDAGRI • Jambore Aktivis Remaja Masjid Indonesia (ARMI) • Konferensi Moderasi Beragama merawat kerukunan umat beragama dan perdamaian, antar Organisasi keagamaan, budaya dan Lembaga Keagamaan Internasional • Konsultasi Komnas Perempuan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2025-2030 • Memberikan masukan terkait Survei Indeks Risiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) • "Sosialisasi Kegiatan RAN PE di 3 Kejaksaan • Tinggi; Kejati Sumatera Selatan, Kejati			

				Bengkulu Dan Kejati Kalimantan Barat"	
--	--	--	--	---	--

FOKUS 2:

Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponsnya (kesiapsiagaan).

Strategi (1): Memperkuat jejaring antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas untuk pengembangan sistem deteksi dini dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat nasional dan lokal. mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penyusunan alat ukur Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat nasional dan lokal.	Terselenggaranya proses penyusunan buku pedoman terpadu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	BNPT	Pengukuran Indeks Kesadaran masyarakat melalui program desa siap siaga	Terkumpulnya data indeks kesadaran masyarakat dari 50 desa yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung, menunjukkan capaian positif dengan skor rata-rata melebihi ambang batas nasional saat ini, yaitu 2,9. Provinsi Banten dan Jawa Barat mencatat skor tertinggi sebesar 4,7, yang merupakan rata-rata dari 10 desa percontohan Siap Siaga di masing-masing provinsi. Berdasarkan skala penilaian, skor ini termasuk kategori kesiapsiagaan memadai (skala >3-6), mencerminkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan kesiapan masyarakat di wilayah tersebut.
2	Menyusun Standar Pelaksanaan Prosedur	Sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk pencegahan	- BNPT - Kemenag	Melakukan rapat secara online dengan tim FKDM	Tersusunnya SOP untuk membangun sistem deteksi dini

	untuk membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas.	Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat nasional dan lokal yang berupa hotline pengaduan dan pendampingan	• Kemendagri • Kemendes PDTT • KPPPA	daerah melalui KESBANGPOL • Penerbitan buku pedoman penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia • Penyusunan modul Community Resilience terhadap Radikalisme • Penyusunan Modul SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) • Penyusunan Panduan Desa Tangguh Budaya Sudah Dilaksanakan pada Tahun 2023 • Penyusunan SOP desa di dalam tahapan proses pembentukan desa siap siaga melalui program desa siap siaga • "Table Top Exercises (TTE) Percepatan Finalisasi Rancangan Pedoman Mekanisme • Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme (Anggaran UNODC)"	berbasis komunitas di 50 desa tersebar di 5 provinsi melalui program desa siap siaga • Terlaksananya "Table Top Exercises for Guidelines on Coordination Mechanism for Child Protection of Child Victims of Terrorism Networks" pada 20-22 Maret 2024 di Jakarta menjadi momen penting dalam penguatan perlindungan anak korban jaringan terorisme. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Kepolisian. • Terlaksananya koordinasi terkait perlindungan anak korban jaringan terorisme	
3	Pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas di sejumlah daerah yang diidentifikasi menjadi wilayah prioritas/rentan terpar.	Sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat nasional dan lokal yang berupa hotline pengaduan dan pendampingan	• BIN • BNPT • Kemenag • Kemendes PDTT • KPPPA	• Mengadakan FGD terkait wilayah/desa prioritas yang rentan terparadikalisme dan ekstremisme dengan mengundang 6 K/L yang terlibat dalam Pilar 1 Fokus 2 (BNPT, Kemendagri, PDTT,	• Relawan SAPA, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat di desa Sepe dan desa Masani (Poso) sebanyak 20 peserta dan 15 peserta di Tasikmalaya. • Teridentifikasinya penguatan partisipasi masyarakat, perangkat	

				KPPPA, Kemensos, Kemenag). • Pelatihan Perempuan Mediator Perdamaian • pembentukan desa siap siaga melalui program desa siap siaga • Piloting implementasi sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan Islam di 8 provinsi • Sosialisasi Panduan Desa Tangguh Budaya yang akan melibatkan K/L, DPMD Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional, dan Pemerintah Desa.	desa dan aparat negara didalam pencegahan dan deteksi dini ekstrimisme berbasis kekerasan di unit desa melalui program desa siap siaga di 50 desa tersebar di 5 provinsi di tahun 2024 • Terlaksananya Piloting implementasi sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan Islam di 8 provinsi • Terlaksananya sosialisasi Panduan Desa Tangguh Budaya yang akan melibatkan K/L, DPMD Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional, dan Pemerintah Desa.
--	--	--	--	--	--

Strategi (2): Memperkuat jejaring antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas untuk pengembangan sistem deteksi dini dalam pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat nasional dan lokal.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penyusunan modul di antaranya modul yang bersifat gender, dan kurikulum yang terintegrasi dalam pendidikan dan latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus Lemhannas.	Adanya modul dan kurikulum pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terintegrasi dalam Pendidikan dan Latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan	• BNPT • Kemenpan RB	• Penyusunan Modul Ajar Pelatihan kepada Aparatur Tiga Pilar (Lurah/Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa). • Telah terdapat modul pelatihan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang disusun oleh BNPT dan saat ini sudah menjadi salah satu Pelatihan pilihan pada diklat PIM oleh LAN. Kementerian PANRB sendiri berperan dalam memberikan dukungan dalam bentuk peraturan yang	• Tersusnya Modul Ajar Pelatihan kepada Aparatur Tiga Pilar (Lurah/Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa). • Tersedianya modul pelatihan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang disusun oleh BNPT dan saat ini sudah menjadi salah satu Pelatihan pilihan pada diklat PIM oleh LAN. Kementerian PANRB sendiri berperan

		kursus-kursus Lemhannas.		dapat dipedomani oleh seluruh ASN. Aksi ini jika dilihat pada perpres 7 tahun 2021 tidak menjadi target di tahun 2024.	dalam memberikan dukungan dalam bentuk peraturan yang dapat dipedomani oleh seluruh ASN. Aksi ini jika dilihat pada perpres 7 tahun 2021 tidak menjadi target di tahun 2024.
2	Pelatihan berkala bagi aparat sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah tentang Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi aparat sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	- BKN - BNPT - Kemenpan RB - KPPPA - LAN	- Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Pada Mata Pelatihan Isu kontemporer: Penanggulangan Terorisme Target: 400 - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional I dan II. Pada Kelompok Mata Pelatihan Pilihan; Target PKN tk.I: 150; Target PKN tk.II: 540 - Bimtek Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme - Penyampaian Materi & Pelatihan Perilaku Bela Negara pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS - Telah terdapat modul pelatihan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang disusun oleh BNPT dan saat ini sudah menjadi salah satu Pelatihan pilihan pada diklat PIM oleh LAN. Kementerian PANRB sendiri berperan dalam memberikan dukungan dalam bentuk peraturan yang dapat dipedomani oleh seluruh ASN. - Pada pelaksanaannya setiap tahun perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan, apakah perlu ada pembaharuan modul ajar atau kurikulum pembelajaran. Hal ini bertujuan agar bahan ajar selalu mengikuti perkembangan yang ada, sehingga pada prakteknya nanti sudah berdasarkan sumber informasi terbaru. - Telah terlaksananya kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas pemasyarakatan dalam penanganan warga binaan tindak pidana terorisme	- Terlaksananya kegiatan Latsar dengan target peserta sebanyak 1.459 orang berhasil merealisasikan kehadiran 1.173 orang. Selain itu, pelaksanaan kegiatan PKN tingkat I, II, PKA, dan PKP mencatat capaian positif dengan target 1.980 peserta dan realisasi sebanyak 1.502 peserta. - Terlaksananya kegiatan dengan tujuan utama untuk (1) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan koordinasi serta sinergi SDM di kementerian/lembaga dalam melaksanakan perlindungan anak korban jaringan terorisme, (2) Mendorong adanya kebijakan yang mendukung perlindungan tersebut, serta (3) Memastikan implementasi penyelenggaraan kebijakan terkait, telah dihadiri oleh perwakilan dari 17 kementerian/lembaga. Peserta yang hadir meliputi perwakilan dari Densus 88, Kejaksaan Agung RI, BSSN, BNPT, Kemenlu, Kemendikbudristek, LPKA Jakarta, LPSK, Kemenko Polhukam, Kemensos, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri, Bappenas, Kemenaker, Polri, dan Kemen PPPA. - Pada aspek pencapaian target, kegiatan tersebut berjalan dengan baik dengan memasukkan materi perihal bela negara yang di dalamnya mencakup penanaman ideologi Pancasila yang toleran dan bebas dari

				kepada 60 personel dari kanwil kemenkumham DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten	paham-paham ekstremisme berbasis kekerasan. - Telah terlaksananya kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas pelayan masyarakat dalam penanganan warga binaan tindak pidana terorisme kepada 60 personel dari kanwil kemenkumham DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten - Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi aparat sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah
3	Penghargaan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan aparat sipil negara (ASN) yang mendukung upaya-upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terselenggaranya sejumlah acara pemberian penghargaan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan aparat sipil negara (ASN) sebagai pelopor dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	- BKN - BNPT - Kemenpan RB	- Pelaksanaan Anugerah ASN yang telah diselenggarakan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, menjadi salah satu ajang yang diselenggarakan untuk memberikan Apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan hasil kinerja yang luar biasa dan melebihi ekspektasi. - Terdapat penyesuaian pada tahun 2022 dan kembali diselenggarakan tahun 2023 dengan mekanisme baru. Saat ini sudah masuk pada seleksi jenjang Nasional. terdapat 151 ASN yang lolos ke seleksi tingkat Nasional. - Salah satu upaya Kementerian PANRB dalam mendukung Aksi PE di atas adalah memastikan para kandidat/peserta yang lolos ke jenjang Nasional tidak terpapar paham radikal dengan bukti melampirkan surat pernyataan dari PPK/PyB bahwasannya ASN yang lolos tidak terlibat dalam organisasi Radikal.	- Penyerahan apresiasi sebagai motivasi kepada stakeholder terkait khususnya organisasi kemasyarakatan lain agar terpacu untuk berkontribusi dalam aksi RAN PE - Penyesuaian pada tahun 2022 dan kembali diselenggarakan tahun 2023 dengan mekanisme baru. Saat ini sudah masuk pada seleksi jenjang Nasional. terdapat 151 ASN yang lolos ke seleksi tingkat Nasional. - Rakor Wasdal dihadiri oleh sekitar 800 orang perwakilan dari instansi Pemerintah Pusat dan Daerah - Penyelenggaraan RAN PE Awards

				• Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa ASN tersebut terlibat dalam aktivitas radikalisme, maka ASN dan atasan yang menyatakan harus mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. • Pelaksanaan RAN PE Awards tahun 2024 • Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024	
4	Membangun sistem pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui sistem rekrutmen, seleksi sipil negara (ASN), dan pelaksanaan pengawasan.	Adanya sistem pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada sistem rekrutmen, seleksi aparatur sipil negara (ASN), dan pelaksanaan pengawasan.	• BKN • BNPT • Kemenpan RB	• Pada pelaksanaan seleksi CASN sudah dilakukan upaya pencegahan radikalisme melalui soal Tes SKD (Tes Karakteristik Pribadi) tentang radikalisme. Pada proses pendaftaran juga dilakukan profiling kepada para peserta seleksi CASN. • Aksi ini jika dilihat pada perpres 7 tahun 2021 tidak menjadi target di tahun 2024. • Pengintegrasian substansi pencegahan radikalisme kedalam tes seleksi CASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan • Penyelenggaraan seleksi CASN dengan sistem CAT • Screening anti ekstrimisme dan radikalisme pada proses seleksi SKB CPNS	• Terbentuknya rasa nasionalisme dalam upaya pencegahan radikalisme • Terselenggaranya pengintegrasian substansi pencegahan radikalisme kedalam tes seleksi CASN melalui Tes Wawasan Kebangsaan • Terselenggaranya screening pada proses seleksi CASN

Strategi (3): Meningkatkan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Menyusun modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya).	Adanya modul dan kurikulum pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terintegrasikan dalam Pendidikan dan Latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus Lemhannas.	- BNPT - Kemenag - Kemendagri - Komnas Perempuan - KPPPA	- Kunjungan komunitas Bali, Jember, dan Kuningan - melaksanakan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui kesbangpol daerah - Penyusunan buku panduan radikal terorisme di satuan pendidikan melalui program sekolah damai - Penyusunan Modul Bimtek Community Resilience untuk Penguatan Kohesi Sosial - Penyusunan Modul BIMTEK SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi KONflik) - Penyusunan Panduan Perlindungan Perempuan Penggiat Perdamaian	- Terlaksananya sosialisasi buku panduan pencegahan radikal terorisme di satuan pendidikan melalui program Sekolah Damai telah dilaksanakan di berbagai wilayah, yaitu di Sekolah Damai Banten pada 19-20 April 2024; Sekolah Damai Banyuwangi pada 15-16 April 2024; Sekolah Damai Jawa Tengah pada 20-21 Mei 2024; Sekolah Damai DKI Jakarta pada 11-12 Juni 2024; Sekolah Damai Jawa Barat pada 19-20 Juni 2024; serta Sekolah Damai Nusa Tenggara Barat pada 9-10 Oktober 2024. Program ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kapasitas pendidikan dalam mencegah paham radikal terorisme. - terwujudnya masyarakat daerah yang paham terkait pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas - Buku panduan sudah final dan sudah di diseminasi ke Jogja dan Aceh.
2	Pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas	Terselenggaranya sejumlah pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada	- BNPT - Kemenag - Komnas Perempuan - KPPPA	- Bimtek SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) angkatan IV untuk wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur - Bimtek SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) angkatan IV untuk wilayah Sumatera	- Tanggapan dan Rekomendasi Pemetaan kebijakan untuk Perlindungan Perempuan terkait dengan Ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme - Tanggapan dan Dokumen Konsep dan Pemetaan Reparasi untuk

		Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya).		• Bimtek SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) angkatan V untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan DIY • Bimtek SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) angkatan VI untuk wilayah Kalimantan • Bimtek SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) angkatan VII untuk wilayah Sulawesi • Bimtek SPARK (Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik) untuk wilayah Aceh • Kampanye Bhinneka – Bahasa Ibu Nusantara Festival Toleransi • Pelaksanaan kegiatan SMART Bangsaku, Bersatu Indonesiaku melalui FKPT bidang perempuan, remaja dan anak • Pelaksanaan Training of Trainers terhadap 450 penggerak desa melalui program desa siap siaga. • Pelatihan Perempuan Mediator Perdamaian	Perempuan Korban Terorisme (3) Dokumen Pemetaan Advokasi dan strategi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan PE oleh NHRl, Organisasi Masyarakat Sipil" • telah terlaksananya kegiatan SMART Bangsaku, Bersatu Indonesiaku melalui FKPT kegiatan bidang perempuan, remaja dan anak periode 2024 di 34 provinsi • Telah dilaksanakan pelatihan melalui kegiatan Training of Trainers terhadap 450 personel penggerak desa di 50 desa yang tersebar di 5 provinsi, yaitu Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung, melalui program Desa Siap Siaga. Peserta pelatihan terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Kades/Lurah, Babinsa TNI, Bhabinkamtibmas Polri, Pendamping Lokal Desa dari Kemendes, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat perempuan, tokoh pemuda, tokoh pemuda perempuan, serta operator penginput laporan. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan dan situasi darurat. • Relawan SAPA, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat di desa Sepe dan desa Masani (Poso) sebanyak 20 peserta dan 15 peserta di Tasikmalaya. • Terlaksananya Training of Trainers terhadap 450 penggerak desa melalui program desa siap siaga
--	--	---	--	---	---

					• Terlaksananya Pelatihan Perempuan Mediator Perdamaian
3	Pelibatan para pemimpin komunitas/ komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) sebagai narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Sejumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) terlibat sebagai narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • Kemenag • Kemendagri • Komnas Perempuan • KPPPA	• Bimbingan teknis Kohesi Sosial Perempuan Keluarga Eks Napiter di Depok dan Bekasi • Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan Pengarusutamaan Moderasi beragama • Dialog Pemuda Lintas Paham Keagamaan Islam Merajut Moderasi Beragama • Diseminasi Moderasi Beragama Lembaga Keagamaan (Kelompok Kerja Majelis Taklim) Provinsi Sultra dalam Merawat Kerukunan Umat Beragama • FGD Sinergitas kementerian/ lembaga Pengembangan Kampung Moderasi Beragama • FGD yang dilakukan oleh daerah yang telah melaksanakan RAN-PE • Konsultasi untuk Pelaksanaan Rekomendasi hasil pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme dengan Pemda Provinsi Jatim, Pemda Kota Surabaya dan Pemda Provinsi Bali • Pelaksanaan kegiatan ToT pencegahan terorisme berbasis agama dengan tema "GEMBIRA Beragama" melalui FKPT bidang agama, sosial ekonomi dan budaya • Pembinaan dan koordinasi bidang paham keagamaan Islam dan penanganan konflik • Penguatan Moderasi Beragama pada Lembaga Keagamaan	• Terlaksananya bimbingan teknis kohesi sosial perempuan keluarga Eks Napiter sejumlah 30 orang di Depok dan Bekasi • Pemimpin komunitas yang terlibat sebagai narasumber terkait sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (dilakukan oleh daerah dengan anggaran daerah) • Penjangkauan keragaman bahasa ibu nusantara kepada generasi muda • Telah terlaksananya kegiatan ToT pencegahan terorisme berbasis agama dengan tema "GEMBIRA Beragama" melalui FKPT kegiatan bidang agama, sosial ekonomi dan budaya di 34 provinsi • Terlaksananya FGD Sinergitas kementerian/ lembaga Pengembangan Kampung Moderasi Beragama • Terlaksananya Konsultasi untuk Pelaksanaan Rekomendasi hasil pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme dengan Pemda Provinsi Jatim, Pemda Kota Surabaya dan Pemda Provinsi Bali • Terlaksananya kegiatan ToT pencegahan terorisme berbasis agama dengan tema "GEMBIRA Beragama" melalui FKPT bidang agama, sosial ekonomi dan budaya

				• Seminar Kementerian Agama dengan Majelis Taklim dalam Semangat Indonesia Hebat Bersama Umat • Temu Konsultasi Pembinaan Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik di Sulawesi Selatan	• Teraksananya FGD yang dilakukan oleh daerah yang telah melaksanakan RAN-PE • Teraksananya seminar Kementerian Agama dengan Majelis Taklim dalam Semangat Indonesia Hebat Bersama Umat • Teraksananya Temu Konsultasi Pembinaan Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik di Sulawesi Selatan			• Terfasilitasinya 4 orang mantan napiter terpilih untuk mendapat alokasi kios/los pada pasar rakyat yang dibangun oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Bima, NTB • penyerahan apresiasi sebagai motivasi kepada stakeholder terkait khususnya organisasi kemasyarakatan lain agar terpacu untuk berkontribusi dalam aksi RAN PE • Teraksananya Program kampung moderasi beragama di 940 lokasi • Teraksananya RAN PE Awards 2024	• Terselenggaranya pembinaan Masjid Pelopor Moderasi Beragama di DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
4	Penghargaan bagi organisasi kemasyarakatan, termasuk dunia usaha dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Seleksi bagi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk mendapatkan penghargaan dalam pencegahan terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme	• BNPT • Kemenag • Kemendag	• Memfasilitasi 4 orang mantan napiter terpilih untuk mendapat alokasi kios/los pada pasar rakyat yang dibangun oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Bima, NTB • Program kampung moderasi beragama 940 lokasi • RAN PE Awards 2024					
5	Pelatihan pengelolaan rumah ibadah tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terselenggaranya sejumlah pelatihan bagi pengelola rumah ibadah yang melibatkan peserta terkait pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • Kemenag • Kemendag	• Pembinaan Masjid Pelopor Moderasi Beragama di DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur					

6	Pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama.	Terselenggaranya pelatihan terhadap penceramah agama terkait pandangan moderat dalam beragama.	• BNPT • BPIP • Kemenag	• Jambore kemah moderasi nasional Penyuluh Agama • Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Moderasi kerukunan Umat Beragama di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2024 • Pelatihan penguatan kompetensi bagi penceramah agama dalam mendorong moderasi beragama • Pembinaan Penyuluh Agama Islam • Pengembangan Kampung Moderasi • Pengiriman Dai ke Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)	• Terlaksananya Jambore kemah moderasi nasional Penyuluh Agama • penerbitan sertifikasi kompetensi pada 9843 penceramah periode 2020-2024 • Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Moderasi kerukunan Umat Beragama di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2024 • Terselenggaranya pelatihan penguatan kompetensi bagi penceramah agama dalam mendorong moderasi beragama • Terselenggaranya Pembinaan Penyuluh Agama Islam • Pengembangan Kampung Moderasi • Terlaksananya Pengiriman Dai ke Wilayah 3T
7	Pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi jurnalis.	Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi jurnalis	• BNPT • Dewan Pers	• Penguatan lembaga pers dan jurnalis • Workshop kepada jurnalis mengenai Peliputan Terorisme di Provinsi Jawa Timur. Workshop ini diharapkan dapat turut mendukung pencegahan kasus Ekstremisme hingga terorisme melalui pemberitaan yang sesuai pedoman.	• Kegiatan dilaksanakan pada 8 Mei 2024 di Hotel Dialoog Banyuwangi, Jl. Yos Sudarso, Lingkungan Sukowidi, Klatak, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Peserta sebanyak 46 wartawan yang berasal dari wilayah Banyuwangi.
8	Integrasi kurikulum pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan target peserta komunitas	Terintegrasinya kurikulum pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam pelatihan/ pendidikan yang diselenggarakan	• BNPT • Kemhan	• Diklat Kader Bela Negara Kementerian KOMINFO 22-26 April TA. 2024, (50 org). • Diklat Kader Bela Negara BRILift 22-24 Mei TA. 2024, (84 org).	• Terlaksananya diklat kader Bela Negara di berbagai institusi selama 2024 • Terlaksananya sosialisasi Bela Negara di berbagai wilayah selama 2024 • Telah tersusun dan terintegrasinya kurikulum pencegahan Ekstremisme

		oleh K/L dengan target peserta komunitas		• Diklat Kader Bela Negara Kemenpora 13-17 Mei 2024. (68 org) • Diklat Kader Bela Negara BRI Corpo 13-16 Mei TA. 2024, (100 org). • Diklat Kader Bela Negara Lingkungan Kerja 13-17 Mei TA. 2024, (50 org). • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup pendidikan di Manado Prov. Sulsel. • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup pendidikan di Medan Prov. Sumatra Utara • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup pendidikan di Bengkulu Prov. Bengkulu • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup pendidikan di Pontianak Prov. Kalbar • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Masyarakat di Lampung Prov. Lampung • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Masyarakat di Nunukan Prov. Kaltara • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Masyarakat di Sidrap Prov. Sulsel • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Masyarakat di Solo Prov. Jateng	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui modul pelatihan Penggerak Desa Siap Siaga
--	--	--	--	---	--

				• Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Pekerjaan di Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Pekerjaan di Pekalongan Prov. Jawa Tengah • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Pekerjaan di Banyuwangi Prov. Jatim • Sosialisasi dan Desiminasi Kesadaran Bela Negara pada lingkup Pekerjaan di Asahan Prov. Sumatra Utara. • Penyusunan modul pelatihan TOT bagi penggerak desa melalui Program desa siap siaga	
--	--	--	--	---	--

FOKUS 3:

Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi).

Strategi (1): Mengembangkan indikator keberhasilan kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Menyusun indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan.	Indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan.	• BNPT • Kejaksaan • Kemenag	• Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan Metode Survei Respon Terhadap Konten Radikal Terorisme di Media Sosial Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024	• Mendapatkan informasi rinci terkait sejauh mana respons suatu satuan pendidikan terhadap konten radikal terorisme di media sosial; • Memberikan gambaran sejauh mana potensi suatu satuan pendidikan

				• Penguatan Moderasi beragama berbasis keluarga • Sosialisasi Kegiatan RAN PE di 3 Kejaksaaan Tinggi; Kejati Sumatera Selatan, Kejati Bengkulu Dan Kejati Kalimantan Barat.	dalam merespons konten radikal terorisme di media sosial; • Menjadi bahan dasar kontra radikalisasi dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di level satuan pendidikan; • Menjadi acuan program Sekolah Damai yang ada di Subdirektorat Kontra Propaganda, sehingga kontra radikalisasi di satuan pendidikan menjadi linear; • Menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kajian kontra radikalisasi berbasis riset upaya menangkal paham radikalisme dan terorisme; • F.Memberikan rekomendasi dan acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan segenap pihak terkait lainnya dalam mengkreasi program kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan terukur.	
2	Penilaian efektivitas kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan membandingkan data awal dan data akhir	Terselenggaranya penilaian efektivitas dan keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	BNPT	Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan Metode Survei Respon Terhadap Konten Radikal Terorisme di Media Sosial Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2024	• Mendapatkan informasi rinci terkait sejauh mana respons suatu satuan pendidikan terhadap konten radikal terorisme di media sosial; • Memberikan gambaran sejauh mana potensi suatu satuan pendidikan dalam merespons konten radikal terorisme di media sosial; • Menjadi bahan dasar kontra radikalisasi dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di level satuan pendidikan; • Menjadi acuan program Sekolah Damai yang ada di Subdirektorat Kontra Propaganda, sehingga kontra	

					radikalisasi di satuan pendidikan menjadi linear; • Menyediakan referensi bagi akademisi, pakar, dan para pemerhati kajian kontra radikalisasi berbasis riset upaya menangkal paham radikalisme dan terorisme; • Memberikan rekomendasi dan acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan segenap pihak terkait lainnya dalam mengkreasi program kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan terukur."
3	Penyusunan road map komunikasi strategis dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di lingkungan K/L.	Sejumlah kegiatan peluncuran dan promosi "Daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme".	• BNPT • Kominfo	• Finalisasi Roadmap Komunikasi Strategis • Kegiatan pengumpulan data dan riset • Penyusunan awal Road Map dalam bentuk diskusi dan rapat koordinasi internal dan eksternal • Penyusunan Dokumen Roadmap dalam bentuk kegiatan Rapat • Penyusunan road map komunikasi strategis dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di lingkungan K/L. • Persamaan Persepsi terhadap penyusunan Road Map komunikasi strategis melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD)	• Telah tersusunnya dokumen Roadmap Komunikasi Strategis berkolaborasi dengan Kreasi Prasasti Perdamaian yang diluncurkan pada Desember 2024
4	Integrasi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam	Revisi P3SPS yang mengadopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	• BNPT • Kemenkominfo • KPI	• FGD Finalisasi Draf Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	• Telah disusun Draf Revisi P3SPS di mana beberapa poin hasil revisi P3SPS • Kegiatan Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) telah tercapai sesuai

	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).	Mengarah pada Terorisme		• FGD Masukan Draf Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) • FGD Masukan Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)" • FGD terkait Integrasi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) • "FGD terkait Integrasi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)" • Revisi P3SPS oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) • Seminar Masukan Draf Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Bersama Stakeholder Penyiaran"	dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan ini KPI memperoleh masukan dari kementerian/lembaga maupun masyarakat terkait penyiaran, yang salah satunya juga berkaitan dengan penanganan ekstremisme
5	Integrasi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam Pedoman Media Siber.	Mendorong adopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam Pedoman Media Siber.	BNPT	Penyusunan Draft Pedoman Media Siber	Tersusunnya draft pedoman Media Siber
6	Mendorong adopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada	Penyusunan indikator pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada	BNPT	FGD Peran Media Massa Dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme	Pencapaian sasaran kegiatan yaitu sebesar 100% yaitu sebanyak 90 orang peserta dari jurnalis media massa mainstream dan media massa keislaman.

	Terorisme dalam uji kompetensi jurnalistik.	Terorisme dalam kurikulum uji.			
--	---	--------------------------------	--	--	--

Strategi (2.1): Menambahkan materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, termasuk mengadopsi metodologi berpikir kritis dalam sistem pengajaran dan kurikulum pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, dan tinggi.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.	Adanya kurikulum pendidikan formal yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk sistem belajar-mengajar, serta kurikulum yang menstimulasi berpikir kritis pada pendidikan tingkat dasar dan menengah	- BNPT - Kemendikbud	- Kegiatan Sekolah Damai di Banten, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar, NTB - Penyusunan Model Kurikulum Operasional pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta akan dilakukannya reviu dan finalisasi Model Kurikulum Operasional pada Satuan Pendidikan (KOSP) yang mengimplementasikan pendidikan, pencegahan pemikiran dan tindakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme.	- Terlaksananya program Sekolah Damai di berbagai wilayah telah melibatkan partisipasi aktif siswa dan guru dalam upaya pencegahan paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Program ini berhasil menjangkau Banten dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Timur dengan 540 siswa dan 190 guru; Jawa Tengah dengan 500 siswa dan 100 guru; Jakarta Barat dengan 600 siswa dan 120 guru; serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 500 siswa dan 100 guru. - Tersusunnya 5 Draf Model Kurikulum Satuan Pendidikan terkait dengan Pencegahan Ekstremisme berbasis Kekerasan pada PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK di 2 lokasi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Banten
2	Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan kemampuan	Kurikulum pendidikan formal agama yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada	- BNPT - Kemendikbud	- Kampus Kebangsaan BNPT RI - Penyampaian materi sesuai dengan Kepdirjendikti No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman mata kuliah wajib pada Kurikulum pendidikan tinggi, di mana disebutkan Perguruan Tinggi	Terlaksananya program Kampus Kebangsaan oleh BNPT telah sukses dilaksanakan di berbagai universitas seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UIN Alauddin Makassar, UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Universitas Lampung

	berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan formal agama tingkat dasar, menengah, serta perguruan tinggi.	Terorisme, termasuk berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan formal agama tingkat dasar, menengah, serta perguruan tinggi.		harus menyisipkan muatan kontekstual terkait Radikalisme.	(Unila), serta Universitas Islam Negeri (UIN) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga - Kepdirjendikti No.84/E/KPT/2020 tentang Pedoman mata kuliah wajib pada Kurikulum pendidikan tinggi telah ditetapkan tanggal 19 Oktober tahun 2020.
3	Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan tinggi	Adanya kurikulum pendidikan formal yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk sistem belajar-mengajar, serta kurikulum yang menstimulasi berpikir kritis pada pendidikan tinggi.	- BNPT - BPIP	- Kegiatan Sekolah Damai di Banten, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar, NTB - Pada Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi membuat Kegiatan Sosialisasi Pancasila sebagai Benteng Pertahanan Radikalisme dan Terorisme bersama BNPT di Surabaya tanggal 18 September 2024	Terlaksananya program Sekolah Damai di berbagai wilayah telah melibatkan siswa dan guru dalam mendukung upaya pencegahan paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Program ini dilaksanakan di Banten dengan melibatkan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Timur dengan 540 siswa dan 190 guru; Jawa Tengah dengan 500 siswa dan 100 guru; Jakarta dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Barat dengan 600 siswa dan 120 guru; serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 500 siswa dan 100 guru.
4	Pelatihan Pelatih bagi guru pendidikan formal tingkat dasar dan menengah untuk materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan pelatihan mengajar dengan metode berpikir kritis.	Sejumlah guru mendapat pelatihan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan pelatihan mengajar dengan menggunakan metode berpikir kritis.	- BNPT - Kemendikbud	- Kegiatan Sekolah Damai 'Pelatihan Guru Dalam Rangka Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan Dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying' di Banten, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar, NTB - Pelatihan Pencegahan Ekstremisme bagi Guru/Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK dan Tenaga Kependidikan lainnya yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta pelatihan mengajar dengan metode berpikir kritis. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Balai Besar	Terlaksananya kegiatan Sekolah Damai bertema "Pelatihan Guru Dalam Rangka Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan Dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan, dan Bullying" telah berhasil dilaksanakan di berbagai wilayah dengan partisipasi aktif siswa dan guru. Kegiatan ini melibatkan Banten dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Timur dengan 540 siswa dan 190 guru; Jawa Tengah dengan 500 siswa dan 100 guru; Jakarta dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Barat dengan 600 siswa dan 120 guru; serta Nusa Tenggara

				Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Timur.	Barat (NTB) dengan 500 siswa dan 100 guru. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, serta membangun lingkungan yang bebas dari paham intoleransi, kekerasan, dan bullying.
5	Pelatihan Pelatih bagi dosen tentang materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan sistem belajar mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis.	Sejumlah dosen mendapat pelatihan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan pelatihan mengajar dengan metode berpikir kritis.	• BNPT • Kemendikbud	• Kampus Kebangsaan BNPT RI • Kegiatan berupa webinar pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan mengundang dosen-dosen Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, yang menyampaikan materinya akan berkoordinasi dengan BNPT.	• Terlaksananya program Kampus Kebangsaan oleh BNPT telah sukses dilaksanakan di berbagai universitas seperti Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UIN Alauddin Makassar, UIN Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten, Universitas Lampung (Unila), serta Universitas Islam Negeri (UIN) dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga • Terlaksananya Kegiatan Training of Trainer Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Perguruan Tinggi Tahun 2024 telah dilaksanakan di tiga lokasi berbeda. Kegiatan ini berlangsung pada 9-12 Juli 2024 di Jakarta/Sentul, 23-26 Juli 2024 di Jawa Timur, dan 6-9 Agustus 2024 di Jakarta.
6	Pelatihan Pelatih bagi guru, dosen agama pendidikan formal tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi terkait metode dan materi pembelajaran pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang		BNPT	Kegiatan Sekolah Damai 'Pelatihan Guru Dalam Rangka Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan Dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan dan Bullying' di Banten, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar, NTB	Terlaksananya kegiatan Sekolah Damai bertema "Pelatihan Guru Dalam Rangka Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan Dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan, dan Bullying" telah berhasil dilaksanakan di berbagai wilayah dengan partisipasi aktif siswa dan guru. Kegiatan ini melibatkan Banten dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Timur dengan 540 siswa dan 190 guru; Jawa

	Mengarah pada Terorisme dan peningkatan kemampuan berpikir kritis.				Tengah dengan 500 siswa dan 100 guru; Jakarta dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Barat dengan 600 siswa dan 120 guru; serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 500 siswa dan 100 guru. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, serta membangun lingkungan yang bebas dari paham intoleransi, kekerasan, dan bullying.
--	--	--	--	--	---

Strategi (2.2): Meninjau ulang alat-alat pembelajaran (buku, pelajaran, dan sebagainya) di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Kajian terhadap alat-alat pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Adanya hasil kajian alat-alat pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	BNPT	Kegiatan Sekolah Damai di Banten, Jatim, Jateng, Jakarta, Jabar, NTB	Terlaksananya program Sekolah Damai di berbagai wilayah telah melibatkan siswa dan guru dalam mendukung upaya pencegahan paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Program ini dilaksanakan di Banten dengan melibatkan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Timur dengan 540 siswa dan 190 guru; Jawa Tengah dengan 500 siswa dan 100 guru; Jakarta dengan 500 siswa dan 100 guru; Jawa Barat dengan 600 siswa dan 120 guru; serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 500 siswa dan 100 guru.

Strategi (3): Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan influencer media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

No	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial, serta <i>influencer</i> .	Forum koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial, serta <i>influencer</i> .	- BNPT - BSSN - Kemendagri - Kemenkominfo - Kemensos	- Edukasi Keamanan Siber kepada Pramuka - Forum Diskusi publik dengan tema toleransi di era digital melibatkan perwakilan tokoh pemuda di antaranya <i>influencer</i> di bidang agama dan kepemudaan di 3 (tiga) lokasi - Keserasian Sosial - Koordinasi berkala by online (whatsapp) dilakukan oleh daerah melalui Ormas dan tim FKDM di daerah dengan pengawasan dari Kemendagri - Rapat Koordinasi Nasional Duta Damai BNPT RI 18 Provinsi dan 2 Provinsi Duta Damai Santri dalam Rangka Pencegahan Terorisme Bulan Februari Tahun Anggaran 2024 (1 Operasi) - Silaturahmi Bersama Gugus Tugas Pemuka Agama dalam rangka Pencegahan Radikal Terorisme Tahun Anggaran 2024 - Workshop Sistem Deteksi Konten kepada OPD	- Telah dilaksanakan forum diskusi publik dengan Tema " muda toleran produktif" pada Februari, Juli, dan September 2024 di Jawa Barat dan Jawa Timur - Terlaksananya 10 Forum berkenaan dengan Keserasian sosial - Meningkatnya partisipasi dan meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan meningkatnya pemahaman - Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Duta Damai BNPT RI 18 Provinsi dan 2 Provinsi Duta Damai Santri dalam Rangka Pencegahan Terorisme Bulan Februari Tahun Anggaran 2024 (1 Operasi) - Penguatan Koordinasi dengan stakeholder dalam penggalangan mitra strategis Tokoh, Ulama, dan Ormas
2	Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet partisipasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media untuk pencegahan	Sindikasi produksi konten berbasis internet	- BNPT - BSSN - Kemenkominfo	- Majalah Bestie (Berita Edukasi Siber Sosial Terkini) - Operasi Pengaruh Informasi di ruang siber - Pemberdayaan Duta Damai Dunia Maya	Pengelolaan Website Duta Damai di 18 Provinsi & 2 Duta Damai Santri dalam Rangka Pencegahan Terorisme dengan total mitra duta damai 1200 orang. Total Sebaran pada Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube dengan produksi sebanyak 2.040 konten

	Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, massa, dan influencer di media sosial			• Produksi Konten Counter Terrorism dan Pesan Toleransi dalam bentuk Short Video, Infografis untuk disebarkan melalui akun media sosial Dit IK Polhukam (Akun Teras Negeriku)	• Terlaksananya Produksi Konten Counter Terrorism dan Pesan Toleransi dalam bentuk Short Video, Infografis untuk disebarkan melalui akun media sosial Dit IK Polhukam (Akun Teras Negeriku)
3	Kampanye kreatif dan inovatif baik daring maupun luring pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang menysasar keluarga, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri.guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri.	Adanya produk-produk inovatif kampanye daring dan luring yang menysasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • Kemenkominfo	• Diseminasi dan Koordinasi Penanggulangan Terorisme dalam rangka Perlindungan WNI di Korea Selatan • Diseminasi dan Koordinasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di Hong Kong • Diseminasi Kepada Komunitas Masyarakat Terkait Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Kepada Terorisme (Komunitas Relawan PMI dan Desa Peduli Buruh Migran) • Kegiatan Penyusunan Pengembangan Alat Ajar Modul "Cegah Terorisme, Lindungi Pekerja Migran Indonesia" kepada Komunitas Relawan PMI dan Desa Peduli Buruh Migran • Operasional Pusat Media Damai (PMD) • Produksi Konten Kreatif dan inovatif dan diseminasi informasi melalui media luar ruang (Car Branding dan Billboard) • ToT (Training of Trainer) Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme kepada Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia	• Terselenggaranya Diseminasi dan Koordinasi Penanggulangan Terorisme dalam rangka Perlindungan WNI di Korea Selatan • Terselenggaranya Diseminasi dan Koordinasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di Hong Kong • Terselenggaranya Diseminasi Kepada Komunitas Masyarakat Terkait Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Kepada Terorisme (Komunitas Relawan PMI dan Desa Peduli Buruh Migran) • Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Pengembangan Alat Ajar Modul "Cegah Terorisme, Lindungi Pekerja Migran Indonesia" kepada Komunitas Relawan PMI dan Desa Peduli Buruh Migran • Terselenggaranya Operasional Pusat Media Damai (PMD) • Dhasilkannya Konten Kreatif dan inovatif dan diseminasi informasi melalui media luar ruang (Car Branding dan Billboard) • Terselenggaranya ToT (Training of Trainer) Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme kepada Instruktur

					Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia
4	Pelatihan Pelatih bagi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Pelatih yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • KPPPA	• Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai BNPT RI • Sosialisasi melalui Kanal Perempuan dan Anak RRI Digital	• Terlaksananya regenerasi Duta Damai di Sumbar & pelatihan Duta Damai di Bali • Sosialisasi melalui Kanal Perempuan dan Anak RRI Digital salah satunya terkait isu pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme

FOKUS 4:

Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kontra radikalisasi). Strategi (1): Mengembangkan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya, dan ekonomi.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pemetaan dan kajian daerah potensial penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Hasil pemetaan dan kajian daerah-daerah potensial dalam peningkatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	BNPT	• Operasi Pengawasan Barang terkait Potensi Ancaman Terorisme di Provinsi Sumatera Utara • Operasi Pengawasan Orang terkait Potensi Ancaman Terorisme di Provinsi Sulawesi Utara	• Telah dilaksanakan satu Operasi Pengawasan Barang terkait Potensi Ancaman Terorisme di Provinsi Sumatera Utara • Telah dilaksanakan satu Operasi Pengawasan Orang terkait Potensi Ancaman Terorisme di Provinsi Sulawesi Utara

2	Pendampingan dan pengembangan "Daerah percontohan untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme" melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi.	Sejumlah daerah menjadi "Daerah percontohan peningkatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme".	• BNPT • Kemenag • Kemenkop UKM • Kemenparekraf • Kemensos	• Bimbingan Teknis Subsektor Kuliner Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung "SDM Ekonomi Kreatif, meningkatkan daya saing Creativepreneur" dengan Narasumber Ibu Mutia Datau dan Bapak Deda Yusuf pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 di Ponto Resto & Wedding, Jl. Raya Ce cinunuk No.186, Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40624, yang diikuti 75 peserta yang terdiri dari 70 pelaku kreatif dan 5 orang dari Yayasan Penyintas. • Forum Group Discussion Persiapan Bimbingan Teknis/TOT Desa Siap Siaga • Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kegiatan dalam penyuluhan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. • Kesorasian Sosial • Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ TOT Pembentukan Desa Siap Siaga • Program kampung moderasi beragama 940 lokasi • Sosialisasi Awal Program Desa Siap Siaga 2024	• Menetapkan Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Siap Siaga akan dilakukan kepada 90 orang per provinsi Penggerak Desa dengan seminar pemaparan • Bimbingan teknis yang diberikan berupa edukasi materi sosialisasi maupun panduan pembentukan Desa Siap Siaga. • Sosialisasi Awal Program Desa Siap Siaga 2024 berupa 1. Penyamaan Persepsi tentang Pembentukan Desa Siap Siaga. 2. Pengenalan materi Pembentukan Desa Siap Siaga. 3. Pembuatan grup koordinasi seluruh Penggerak Desa. 4. Penetapan Penggerak Desa Siap Siaga masing-masing desa.	• Tergeraknya desa untuk menyusun beberapa SOP Desa Siap Siaga • Kelompok Usaha Mikro Unggulan mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha. Dilaksanakan dengan realisasi volume sebanyak 30 pelaku usaha.
3	Peluncuran dan promosi "Daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme" melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi.	Sejumlah kegiatan peluncuran promosi "Daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme".	• BNPT • Kemenag • Kemenkop UKM	• Bimtek Community Resilience dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Keagamaan • Pembentukan Desa Siap siaga secara Mandiri • Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro di Sektor Prioritas	• Tergeraknya desa untuk menyusun beberapa SOP Desa Siap Siaga • Kelompok Usaha Mikro Unggulan mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha. Dilaksanakan dengan realisasi volume sebanyak 30 pelaku usaha.	

Strategi (2): Meningkatkan efektivitas pemolisian masyarakat dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme.	Sejumlah peserta terlibat dalam pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • POLRI	• Operasi Pelatihan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila yang Mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan kekerasan yang mengarah pada terorisme. • Sudah dikoordinasikan secara internal, tidak ada kegiatan yang bersangkutan	Terselenggaranya 170 kegiatan
2	Sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Terselenggaranya sejumlah sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat terkait upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • POLRI	• "Sosialisasi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme." • Sudah dikoordinasikan secara internal, tidak ada kegiatan yang bersangkutan	Terselenggaranya 170 kegiatan

Strategi (3.1): Memperbanyak ruang partisipasi publik yang diisi oleh pemuda upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pelatihan Menyelenggarakan acara kepemudaan tingkat nasional tahunan berisi tema-tema toleransi, tanah air, pengenalan tentang pencegahan	Partisipasi aktif pemuda dalam acara kepemudaan tingkat nasional dalam rangka pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	• BNPT • Kemenpora	• Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan Program Kegiatan RAN PE dikemas dalam bentuk Program Kegiatan PKPBN 2024 dengan Materi Diklat Pembinaan Kesadaran Bela Negara Lingkup Pelajar/ Mahasiswa dengan Bidang Studi 1) Dasar, 2) Bidang	• Program Pelatihan Kader Pemuda Bela Negara (PKPBN) dengan target 3.600 peserta dari unsur mahasiswa aktif berusia 19-23 tahun berhasil direalisasikan melalui proses seleksi yang meliputi tiga kategori: seleksi nasional untuk organisasi

	Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Mengarah pada Terorisme.		Studi Inti dan 3) Bidang Studi Pendukung yang mana salah satu muatan Bidang dasar adalah Bahaya Terorisme dan Radikalisme serta penanggulangannya dgn Bobot Materi 30 %, klasifikasi pembelajaran Bela Negara Non fisik dan Fisik , untuk Bidang Dasar 1). Free Test, 2) Building Learning Commitment, 3). Kepemimpinan, 4).Pengantar Bela Negara, 5) Lingkungan Strategis,6).Nilai dasar Bela Negara, 7) Sistem Pertahanan Semesta, 8). Pengetahuan Bahaya Terorisme dan Radikalisme, 9) Konsensus dasar Bangsa, 10).Kewaspadaan Dini, 11) Ideologi Pancasila dan 12). Kegiatan Outdoor. Rapat Kerja Teknis Nasional Duta Damai BNPT RI	kepemudaan dan kemahasiswaan di Jakarta, seleksi provinsi untuk mahasiswa dari kabupaten/kota, dan pengumuman seleksi yang mencakup tes CAT, kebugaran mandiri (lari), serta materi seleksi nasional. Dari proses tersebut, terpilih 100 peserta yang mengikuti pelatihan non-fisik selama tiga hari di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dilanjutkan dengan pelatihan fisik di Diklat Bela Negara Ditjen Potan Rumpin Bogor selama tujuh hari dengan materi standar bela negara, termasuk materi terorisme dan radikalisme. Pasca pelatihan, para kader melakukan Bakti Pemuda Bela Negara di Raskasbitung, diikuti dengan pembentukan organisasi Ikatan Alumni (IA) PKPBN bernama FORUM PKPBN yang beranggotakan 100 alumni, bertujuan menyosialisasikan bela negara bekerja sama dengan Dispora daerah dengan fokus pada materi dasar terorisme dan radikalisme. Salah satu capaian yang telah dilakukan adalah kegiatan sosialisasi oleh alumni melalui Duta Siswa dengan 2.500 peserta (500 melalui Zoom dan 2.000 melalui YouTube). Selain itu, alumni PKPBN Sumatera Selatan menjadi penggerak kegiatan bela negara bagi anggota Pramuka se-Provinsi Sumatera Selatan. Pencapaian sasaran kegiatan yaitu sebesar 100% yaitu sebanyak 105 orang yang tergabung dalam FKPT, Duta Damai dan Duta Damai Santri.
2	Program fasilitasi kampanye kreatif	Adanya sejumlah kampanye kreatif	BNPT	Pemberdayaan Duta Damai Dunia Maya	Pengelolaan Website Duta Damai di 18 Provinsi & 2 Duta Damai Santri

pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme di kalangan pemuda.	pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang diproduksi oleh kalangan pemuda.		dalam Rangka Pencegahan Terorisme dengan total mitra duta damai 1200 orang. Total Sebaran pada Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube dengan produksi sebanyak 2.040 konten
---	---	--	---

Strategi (3.2): Meningkatkan kapasitas pemuda sebagai aktor penyebar nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pembuatan modul pelatihan yang mencakup topik "internet ramah" materi kontra narasi terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme untuk pemuda.	Adanya modul dan kurikulum pelatihan "internet ramah" bagi kalangan pemuda untuk mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	Kemenkominfo	Modul Internet Ramah diakomodir dalam 4 Modul Literasi Digital (Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, Cakap Bermedia Digital)	Program telah dilaksanakan dengan menggunakan modul yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam berbagai aspek digital, meskipun tidak terdapat materi khusus yang terkait dengan pencegahan terorisme. Modul yang digunakan meliputi Modul Kecakapan Digital, Modul Keamanan Digital, Modul Beretika Digital, Modul Budaya Digital, serta sebuah Executive Summary Modul sebagai ringkasan eksekutif untuk memberikan panduan strategis dalam implementasi program.
2	Forum pemuda tingkat nasional yang berisi tentang berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme untuk pemuda.	Jumlah peserta terlibat aktif dalam forum pemuda tingkat nasional berisi berbagai pengalaman dan strategi bersama mengatasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada	BNPT	Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Penyelenggaraan pemilihan Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

		Terorisme untuk pemuda.			
--	--	-------------------------	--	--	--

FOKUS 5:

Meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kesiapsiagaan)

Strategi (1): Menyediakan data-data terintegrasi mengenai objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Menyusun basis data tentang objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Basis data yang terintegrasi mengenai objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan untuk mengantisipasi ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	• BNPT • BSSN • KemenBUMN • Kemenhub • Kemenperin • Kemhan • TNI	• telah dibangun sistem database bandara sebagai objek vital transportasi di website kemenhub dan data dapat diakses • Kajian tematik ekstremisme dan terorisme di ruang siber • Kebandarudaraan dan wilayah kerjanya merupakan objek vital transportasi, oleh karena itu DJPU telah menetapkan bandara adalah pusat penyebaran dan ruang udara yang dikendalikan dan perangkat navigasi sesuai KM 72 tahun 2004 dan PM 39 tahun 2019 • Pemenuhan manage service perangkat cctv dan visitor management system yang terintegrasi dan aman • "Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri. Target pada tahun 2024 sebanyak penambahan 15 (lima belas) perusahaan industri menjadi OVNI."	• Keamanan Gedung Kementerian BUMN • Seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai dengan rencana

				• Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam rangka penangkalan Radikalisme • Rakor dan Penyusunan Kirkadek dan Kircam sepanjang tahun 2024.)	
--	--	--	--	---	--

Strategi (2): Mengoptimalkan sistem pengamanan dan deteksi dini terhadap ancaman objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pengembangan sistem pengamanan objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan termasuk pusat-pusat bisnis berdasarkan evaluasi.	Adanya sistem pengamanan objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan yang sudah dikembangkan dan dievaluasi.	• BNPT • KemenBUMN • Kemenhub • Kemhan • TNI	• Asesmen sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 yang dilaksanakan pada objek vital yang strategis dan fasilitas publik. pada tahun 2024 direncanakan 12 lokasi Objek Vital yang strategis dan 15 lokasi fasilitas publik yang akan dilaksanakan asesmen sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020." • Ditjen Hubud telah memiliki Program Keamanan Penerbangan Nasional dalam Kepmenhub KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional " • Ditjen Hubud telah memiliki Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional dalam Kemenhub PM 92 tahun 2015 • Ditjen Hubud telah memiliki Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional dalam Kemenhub PM 28 tahun 2021 • Program Nasional sebagaimana butir a, b, dan c selalu di update dan di	• Semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target. • Basis data yang terintegrasi mengenai objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan untuk mengantisipasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. • SOP yang efektif

				review mengacu pada peraturan internasional (ICAO Annex 17-Security) • Masing-masing operator memiliki Program Keamanan Penerbangan dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan pada sektor transportasi udara • Operator penerbangan melaksanakan langkah-langkah keamanan sebagaimana diatur didalam program keamanan masing-masing • Sudah dilakukan sosialisasi dan implementasi terhadap regulasi ini 100% terhadap seluruh operator penerbangan (BUBU< UPBU, RA, KC, BUAU, PAUA, Airnav) dan peraturan pelaksanaan dibawahnya juga sudah disusun • Dimasing-masing operator juga memiliki program keamanan, program pengawasan dan program diklat terkait dengan keamanan. • Untuk koordinasi dan komunikasi secara nasional terkait RAN PE terdapat Komite Nasional Keamanan Penerbangan, di mana Dirjen Hubud sebagai Ketua dan BNPT juga sebagai salah satu anggotanya diantara para perwakilan K/L terkait. dan operator bandara ada (UPBU/BUBU) terdapat Komite Keamanan Bandar Udara di mana kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai Pembina dan kepala bandara/EGM/GM sebagai ketua nya. KNKP dan KKBU dilakukan minimal 3 kali/tahun • Dilaksanakan rapat komfaldas dan komfal bandara masing-masing dilaksanakan minimal 3 kali/tahun
--	--	--	--	---

				- Menyusun basis data tentang objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. - Pemasangan CCTV di wilayah objek vital - Penguatan Sistem Keamanan Gedung, Masjid BUMN, (SOP, CCTV, Personil, dan Mekanisme) - Sinkronisasi peraturan-peraturan sistem pengamanan yang dimiliki oleh masing-masing K/L untuk optimalisasi pengembangan sistem pengamanan objek vital, transportasi infrastruktur, informasi strategis dan lingkungan Publik.	
2	Evaluasi secara berkala sistem pengamanan dan deteksi ancaman.	Adanya penilaian sistem keamanan yang sudah dibuat.	- BNPT - BSSN - KemenBUMN - Kemendagri - Kemenhub - Kemhan - TNI	- Setiap operator penerbangan telah menyusun program pengawasan keamanan operator penerbangan yang dalam penyusunannya mengacu pada program pengawasan keamanan penerbangan nasional; - Ditjen Hubud melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan berkala (audit, pengujian/testing dan inspeksi) terhadap pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan pada operator penerbangan. Pengawasan dilaksanakan oleh inspektur keamanan penerbangan di Direktorat Keamanan Penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara dan pengawas internal operator. - Operator penerbangan menyusun dokumen penilaian risiko terhadap ancaman /serangan dipenerbangan dengan 14 metode serangan termasuk	- Laporan Hasil Evaluasi Sistem Keamanan Gedung Kementerian BUMN - Dapat mengetahui isu-isu di daerah yang sedang terjadi yang berkaitan dengan ancaman terorisme - Adanya penilaian sistem keamanan yang sudah dibuat.

			serangan dengan pelaku terorisme /ekstrimisme. • Pelaksanaan pemeriksaan latar belakang (background check) sumber daya penerbangan. • Audit keamanan dari ICAO, TSA, Join Audit Australia dan negara sahabat lainnya. • Terdapat inspektur keamanan penerbangan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) Orang. Masing-masing operator memiliki internal inspektur kampen. Jumlah dan kompetensinya cukup. • Peningkatan kompetensi Inspektur Keamanan Penerbangan; • Pemenuhan Fasilitas keamanan penerbangan yang comply terhadap regulasi standar (jumlah, spesifikasi dan teknologi); • Pengawasan berupa audit, survey, inspeksi dan test; • Penilaian ancaman yang outputnya saat itu juga menghasilkan level hijau, kuning dan merah, kemudian melakukan penilaian risiko keamanan secara berkala terhadap 14 metode serangan termasuk terorisme. • Setiap tahun kita juga menetapkan RCS / PKRK secara nasional di mana kita menetapkan level-level risiko terhadap 14 (empat belas) metode serangan di penerbangan secara nasional. Serangan-serangan memang berubah ke serangan dengan terorisme /hacker dari serangan tradisional ke serangan dengan menggunakan metode RPAS/UAV/Drone dan serangan siber.
--	--	--	--

				Orang yang diperlengkapi bom rakitan tetap menjadi konsen kami melakukan mitigasi dan upaya keamanan. Secara simultan juga operator kami juga melakukan penilaian risiko keamanan yang selanjutnya kami lakukan evaluasi, Analisa dan validasi serta kami tetapkan level risiko keamanannya. • Asesmen sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 yang dilaksanakan pada objektif vital yang strategis dan fasilitas publik. pada tahun 2024, rencana ada 5 objek yang akan dilaksanakan audit sistem pengamanan berdasarkan penilaian yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya di objek vital yang strategis • Evaluasi Bulanan Sistem Keamanan Gedung Kementerian BUMN • Evaluasi terhadap Kesbangpol Daerah terkait kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah melalui Tim FKDM daerah • Kegiatan evaluasi berkala sistem pengamanan dan deteksi ancaman • Monitoring dan Evaluasi • Workshop Sistem Deteksi Konten			• Sub Direktorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi serta Sub Direktorat Pengamanan Lingkungan telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti JCLEC dan pelatihan lain. Pada tahun 2024 BNPT telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun
3	Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara sistem pengamanan.	Meningkatnya kemampuan petugas keamanan	• BNPT • BSSN • KemenBUMN • Kemendagri • Kemenhub • Kemhan	• Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam rangka Penangkalan Radikalisme di Jawa Timur • Setiap operator penerbangan telah menyusun program pendidikan dan pelatihan keamanan operator penerbangan yang dalam penusunannya program pendidikan			

		• TNI	dan pelatihan keamanan penerbangan nasional; • Ditjen Hubud mengesahkan penyusunan program yang disusun oleh operator penerbangan; • Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam rangka Penangkaln Radikalisme di Jawa Tengah • Dilaksanakannya pembinaan sumber daya penerbangan dalam bentuk pelatihan initial dan recurrent. • Dilaksanakannya pembinaan dalam bentuk kepedulian keamanan dan keselamatan penerbangan; • Kegiatan terhadap pembinaan SDM dilakukan lembaga diklat sebanyak 76 lemdik tersertifikasi dengan instruktur sebanyak 272 Orang dengan rincian instruktur basic sebanyak 123, junior 46 dan senior sebanyak 103 orang; konsen terkait dengan keamanan penerbangan. • Joint training dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional (AS (TSA, CISA), UK, AUS, ICAO, IATA dll); • Total Avsec sebanyak 27.135 orang yang terdiri dari Basic 17.683, junior 7140, dan senior 2312 orang • Security Culture 2021 (aviation security is everyone responsibility, mendapat respons positif dan ICAO sangat apresiasi), dari level yang paling rendah sampai dengan level tertinggi. Budaya melaporkan secara berjenjang. See something say something. Kampanye-kampanye keamanan dan keselamatan masih dilakukan secara berkala.	Standar Kompetensi Kerja Khusus, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Auditor Sistem Pengamanan agar tersertifikasi. Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan BNSP untuk pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Diharapkan kedepan dengan adanya LSP BNPT dapat membantu menetapkan standar kompetensi yang jelas untuk profesi Auditor Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, selain itu juga memastikan bahwa individu memiliki kualifikasi yang diakui. • Pelatihan rutin Petugas Keamanan setiap bulan s.d. Oktober 2024 • Seluruh Petugas Keamanan KBUMN telah bersertifikasi gada pertama • Upaya untuk meningkatkan kemampuan petugas keamanan. • Meningkatkan kualitas SDM pada bidang deteksi dini.
--	--	---	--	---

			• Aviation Cyber Security Culture 2023 bekerja sama dengan BSSN • Background check dilakukan terhadap semua orang yang bekerja di penerbangan melalui persetujuan pas bandara. Selain SKCK juga informasi intelijen lainnya termasuk ke depan melalui juga media sosial analisis. Sistem pengajuan pas bandara ini kita lakukan penguatan keamanan siber. • Bimbingan Teknis Sistem Deteksi Konten • Melaksanakan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengamanan pada objek vital yang strategis dan fasilitas publik • Pelatihan dan Pengembangan Petugas Keamanan Gedung Kementerian BUMN, Masjid KBUMN, dan Rumah Dinas KBUMN • "Pengembangan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara sistem pengamanan berdasarkan evaluasi. • Peningkatan Kapasitas ASN bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini		
--	--	--	--	--	--

Pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi kelompok nak (kesiapsiagaan)

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme	Integrasi pelaksanaan pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana Terorisme.	- BNPT - Kemenkes - Kemnaker - KPAI - KPPPA	- Bimtek Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme - Finalisasi Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Secara Hybrid "Koordinasi terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat" "Koordinasi terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA di Kabupaten Bima, NTB" "Koordinasi terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur" "Koordinasi terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur" "Koordinasi terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA di Poso, Sulawesi Tengah" - Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Team (EMT) Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Dan Keamanan Kesehatan (Health Security) Tahun 2024 Dimana salah satu prioritas sasaran EMT adalah pelayanan medis terhadap kelompok rentan (anak-anak, lansia, bumil, dsb)	- Terselenggaranya Bimtek Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme - Tersusunnya Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan - Terlaksananya Koordinasi terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA di Bekasi, Bima, Probolinggo, dan Poso - Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Emergency Medical Team (EMT) Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Dan Keamanan Kesehatan (Health Security) Tahun 2024 Dimana salah satu prioritas sasaran EMT adalah pelayanan medis terhadap kelompok rentan (anak-anak, lansia, bumil, dsb) akibat situasi bencana dan / atau krisis kesehatan - Tersusunnya Pedoman Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme - Terselenggaranya Rapat Evaluasi dalam Rangka Pengawasan terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA

				akibat situasi bencana dan / atau krisis kesehatan • Penyusunan Pedoman Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme • Rapat Evaluasi dalam Rangka Pengawasan terkait Efektivitas Pencegahan Anak Terpapar Paham Radikalisme dan Terorisme Untuk Siswa/i SMP dan SMA	
--	--	--	--	--	--

FOKUS 7:

Deradikalisasi di dalam Lapas

Strategi (1): Menyusun standar kompetensi petugas yang bersinergi dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan kebutuhan atas perangkat peningkatan kapasitas petugas yang berkesesuaian dengan prinsip yang ada dalam RAN ini

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penyusunan standar kompetensi minimum petugas menangani tahanan dan narapidana teroris yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam RAN ini, termasuk di dalamnya materi ketahanan terhadap potensi terpapar ideologi ekstrem.	Adanya standar kompetensi minimum kapasitas petugas yang menangani tahanan dan narapidana teroris.	Kemenkumham	Legalisasi Standar Penanganan Narapidana Terorisme Perempuan	Terselenggaranya Legalisasi Standar Penanganan Narapidana Terorisme Perempuan
2	Pengembangan kurikulum dan/atau perangkat untuk petugas yang komprehensif untuk kategori latihan umum dan khusus sebelum dan pada	Adanya kurikulum dan buku panduan, buku saku, yang dimiliki oleh semua petugas yang berhadapan dengan	Kemenkumham	Legalisasi Modul Penanganan Narapidana Terorisme Perempuan	Terselenggaranya Legalisasi Modul Penanganan Narapidana Terorisme Perempuan

	saat masa layanan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakomodir dalam RAN ini.	tahanan dan narapidana teroris.			
3	Rekrutmen petugas yang menangani tahanan dan narapidana teroris sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakomodasi dalam RAN ini.	Adanya rekrutmen petugas yang menangani tahanan dan narapidana teroris sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakomodir di dalam RAN ini.	Kemenkumham	Standar Perekrutan Wali Napiter bagi Petugas Pemasayarakatan	Tersusunnya Standar Perekrutan Wali Napiter bagi Petugas Pemasayarakatan
4	Pelatihan umum dan khusus bagi semua petugas dalam menangani tahanan dan narapidana teroris yang terus diperbarui melalui mekanisme pelatihan pra layanan dan masa layanan yang sesuai dengan prinsip yang diakomodir di dalam RAN ini.	Adanya pelatihan untuk petugas yang berhadapan dengan tahanan dan narapidana teroris.	Kemenkumham	- Pilot Training Penanganan Narapidana Teroris Perempuan di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) (Mendukung Kegiatan Yayasan Prasasti Perdamaian) - Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Teroris bagi Petugas Pemasayarakatan (AIDA)	- Terselenggaranya Pilot Training Penanganan Narapidana Teroris Perempuan di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan (LPP) (Mendukung Kegiatan Yayasan Prasasti Perdamaian) - Terselenggaranya Pelatihan Penguatan Perspektif Korban Teroris bagi Petugas Pemasayarakatan (AIDA)

Strategi (2): Melakukan pengkajian teoritik dan praktik mekanisme penilaian untuk pengelolaan tahanan dan narapidana teroris memperhatikan kekhususan pada perempuan dan anak serta membangun mekanismenya yang bersinergi dengan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan kebutuhan atas mekanisme penilaian risiko dan kebutuhan dalam proses rehabilitasi narapidana, pengelolaan tahanan /narapidana teroris untuk pengelolaan tahanan dan narapidana teroris dengan memperhatikan kekhususan pada perempuan dan anak.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Kajian teoritik dan praktik mengenai mekanisme penilaian untuk pengelolaan tahanan dan	Adanya ukur mekanisme klasifikasi kebutuhan dan risiko untuk pengelolaan	Kemenkumham	Legalisasi Standard dan Modul Penanganan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Teroris	Tercapai

	narapidana teroris memperhatikan kekhususan pada perempuan dan anak.	tahanan dan narapidana teroris untuk mengukur efektivitas tinjauan terukur dari hasil evaluasi.			Terdapat kurang lebih 20 napiter yang dipindahkan ke Lapas Khusus Kelas IIB Sentul
2	Penempatan dan perlakuan (kebutuhan) tahanan dan narapidana teroris sesuai dengan mekanisme yang menunjang rehabilitasinya.	Penerimaan, penilaian, dan sistem klasifikasi yang efektif untuk tahanan dan/atau narapidana baru yang mengintegrasikan unsur pengelolaan tahanan dan narapidana teroris.	BNPT	Rapat finalisasi hasil verifikasi	Terselenggaranya Rapat finalisasi hasil verifikasi

Strategi (3): Optimalisasi keberhasilan program deradikalisasi yang selaras dengan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan).

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penyusunan indikator keberhasilan program deradikalisasi yang mempertimbangkan temuan tim peninjau program deradikalisasi.	Adanya indikator keberhasilan program deradikalisasi yang menjadi rujukan bersama berbagai pemangku kepentingan.	- BNPT - Kemenkumham	- Laporan Telaahan Petugas Terkait Perkembangan Hasil Pembinaan terhadap Napiter - rapat pengolahan data individual terhadap napiter	- Tercapai - Adanya alat ukur AKURAD - Terselenggaranya rapat pengolahan data individual terhadap napiter
2	Peninjauan program deradikalisasi di Lapas dan Rutan antara lain dengan metode pemutusan (disengagement) kekecewaan	Adanya peninjauan program deradikalisasi di Lapas dan Rutan	- BNPT - Kemenkumham	- Kegiatan Identifikasi dan penilaian bagi napiter - Kegiatan Supervisi tahun 2024	- Identifikasi terhadap 100 napiter - Terselenggaranya kegiatan supervisi 2024

3	Pengadaan program yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko (individual).	Adanya program yang sesuai dengan kebutuhan risiko (individu) termasuk program intervensi dan kebutuhan sarana dan prasarana.	BNPT	Kegiatan Rehabilitasi kepada napiter di lapas tersebar	Terselenggaranya 104 kegiatan terhadap 351 napiter
4	Penyusunan perangkat program deradikalisasi dengan memasukkan aspek pemutusan (disengagement) yang berbasis pemasyarakatan, termasuk kemungkinan adanya metode rekonsiliasi.	Pengadaan kegiatan termasuk konseling dan dukungan psikologi; program program perilaku kognitif; intervensi intervensi pekerjaan sosial; dialog berdasarkan keyakinan; pendidikan; pelatihan keahlian sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan risiko; terapi-terapi kreatif; terapi fisik (contohnya yoga, olahraga, latihan); kegiatan keluarga; dan sosial, budaya, serta rekreasi	Kemenkumham	Kegiatan Dialog bersama AIDA terhadap Napiter	Terselenggaranya Kegiatan Dialog bersama AIDA terhadap Napiter

Strategi (4): Optimalisasi program deradikalisasi berbasis pada pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi khususnya bagi narapidana teroris kepada komunitas dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan dan risiko individualnya yang selaras dengan Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan).

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Peninjauan program deradikalisasi berbasis pada pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi	Adanya hasil tinjauan terhadap program pembinaan dan perencanaan rehabilitasi dan reintegrasi yang berbasis kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan individualnya.	- BNPT - Kemenkumham	- Kegiatan pembinaan bagi napiter di lapas tersebar - Pendampingan Ikrar Setia NKRI bagi Napiter	- Reintegrasi 6 kegiatan terhadap 87 orang. - Memastikan Napiter yang melaksanakan Ikrar Setia NKRI telah dilaksanakan sesuai dengan aturan.

	hususnya bagi narapidana teroris kepada komunitas dan keluarganya yang sesuai kebutuhan dan risiko individualnya					
2	Pengadaan program pembinaan termasuk deradikalisasi berbasis pada pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi individual narapidana teroris dengan memasukkan pemutusan (disengagement) yang berbasis pemasyarakatan dan metode rekonsiliasi yang ditujukan bagi tahanan dan/atau narapidana yang teridentifikasi dalam kelompok tahanan/narapidana teroris	Adanya program deradikalisasi yang berbasis pada pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi individual narapidana teroris dengan memasukkan pemutusan (disengagement) yang berbasis pemasyarakatan dan metode rekonsiliasi yang ditujukan bagi tahanan dan/atau narapidana yang teridentifikasi dalam kelompok tahanan/narapidana teroris	Kemenkumham	Kegiatan Dialog (AIDA) dan Deradikalisasi (BNPT) tahun 2024 (Anggaran AIDA dan BNPT)	Beberapa Napiter Mengalami Penurunan Resiko.	
3	Persiapan integrasi narapidana teroris ke masyarakat yang sistemik yang meliputi konseling agama dan psikologi, penguatan ekonomi, kesadaran sosial, monitoring dan evaluasi (berupa kunjungan rumah) yang sesuai dengan prinsip dalam RAN PE ini termasuk jika dibutuhkan melibatkan peran perempuan dalam dialog mencegah stigma, terekonsiliasi, dan lain-lain.	kegiatan reintegrasi sosial kepada napiter di lapas tersebar	BNPT	Adanya mekanisme pelaksanaan integrasi narapidana teroris ke Masyarakat yang sistemik dan efektif, dan pemberdayaan di Masyarakat.	Reintegrasi 6 kegiatan terhadap 87 napiter	

Strategi (5): Membangun mekanisme penanganan anak yang terlibat dalam kasus ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (recruited child) di sistem pemasyarakatan yang menyelaraskan dengan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan).

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penyusunan instrumen penilaian untuk penanganan anak didik PAS (narapidana anak-Andik PAS) yang terlibat dalam kasus Terorisme yang terintegrasi dengan pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana Terorisme.	Adanya instrumen sebagai mekanisme penanganan anak didik PAS (narapidana anak Andik PAS) yang terlibat dalam kasus Terorisme yang terintegrasi dengan pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana Terorisme sesuai dengan prinsip dalam RAN ini	Kemenkumham	Standar dan SOP Perlakuan Anak Kasus Terorisme (AKT)	Terselenggaranya Standar dan SOP Perlakuan Anak Kasus Terorisme (AKT)
2	Penilaian kebutuhan berdasarkan instrumen yang disusun.	Adanya penilaian kebutuhan sebagai mekanisme penanganan anak didik PAS (narapidana anak-Andik PAS) yang terlibat dalam kasus Terorisme yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini.	BNPT	Konsultasi teknis lanjutan	Terselenggaranya konsultasi teknis lanjutan

Strategi (6): Pengintegrasian Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan program reformasi Lapas/Rutan untuk menunjang penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang	Pembuatan Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang	- Kejaugung - Kemenkumham	- Ceramah kepada terdakwa dalam tahap 2 maupun dalam proses persidangan agar para terdakwa terguagah untuk kembali ke NKRI" - Laporan Kerja Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku dalam	Terselenggaranya Ceramah kepada terdakwa dalam tahap 2 maupun dalam proses persidangan agar para terdakwa terguagah untuk kembali ke NKRI

	mengintegrasikan program reformasi Lapas/Rutan untuk menunjang penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	mengintegrasikan program reformasi Lapas/Rutan untuk menunjang penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		rangka Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2024. Penyusunan Standar kompetensi Minimum bagi Petugas Pemasyarakatan	- Tersusunnya Laporan Kerja Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2024 - Tersusunnya Standar kompetensi Minimum bagi Petugas Pemasyarakatan
--	--	--	--	--	--

Fokus 8:

Peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan

Strategi (1): Pengoptimalisasian kinerja deradikalisasi di luar Lapas melalui penyusunan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan program yang berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Persiapan perumusan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	Adanya kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan yang berdasarkan pada peta kebutuhan program berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	- BNPT - Kemenkumham	- Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder terkait indikator pengukuran tingkat radikal terorisme yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penilaian keberhasilan program deradikalisasi - Penyusunan Modul Reintegrasi Klien	- Tersosialisasinya alat ukur radikal terorisme (AKURAD) - Adanya alat ukur radikal terorisme yang lebih terbaru - Draf modul reintegrasi klien
2	Pelaksanaan penggunaan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan	Adanya bahan evaluasi hasil penggunaan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan	BNPT	Optimalisasi penggunaan alat ukur tingkat radikal terorisme pada program deradikalisasi.	Alat Ukur Radikal Terorisme (AKURAD) yang lebih optimal

	mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.			
--	--	--	--	--	--

Strategi (2): Pengoptimalisasian perangkat program deradikalisasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di luar Lapas/Rutan dengan mengutamakan mekanisme pemutusan (disengagement) terlebih dahulu untuk individu yang teridentifikasi sebagai ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan peta kondisi untuk memisahkan individu yang berisiko dan perekut dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak dengan dimungkinkannya berbagai bentuk rumah singgah (halfway house) khususnya bagi mantan narapidana teroris.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pengadaan program deradikalisasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di luar Lapas/Rutan dengan mengutamakan mekanisme pemutusan (disengagement) yang sistemik memperhatikan tahapan pembuatan program sehingga terdiri dari persiapan dan pelaksanaan	Adanya kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan yang berdasarkan pada peta kebutuhan program berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	- BNPT - Kemendagri	- Optimalisasi program deradikalisasi di luar lapas melalui peningkatan koordinasi dan sinergi multi stakeholder yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan dalam upaya pemutusan (disengagement) - Identifikasi awal - Pembinaan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan Wawasan Keagamaan - Pembinaan Kewirausahaan - Pembinaan Deradikalisasi Terpadu	- Identifikasi awal (19 Provinsi) - Pembinaan Wawasan Kebangsaan (19 Provinsi) - Pembinaan Wawasan Keagamaan (19 Provinsi) - Pembinaan Kewirausahaan (19 Provinsi) - Pembinaan Deradikalisasi Terpadu (6 Provinsi) - Program Deradikalisasi kepada WNI terasosiasi FTF di rumah singgah Wisma Deradikalisasi - Terwujudnya program deradikalisasi bagi mantan napiter yang telah bersosialisasi dalam masyarakat - Terlaksananya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi daerah yang telah

						6. Program Deradikalisasi kepada WNI terasosiasi FTF di rumah singgah Wisma Deradikalisasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi daerah yang telah melaksanakan RAN-PE dan daerah yang rawan akan terorisme	melaksanakan RAN-PE dan daerah yang rawan akan terorisme
--	--	--	--	--	--	---	--

Strategi (3): Optimalisasi kapasitas aparatur dan/atau pelaksana deradikalisasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di luar Lapas/Rutan yang sesuai dengan prinsip dalam RAN PE ini.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penyusunan standar kompetensi aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi radikal dan ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE ini.	Adanya standar kompetensi aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi memiliki radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	- BNPT - BPIP - Kemenpan RB	- Koordinasi lebih lanjut dengan K/L terkait mengenai penyusunan standar kompetensi aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi radikal dan ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme "Pada dasarnya penyusunan Standar Kompetensi didasarkan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. - Kementerian PANRB memberikan fasilitas dalam penyusunan	- Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pilar 1 Fokus 8 RAN PE Tahun 2024: Optimalisasi Deradikalisasi Luar Lapas - Koordinasi dilaksanakan untuk mendukung program deradikalisasi pada tahap: - Identifikasi dan Penilaian - Pembinaan Wawasan Kebangsaan - Pembinaan Wawasan Keagamaan - Pembinaan Kewirausahaan - Penanganan Perempuan dan Anak Dihadiri oleh : - Kemenkopolhukam - BIN - Densus 88 AT Polri - Kemendagri - Kemenkumham - Kemensos - Kemenag

				Standar Kompetensi bagi instansi pembina jabatan yang dimaksud dalam Aksi PE di atas. sehingga dalam hal ini Kementerian PANRB membantu BNPT dalam mengidentifikasi standar kompetensi jabatan ASN yang menangani orang yang diidentifikasi radikal dan ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme. - Telah disusun kampus kompetensinya sehingga langkah berikutnya dapat diusulkan untuk penyusunan Standar Kompetensi Jabatannya." - Penyusunan materi standar - Pembinaan ideologi Pancasila bagi Diplomat	8. Kemenhan 9. Kemendikbudristek 10. Baznas 11. Kemenkop UKM 12. Kemenparekraf 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 14. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat - Tersusunnya materi standar - Pembinaan ideologi Pancasila bagi Diplomat	8. Kemenhan 9. Kemendikbudristek 10. Baznas 11. Kemenkop UKM 12. Kemenparekraf 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 14. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat - Tersusunnya materi standar - Pembinaan ideologi Pancasila bagi Diplomat
2	Pengembangan kurikulum dan/atau perangkat untuk aparatur yang komprehensif untuk kategori latihan umum dan khusus pra dan pada masa layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE ini.	Adanya kurikulum yang wajib dilaksanakan aparatur yang berhadapan dan menangani orang yang diidentifikasi radikal dan ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme, termasuk di antaranya mekanisme kerja monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di mana pelatihan terus dilakukan pembaruan melalui mekanisme pelatihan pra-layanan dan masa layanan.	- BNPT - Kemenpan RB	- KemenPAN terlibat dalam penyusunan Perpres Moderasi Beragama dengan Kementerian Keagamaan - Koordinasi lebih lanjut dengan K/L terkait mengenai pengembangan kurikulum dan/atau perangkat untuk aparatur yang komprehensif - Pada renaksi ini KemenPAN ikut andil dalam penyusunan Rpermen Bela Negara dengan Kementerian Pertahanan.	https://beraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023 - Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pilar 1 Fokus 8 RAN PE Tahun 2024: Optimalisasi Deradikalisasi Luar Lapas. - Koordinasi dilaksanakan untuk mendukung program deradikalisasi pada tahap: - Identifikasi dan Penilaian - Pembinaan Wawasan Kebangsaan	https://beraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023 - Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Pilar 1 Fokus 8 RAN PE Tahun 2024: Optimalisasi Deradikalisasi Luar Lapas. - Koordinasi dilaksanakan untuk mendukung program deradikalisasi pada tahap: - Identifikasi dan Penilaian - Pembinaan Wawasan Kebangsaan
	Pelatihan umum dan khusus bagi semua aparatur yang menangani orang yang teridentifikasi radikal dan	Adanya aparatur yang kompeten sesuai dengan pelatihan yang dimaksud, khususnya dalam melaksanakan tugas menangani	BNPT	Pelaksanaan Pelatihan/Workshop bagi aparatur yang melaksanakan deradikalisasi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan alat ukur radikal terorisme.	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan alat ukur radikal terorisme.

	ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah Terorisme, termasuk di antaranya mekanisme kerja monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di mana pelatihan terus diperbarui melalui mekanisme pelatihan pra layanan dan masa layanan yang sesuai dengan prinsip prinsip yang ada di dalam RAN ini.	orang yang diidentifikasi radikal dan ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.		menangani orang yang teridentifikasi radikal dan ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah Terorisme,	
3	Rekrutmen aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi memiliki tingkat radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang sesuai dengan prinsip yang ada di dalam RAN ini.	Adanya rekrutmen dan penyeleksian aparatur yang memiliki integritas, minat, bakat, dan keterampilan dalam menangani orang yang diidentifikasi memiliki tingkat radikalisme dan/atau Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	BNPT	Rekrutmen ASN Tahun 2024	Adanya ASN yang kompeten dalam melaksanakan program deradikalisasi.

Strategi (4): Optimalisasi kondisi kelembagaan dan dan masyarakat yang mendukung individu yang di deradikalisasi masyarakat di Luar Lapas.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Penguatan kelembagaan dan masyarakat melalui pembuatan standar pelatihan dan sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan faktor-faktor reintegrasi riil, seperti memastikan proses berlangsung dengan damai, dan	Kelembagaan dan masyarakat yang kuat dengan adanya standar dukungan program deradikalisasi di tingkat desa/kelurahan yang mendukung individu yang di deradikalisasi di luar Lapas, termasuk pelibatan peran	- BNPT - Kemendagri	Penguatan koordinasi dan pelibatan di tingkat desa/kelurahan terkait pendampingan kepada sasaran deradikalisasi saat proses reintegrasi berlangsung, terutama kepada keluarga dan anak.	- Sosialisasi Tingkat Pusat Bersama Kemendes PDTT - Di tingkat daerah khususnya saat pemulangan mantan napiter dan orang atau kelompok orang yang sudah

	terjadinya pergeseran peran dari pihak yang terlibat.	pemerintah daerah berdasarkan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pemantauan.		Sosialisasi melalui media online (zoom meeting) kepada Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol terkait deradikalisasi pada daerah-daerah yang rawan teroris	terpapar paham radikal terorisme - Penggalangan intelijen di daerah hingga tingkat desa dan RT/RW - Meminimalisir terjadinya radikalisasi berulang kepada mantan napiter dan masyarakat yang belum terkontaminasi.
2	Identifikasi kebutuhan sesuai standar kebutuhan di tingkat desa/kelurahan. Selanjutnya kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang mendukung individu yang di deradikalisasi di luar lapas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk peningkatan efektivitas peran pemerintah daerah.	Tersedianya lingkungan yang mendukung program deradikalisasi di tingkat desa/kelurahan, di antaranya perbaikan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang mendukung individu yang di deradikalisasi di luar Lapas, termasuk pelibatan peran pemerintah daerah berdasarkan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pemantauan.	- BNPT - Kemensos	- Bantuan Sosial untuk Keluarga Eks Napiter (Atensi) - Penguatan koordinasi dan pelibatan Pemerintah Daerah hingga tingkat desa/kelurahan terkait identifikasi kebutuhan sasaran deradikalisasi saat proses reintegrasi berlangsung, terutama kepada keluarga dan anak.	- Bantuan sosial untuk keluarga eks napiter di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat diberikan kepada 61 KPM. - Koordinasi terkait program deradikalisasi di 19 provinsi.

PILAR 2: PENEGAKAN HUKUM, PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, SERTA PENGUATAN KERANGKA LEGISLASI NASIONAL

FOKUS 1:

Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme

Strategi (1): Pelaksanaan koordinasi yang efektif antar-lembaga terkait, untuk mengidentifikasi berbagai aspek penegakan hukum, guna mengoptimalkan efek jera (*deterrent effect*) dari penegakan hukum untuk mendukung upaya PE mengarah pada terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Identifikasi bentuk-bentuk koordinasi yang ada saat ini.	Pengaturan koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum dalam mendukung upaya PE.	- BNPT - LPSK - Kejagung	- Koordinasi terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana terorisme lintas K/L - Rekapitulasi kegiatan Menghadiri Rapat Koordinasi kementerian/lembaga Terkait oleh Direktorat TPTLN Jampidum dan Direktorat Idpolhukam berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana terorisme Tahun 2024	- Telah terlaksana - Untuk tahun 2024 ini, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi sejak bulan Januari s.d. bulan Oktober 2024 telah melaksanakan sebanyak 125 kegiatan koordinasi (100%) baik dengan pihak BNPT, densus, maupun badiklat.
2.	Penyusunan mekanisme Standar Prosedur Operasional koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum untuk mendukung upaya PE.	Pengaturan koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum dalam mendukung upaya PE.	- BNPT - LPSK - Kejagung	- Koordinasi terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana terorisme lintas K/L - Rekapitulasi kegiatan Menghadiri Rapat Koordinasi kementerian/lembaga Terkait oleh Direktorat TPTLN Jampidum dan Direktorat Idpolhukam berkenaan dengan penanganan perkara tindak pidana terorisme Tahun 2024	- Mendukung penyusunan dari BNPT. - Untuk tahun 2024 ini, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi sejak bulan Januari s.d. bulan Oktober 2024 telah melaksanakan sebanyak 125

						kegiatan koordinasi (100%) baik dengan pihak BNPT, densus, maupun badiklat.
--	--	--	--	--	--	---

Strategi (2): Penyusunan laporan berkala tentang penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Pembuatan laporan tahunan penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	Terselenggaranya koordinasi penyusunan laporan tahunan penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	- BNPT - LPSK - Kejagung	- Laporan Tahunan LPSK dan Laporan Sinergitas - Laporan Tahunan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan lintas Negara mengenai penanganan perkara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme Tahun 2024	- Tersusunnya bahan laporan LPSK - Tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan lintas Negara mengenai penanganan perkara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme 2024

Strategi (3): Perlunya unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Pembentukan unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	Terbentuknya unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	- BNPT - Kejagung - Komisi Kejaksaan - Kompolnas	Sosialisasi kanal pengaduan Subdit Pam SDO dan Puspenkum (Pos PPH/PPM) sebagai unit kerja di lingkungan Kejaksaan yang bertugas menangani pengaduan terkait personel Kejaksaan RI yang diduga melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme	Terselenggaranya Sosialisasi kanal pengaduan Subdit Pam SDO dan Puspenkum (Pos PPH/PPM) sebagai unit kerja di lingkungan Kejaksaan yang bertugas menangani pengaduan terkait personel Kejaksaan RI yang diduga melakukan pelanggaran dalam

				- Sekretariat Komisi Kejaksaan RI telah membentuk Tim Unit Aduan Khusus Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor KEP-09/SKK/01/2023 Tentang Tim Unit Aduan Khusus Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme - Unit Aduan Khusus Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Terorisme dan Pendanaan Terorisme - Penelitian	- penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme - Tim aduan khusus telah terbentuk.
--	--	--	--	--	---

Strategi (4): Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan mekanisme pertukaran informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi.	Tersusunnya kebijakan mekanisme pertukaran informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi.	- BNPT - PPATK - BIN - Kemenkeu - Kejagung	- PPATK akan menyusun RPerPPATK mengenai prioritas pemenuhan permintaan informasi ke PPATK. - Menyusun Nota Kesepahaman antara Badan Intelijen Negara dan Kemendikbud tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Selanjutnya menyusun	Sepanjang Tahun 2024, Direktorat Penindakan menginisiasi 5 Perjanjian Kerja Sama, 1 Rancangan Perban BNPT dan 2 Draft Perjanjian Kerjasama yaitu: Daftar PKS

				Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN dan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Radikalisme, dan Kecurangan di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta menyusun Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tentang Sinergisitas dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Pengawasan dan Pengamanan. - Saat ini telah dilaksanakan pembahasan tahap awal terkait rencana kerja sama antara Ditjen Pemasjarakatan Kemenkumham dan Deputi bidang Kontra Intelijen BIN tentang Penanganan Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme. - Inquiry pada aplikasi sistem informasi pendanaan terorisme (SIPENDAR) terkait analisis transaksi keuangan pihak-pihak yang diduga terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme.	1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Nomor: HK.02.00/06/2024 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Menunjang Penanggulangan Terorisme 2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HK.02.00/07/2024 Tentang Sinergisitas Penanggulangan Terorisme 3. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Bagi Perempuan dan Anak Nomor HK.02.00/12/20024 4. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Sinergisitas
--	--	--	--	--	---

			• Menyediakan data hasil analisis yang akurat untuk mempertajam output pertukaran informasi terkait penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. • Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI Nomor: HK.02.00/06/2024 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Menunjang Penanggulangan Terorisme. • Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HK.02.00/07/2024 Tentang Sinergisitas Penanggulangan Terorisme. • Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Bagi	Penanggulangan Terorisme Nomor HK.02.00/07/2024 5. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Nomor HK.02.00/08/2024 Daftar Peraturan 1. Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Konten Negatif Bermuatan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Ruang Siber Draft MoU/PKS 1. Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT an Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial pada Penanggulangan Terorisme 2. Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham
--	--	--	---	---

				• Perampokan dan Anak Nomor HK. 02.00/12/20024. • Pembuatan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Sinergisitas Penanggulangan Terorisme Nomor HK.02.00/07/2024. • Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Nomor HK.02.00/08/2024. • Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Konten Negatif Bermuatan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di Ruang Siber • Penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT an Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang	• PPA TK telah menyusun Peraturan PPA TK Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Penilaian Prioritas Pemenuhan Permintaan Informasi ke PPA TK. • Telah terlaksana joint analisis dengan Densus 88 dan Satgas FTF BNPT. • Ditetapkannya kerja sama tersebut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
--	--	--	--	--	---

				Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial pada Penanggungan Terorisme. Rekapitulasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2024.		- Pada tahun 2024, PPATK telah menyampaikan 17 informasi/hasil analisis ke apgakum - PPATK telah melakukan 13 kali release SIPENDAR sejak 2021, yang terdiri dari 492 Korporasi & 7526 Individu - Telah terlaksana joint analisis dengan Densus 88 dan Satgas FTF BNPT. - Tersusunnya Laporan/informasi intelijen terkait perkembangan kelompok ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di wilayah Indonesia sesuai dengan permintaan baik internal BNPT maupun kementerian/lembaga lainnya. - Tersusunnya Rekapitulasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2024.
2.	Peningkatan jumlah penyampaian informasi terkait pidana pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi, baik atas dasar permintaan maupun inisiatif masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	Penyampaian informasi terkait penegakan hukum tindak pidana pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi, baik atas dasar permintaan maupun inisiatif masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	- BNPT - PPATK - BIN - Kemenkeu - Kejagung	- PPATK akan menyampaikan jumlah Hasil Analisis (HA) terkait tindak pidana pendanaan terorisme baik atas dasar permintaan dari penyidik maupun proaktif dari PPATK. - PPATK akan mengkinikan watchlist SIPENDAR. - Melakukan penyampaian inquiry analisis transaksi keuangan kepada PPATK terkait individu/entitas yang diduga berkaitan dengan pendanaan terorisme melalui platform SIPENDAR. - Pertukaran informasi terkait dengan potensi tindak pidana pendanaan terorisme. - Join analisis terkait pemutakhiran data profil DTTOT. - Join analisis terkait pemutakhiran data profil Foreign Terrorist Fighter. - Laporan/informasi intelijen terkait perkembangan kelompok ekstrimisme	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial pada Penanggungan Terorisme. Rekapitulasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2024.	- Pada tahun 2024, PPATK telah menyampaikan 17 informasi/hasil analisis ke apgakum - PPATK telah melakukan 13 kali release SIPENDAR sejak 2021, yang terdiri dari 492 Korporasi & 7526 Individu - Telah terlaksana joint analisis dengan Densus 88 dan Satgas FTF BNPT. - Tersusunnya Laporan/informasi intelijen terkait perkembangan kelompok ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di wilayah Indonesia sesuai dengan permintaan baik internal BNPT maupun kementerian/lembaga lainnya. - Tersusunnya Rekapitulasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2024.

	masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.		Kejagung	- sham Non-Profit Organizer (NPO) dalam aktivitas pendanaan terorisme. - Menyusun Sprint Tim CTF Direktorat Kontra Terorisme BIN. - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transnational Organized Crime bagi Petugas Bea Cukai di level manajerial maupun operasional. - Rekapitulasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2024.	Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme. - Telah dilakukan pelatihan terhadap 30 peserta pelatihan dari DJBC. - Tercapai.
4.	Peningkatan jumlah penanganan dan penanggulangan pendanaan Terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko pendanaan Terorisme pada instansi penegak hukum, untuk mendukung upaya PE.	Penanganan dan penanggulangan pendanaan Terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko pendanaan Terorisme pada instansi penegak hukum, untuk mendukung upaya PE.	- PPATK - BNPT - BIN - Kemenkeu - Kejagung	- Program Mentoring Berbasis Risiko NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM. - Peningkatan jumlah watchlist individual dan entitas terindikasi pendanaan terorisme pada SIPENDAR. - Terlibat dalam Tim Operasionalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme BNPT TA 2024. - Berkoordinasi dengan Densus 88 AT Polri mengenai penegakan hukum TPPT. - Penyusunan analytic tools (tahap penyempurnaan) atas transaksi impor-ekspor atas barang yang diduga terkait dengan terorisme dan	- Telah dilaksanakan Program Mentoring Berbasis Risiko terkait pendanaan terorisme di Yogyakarta pada bulan Februari 2024 - PPATK telah melakukan 13 kali release SIPENDAR sejak 2021, yang terdiri dari 492 Korporasi & 7526 Individu - Telah dilakukan mandatori analytic tools (tahap penyempurnaan) atas transaksi impor-ekspor atas barang yang diduga terkait dengan terorisme dan pendanaan terorisme dengan memanfaatkan tools manajemen risiko.

					pendanaan terorisme dengan memanfaatkan tools manajemen risiko. - Operasionalisasi Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme BNPT. - Rekapitulasi Rapat dan/atau Koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penanganan dan penanggulangan pendanaan terorisme Tahun 2024.	
--	--	--	--	--	--	--

FOKUS 2:

Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Strategi (1): Penyediaan buku pedoman dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Penyusunan buku pedoman dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE	Terselenggaranya proses penyusunan buku pedoman dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE.	- BNPT - Kejagung - Mahkamah Agung	- Pembuatan buku panduan penanganan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme - Revisi Buku Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. - Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juli 2024 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 174/KMS/SK.HK2.2/VII/2024	Disahkannya Surat Keputusan Nomor 174/KMS/SK.HK2.2/VII/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Terorisme.

					tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Terorisme.	
--	--	--	--	--	---	--

Strategi (2): Peningkatan kapasitas penegak hukum secara berkelanjutan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Penyelenggaraan pelatihan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE.	Terselenggaranya pelatihan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE.	• BNPT • PPATK • Kejagung	• Pelatihan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dan pendanaan terorisme baik di dalam negeri maupun luar negeri • Pelatihan Penyusunan, Distribusi dan Pelaporan Konten Kontra Narasi/Propaganda Radikal Terorisme bagi Aparat Pemerintah • Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme Integrative (K/L/D/I, Polri dan TNI) • Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Petugas Lapas dalam Penanganan Napiter • Pelatihan Intelijen bagi Aparat Pemerintah dalam rangka Penanggulangan Terorisme • Pelatihan Tiga Pilar dalam Rangka Antisipasi Potensi Radikal Terorisme • Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme serta Kurikulum Tahun 2024	• Telah dilaksanakan Pelatihan dengan target output 620 personel Aparatur Pemerintah dalam Rangka Penanggulangan Terorisme. • Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pelatihan TPPT bagi apgakum di Pusdiklat PPATK.

2.	Mengikutsertakan para penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme di universitas-universitas di dalam negeri, untuk mendukung upaya PE.	Keikutsertaan para penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme di universitas-universitas di dalam negeri, untuk mendukung upaya PE.	• BNPT • Kejaung	• Rekapitulasi kegiatan pelaksanaan tugas sebagai narasumber dalam Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi dengan materi tindak pidana terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	• Tersusunnya Rekapitulasi kegiatan pelaksanaan tugas sebagai narasumber dalam Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi dengan materi tindak pidana terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3.	Pengiriman aparat penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme ke luar negeri, untuk mendukung upaya PE.	Keikutsertaan aparat penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme ke luar negeri, untuk mendukung upaya PE.	• BNPT • PPATK • Kejaung	• Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di luar negeri terkait dengan anti teror yang diselenggarakan oleh Centinel Singapore. • Rekapitulasi kegiatan mengikuti diklat dan atau Pelatihan Luar Negeri terkait dengan Tindak Pidana Terorisme dan LN.	• Telah dilaksanakan pelatihan di luar negeri terkait dengan anti teror yang diselenggarakan oleh Centinel Singapore.

FOKUS 3:

Pelindungan saksi dan korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Strategi (1): Meningkatkan upaya pencegahan di lingkungan kampus pada wilayah rentan, melalui pemanfaatan wadah pelaporan saksi, korban, dan pelapor tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Optimalisasi wadah pelaporan saksi, korban, dan pelapor yang sudah disediakan di beberapa kampus, sebagai ruang pelaporan saksi, korban, dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terbentuknya wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban, dan pelapor.	• LPSK • BNPT • Kemenpan RB • Kemendikbud	• Kementerian PANRB telah memiliki kanal aduan yaitu Aduanasn.go.id yang mana merupakan wadah bagi aduan terhadap aksi radikalisme yang dilakukan oleh Oknum ASN, dan pada pelaksanaannya dilakukan SKB dengan beberapa instansi terkait tentang SKB Penanganan Radikalisme. Untuk pencegahan kementerian kominfo sudah mengembangkan aplikasi aduan bagi ASN yang terpapar radikalisme.	• Setiap permohonan ditindaklanjuti. • Terlaksana sesuai jadwal dan terdapat standar pelayanan minimal yang perlu diberikan oleh Satuan Tugas dalam menjalankan tugas mengimplementasikan

				telah dilakukan rapat secara berkala guna menindaklanjuti aduan yang masuk dan melibatkan 11 Instansi Pemerintah, berikutnya diberikan surat rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran radikalisme oleh Menteri PANRB sebagai Sekretariat. • Sosialisasi dan FGD di Universitas Muhammadiyah Gorontalo pada 01 Feb 2024. • Sosialisasi di wilayah Jawa Timur pada 19 Mei 2024. • Sosialisasi di Universitas Pattimura, Ambon pada 21 Juni 2024. • Pelatihan Sahabat saksi Korban di Maluku pada 20-24 Agustus 2024. • Sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon pada 28 Agustus 2024. • Kuliah Umum LPSK di UIN Malang pada 18 Sept 2024. • Audiensi Mahasiswa Universitas Pertiba (Bangka-Belitung) pada 16 Januari 2024. • Audiensi peserta Youth Camp KBB YLBHI di LPSK tgl 20 Sept 2024. • Penanganan kekerasan di bidang Pendidikan • Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Melibatkan Pokja dan K/L serta jaringan masyarakat sipil) • Kampanye Anti Kekerasan • Rapat Koordinasi Nasional Satgas Penanganan Kekerasan (Melibatkan Satuan Tugas dan Pimpinan Perguruan Tinggi)	Permendikbudristek-PPKS.
--	--	--	--	--	--------------------------

				Koordinasi antara BNPT dan LPSK	- Penerimaan Permohonan Perlindungan ke LPSK melalui wadah yang telah ada - Kementerian PANRB telah memiliki kanal aduan yaitu Aduanasn.go.id yang mana merupakan wadah bagi aduan terhadap aksi radikalisme yang dilakukan oleh Oknum ASN, dan pada pelaksanaannya dilakukan SKB dengan beberapa instansi terkait tentang SKB Penanganan Radikalisme. Untuk pencegahan kementerian kominfo sudah mengembangkan aplikasi aduan bagi ASN yang terpapar radikalisme. telah dilakukan rapat secara berkala guna menindaklanjuti aduan yang masuk dan melibatkan 11 Instansi Pemerintah, berikutnya diberikan surat rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran radikalisme oleh Menteri PANRB sebagai Sekretariat	Setiap permohonan Perlindungan ke LPSK ditindaklanjuti.	
2.	Pengembangan wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kampus pada wilayah rentan, yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban, dan pelapor.	Terbentuknya wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan saksi, korban, dan pelapor.	- LPSK - Kemenpan RB				
3.	Menyusun basis data saksi, korban, dan pelapor yang melapor atas tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di lingkungan kampus.	Tersusunnya basis data saksi, korban, dan pelapor yang melapor atas tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di lingkungan kampus.	LPSK	Penyusunan Database LPSK.	Penyusunan Database LPSK dilaksanakan sesuai kebutuhan.		
4.	Pemanfaatan basis data saksi, korban, dan pelapor dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, dalam upaya PE maupun penegakan hukum.	Digunakannya basis data saksi, korban, dan pelapor dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, dalam upaya PE maupun penegakan hukum.	LPSK	Penyediaan data perlindungan LPSK.	Penyediaan data perlindungan LPSK berjalan sesuai penyusunan data LPSK.		

Strategi (2): Penyusunan skema dana abadi korban (*victim trustfund*) untuk korban Terorisme untuk mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Kajian mengenai skema dana abadi korban (<i>victim trustfund</i>) untuk korban Terorisme untuk mendukung upaya PE.	Terlaksananya kajian mengenai skema dana abadi korban (<i>victim trustfund</i>) untuk korban Terorisme untuk mendukung upaya PE.	LPSK	Telah dilaksanakan Rapat pembahasan dengan LIRS tentang praktik Victim Trust Fund di berbagai negara pada tanggal 1-5 Oktober 2024.	Tersusunnya bahan kajian

Strategi (3): Pengembangan skema rekonsiliatif antara korban dan pelaku untuk mendukung upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Kajian mengenai pembentukan kebijakan mengenai rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	Terlaksananya kajian mengenai pembentukan kebijakan mengenai rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	BNPT	Pelaksanaan Silaturahmi Kebangsaan antara Korban Tindak Pidana Terorisme dan Mantan Pelaku sebagai amanat dari Peraturan Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terlaksananya Silaturahmi Kebangsaan antara Korban Tindak Pidana Terorisme dan Mantan Pelaku sebagai amanat dari Peraturan Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

Strategi (4): Pembentukan kebijakan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Proses pembentukan kebijakan terkait dengan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	Terselenggaranya proses pembentukan kebijakan dari perancangan hingga pengesahan.	BNPT	Silaturahmi Kebangsaan antara Korban Tindak Pidana Terorisme dan Mantan Pelaku Terorisme di Malang, Jawa Timur.	Terlaksananya Silaturahmi Kebangsaan antara Korban Tindak Pidana Terorisme dan Mantan Pelaku Terorisme di Malang, Jawa Timur

FOKUS 5:

Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Strategi (1): Penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan mekanisme yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyusunan peraturan dan pengesahan hukum internasional, yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Menginventarisasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terinventarisasinya dan teranalisisnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kemenkumham	Melakukan Inventarisasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Baik yang bersifat regeling, beleids, dan beshickking.	Terinventarisasinya 44 peraturan terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan baik yang bersifat regeling, beleids, dan beshickking.
2.	Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Tersusunnya hasil kajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kemenkumham	Mengumpulkan kajian, dan melakukan analisis awal terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terdapat 13 kajian yang terkait Undang-Undang Terorisme. 10 kajian terkait Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan Terorisme. Terdapat 5 indikasi dan permasalahan awal dalam Undang-Undang Terorisme.

Strategi (2): Penyusunan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1.	Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak	Tersusunnya naskah akademik dan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.	- TNI - Polri	Melaksanakan kajian tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.	Kegiatan dilakukan untuk memberi masukan terkait dengan pengadaan dan perizinan senjata api dan bahan peledak.

PILAR 3 KEMITRAAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

FOKUS 1 : Peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme serta pendanaannya.

STRATEGI (1.1) : Mengidentifikasi program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Melakukan pemetaan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Tersedianya peta kementerian/ lembaga yang melaksanakan program-program baik pusat maupun daerah yang terdiri atas penentuan bentuk platform koordinasi dan kerangka kerja.	BNPT	I-KHub akan melakukan Penguatan inisiatif lokal pencegahan ekstremisme melalui I-KHub on CT/VE di 6 Provinsi (Banten, DKI, Lampung, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara)	Terlaksananya Penguatan inisiatif lokal pencegahan ekstremisme melalui I-KHub on CT/VE di 6 Provinsi (Banten, DKI, Lampung, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara)
2	Menyiapkan platform kerja sama terkait dengan publikasi dan pengaksesan program-program.	Tersedianya SOP kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait publikasi dan pengaksesan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	BNPT	I-KHub melakukan pengelolaan platform I-KHub BNPT secara berkelanjutan terkait publikasi dan pengaksesan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terkelolanya platform I-KHub BNPT secara berkelanjutan terkait publikasi dan pengaksesan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

STRATEGI (1.2) : Mendata dan mendokumentasikan para pemangku kepentingan di masyarakat yang bergerak di bidang atau memiliki program yang relevan dan terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pendataan dan dokumentasi para pemangku kepentingan di masyarakat yang bergerak di bidang	Direktori para pemangku kepentingan di masyarakat.	BNPT	I-KHub akan melakukan pengembangan sistem I-KHub 2.1 yang memuat berbagai fitur terbaru, antara lain: penyempurnaan	Dikembangkannya sistem I-KHub 2.1 yang memuat berbagai fitur terbaru, antara lain: penyempurnaan

	atau memiliki program yang relevan dan terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.			pelaporan RAN PE, penyesuaian tampilan dan perbaikan bugs dan error, sinkronisasi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang PCVE melalui Platform K-Hub PVE Community.	pelaporan RAN PE, penyesuaian tampilan dan perbaikan bugs dan error, sinkronisasi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang PCVE melalui Platform K-Hub PVE Community
--	--	--	--	--	---

STRATEGI 1.3 Menyediakan platform kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Pendataan dan dokumentasi para pemangku kepentingan di masyarakat yang bergerak di bidang atau memiliki program yang relevan dan terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kebijakan mengenai kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.	PPATK	Arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo (Presidential Lecture) secara langsung di Istana Presiden dan Ketua Komite TPPU beserta seluruh Menteri/Kepala anggota Komite TPPU dan pimpinan Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa, dan Profesi pada Rabu, 17 April 2024 untuk mencanangkan Gerakan Nasional 22 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menjadi momentum yang kuat dan pijakan (stepping stones) yang signifikan untuk memperkuat sinergi dan kemitraan antara PPATK dengan pemangku kepentingan. Arahan Presiden RI tersebut menumbuhkan peluang yang besar untuk penguatan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya pemerintah, perusahaan swasta selaku Pihak Pelapor, akademisi, mahasiswa, Pelajar SMA, organisasi masyarakat, praktisi teknologi informasi, seniman, maupun masyarakat.	- Dilaksanakannya arahan presiden terkait Gerakan Nasional 22 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menjadi momentum yang kuat dan pijakan (stepping stones) yang signifikan untuk memperkuat sinergi dan kemitraan antara PPATK dengan pemangku kepentingan. Arahan Presiden RI tersebut menumbuhkan peluang yang besar untuk penguatan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya pemerintah, perusahaan swasta selaku Pihak Pelapor, akademisi, mahasiswa, Pelajar SMA, organisasi masyarakat, praktisi teknologi informasi, seniman, maupun masyarakat. - Dimanaftakannya Keanggotaan Indonesia di FATF sejak Oktober 2023 mendorong rasa kepemilikan (sense of belongings) dan peningkatan kapasitas diantara stakeholder

				Keanggotaan Indonesia di FATF sejak Oktober 2023 mendorong rasa kepemilikan (sense of belongings) dan peningkatan kapasitas diantara stakeholders terkait untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka penanganan tindak pidana ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, terutama dari aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.	
2	Menyusun publikasi berkala mengenai peluang kerja sama pengelolaan program-program PE kementerian dan lembaga	Materi publikasi berkala mengenai peluang kerja sama pengelolaan program-program PE kementerian dan lembaga.	- BNPT - PPATK	4. Publikasi Podcast PPATK “JUMATAN” yang membahas tindak pidana pendanaan terorisme. - I-Khub BNPT membuka potensi dan kolaborasi dengan mitra pembangunan dalam pengelolaan program PE antar Kementerian dan Lembaga. - I-Khub secara berkala akan mempublikasikan produk pengetahuan yang dapat menjadi rekomendasi program-program PE di K/L seperti I-Khub BNPT CT/VE Outlook dan I-Khub Policy Analysis yang akan didiseminasikan melalui program Indonesia CT/VE Update 2024. - Pengelolaan platform I-Khub BNPT secara berkelanjutan terkait publikasi dan pengaksesan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. - PPATK telah melakukan update Buku-buku terkait terorisme dan pendanaan terorisme di Perpustakaan Digital PPATK.	- Terdapatnya Update buku-buku terorisme di perpustakaan digital PPATK - Terbitnya Jurnal AML CFT https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/issue/view/6 - Update Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sehingga dapat mempublikasikan larangan melakukan hubungan usaha dengan orang atau organisasi terduga teroris. - Publikasi konten di media sosial dan website resmi PPATK mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. - Publikasi Podcast PPATK “JUMATAN” yang membahas tindak pidana pendanaan terorisme.

				• PPATK telah melakukan update Jurnal AML CFT yang memuat tulisan mengenai terorisme dan pendanaan terorisme. • PPATK telah melakukan update konten edukasi publik di media sosial dan website resmi PPATK mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. • Update PPATK telah melakukan update publikasi Podcast PPATK “JUMATAN” yang membahas tindak pidana pendanaan terorisme. Buku-buku terkait terorisme dan pendanaan terorisme di Perpustakaan Digital PPATK.			• PPATK bekerja sama dengan BNPT menyelenggarakan FGD penguatan rancang bangun pencegahan NPO (Ormas) disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme berbasis risiko pada 21-22 Maret 2024 bertempat di Jakarta Pusat. Kegiatan ini mengundang sharing session Expert dari Uni Eropa. FGD ini juga mengkolaborasi pihak Pemerintah (PPATK, BNPT, Kemenag, Kemsos, Kemendagri, Kemlu, Kemenkumham, dan BAZNAS) dengan stakeholders Ormas (kitabisa.com, Dompot Dhuafa, dan PKPU/Human Initiative). • Peningkatan partisipasi dan kontribusi aktif dalam APU-PPT global dengan menjadi tuan rumah (hosting) salah satu working group di FATF, yaitu FATF International Co-
				• PPATK telah melakukan update Jurnal AML CFT yang memuat tulisan mengenai terorisme dan pendanaan terorisme. • PPATK telah melakukan update konten edukasi publik di media sosial dan website resmi PPATK mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. • Update PPATK telah melakukan update publikasi Podcast PPATK “JUMATAN” yang membahas tindak pidana pendanaan terorisme. Buku-buku terkait terorisme dan pendanaan terorisme di Perpustakaan Digital PPATK.			• PPATK bekerja sama dengan BNPT menyelenggarakan FGD penguatan rancang bangun pencegahan NPO (Ormas) disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme berbasis risiko pada 21-22 Maret 2024 bertempat di Jakarta Pusat. Kegiatan ini mengundang sharing session Expert dari Uni Eropa. FGD ini juga mengkolaborasi pihak Pemerintah (PPATK, BNPT, Kemenag, Kemsos, Kemendagri, Kemlu, Kemenkumham, dan BAZNAS) dengan stakeholders Ormas (kitabisa.com, Dompot Dhuafa, dan PKPU/Human Initiative). • Peningkatan partisipasi dan kontribusi aktif dalam APU-PPT global dengan menjadi tuan rumah (hosting) salah satu working group di FATF, yaitu FATF International Co-
3	Pertemuan berkala antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.	Forum pertemuan tahunan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.	• BNPT • PPATK	• PPATK bekerja sama dengan BI menyelenggarakan Seminar Internasional di Bali pada 17 Mei 2024 dengan tema penguatan kerja sama internasional pada penyitaan aset dan deteksi aliran keuangan gelap pada siber dengan salah satu sesinya membahas keuangan siber untuk pendanaan terorisme. • PPATK telah bekerja sama dengan BI dalam penyelenggaraan Seminar Internasional di Bali pada 17 Mei 2024 dengan tema penguatan kerja sama internasional pada penyitaan aset dan deteksi aliran keuangan gelap pada siber dengan salah satu sesinya membahas keuangan siber untuk pendanaan terorisme. • PPATK telah mengoordinasikan Indonesia yang diwakili oleh pegawai BNPT menjadi FATF Lead Reviewer untuk IO 10 mengenai pencegahan pendanaan terorisme untuk Nepal.			• PPATK bekerja sama dengan BNPT menyelenggarakan FGD penguatan rancang bangun pencegahan NPO (Ormas) disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme berbasis risiko pada 21-22 Maret 2024 bertempat di Jakarta Pusat. Kegiatan ini mengundang sharing session Expert dari Uni Eropa. FGD ini juga mengkolaborasi pihak Pemerintah (PPATK, BNPT, Kemenag, Kemsos, Kemendagri, Kemlu, Kemenkumham, dan BAZNAS) dengan stakeholders Ormas (kitabisa.com, Dompot Dhuafa, dan PKPU/Human Initiative). • Peningkatan partisipasi dan kontribusi aktif dalam APU-PPT global dengan menjadi tuan rumah (hosting) salah satu working group di FATF, yaitu FATF International Co-

				Proses reviewing ini akan mendorong knowledge sharing dan benchmarking secara signifikan. • PPATK telah meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif dalam APU-PPT global dengan menjadi tuan rumah (hosting) salah satu working group di FATF, yaitu FATF International Co-operation Review Group (ICRG) di Bali pada 15-16 Mei 2024. • Sekretariat I-Khub BNPT akan menyelenggarakan Donor Coordination Meeting 2 kali dalam setahun sebagai wadah koordinasi para pemangku kepentingan dan mengunggahnya dalam direktori I-KHub BNPT.	operation Review Group (ICRG) di Bali pada 15-16 Mei 2024. • Mendorong pegawai BNPT menjadi FATF Lead Reviewer untuk IO 10 mengenai pencegahan pendanaan terorisme untuk Nepal. Proses reviewing ini akan mendorong knowledge sharing dan benchmarking secara signifikan. • PPATK bekerja sama dengan BI akan menyelenggarakan Seminar Internasional di Bali pada 17 Mei 2024 dengan tema penguatan kerja sama internasional pada penyitaan aset dan deteksi aliran keuangan gelap pada siber dengan salah satu sesinya membahas keuangan siber untuk pendanaan terorisme. • Diselenggarakannya Donor Coordination Meeting 2 kali dalam setahun sebagai wadah koordinasi para pemangku kepentingan dan mengunggahnya dalam direktori I-KHub BNPT.
--	--	--	--	--	--

STRATEGI (2) Menyempurnakan mekanisme pengaturan bantuan teknis (non finansial) terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Identifikasi sumber pendanaan internasional terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	Direktori lembaga donor internasional yang memiliki program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • Kemlu	• Integrasi data profil mitra pembangunan dan program dari Bappenas melalui donor coordination platform ke platform I-KHub • Keberlanjutan Kemitraan Indonesia dengan Global Community Engagement and Resilience Fund	• Telah teridentifikasi CSO lokal di bidang penanggulangan ekstremisme yang akan menerima pendanaan berdasarkan hasil koordinasi interkem

	yang Mengarah pada Terorisme.			(GCERF) untuk pendanaan CSO lokal di bidang penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang dimulai sejak Juli 2023.	Partisipasi Kemlu dalam Rapat Board of Supervisor JC/LEC pada setiap triwulan tahun anggaran aktif
2	Menyusun mekanisme instrumen pendanaan internasional terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (melihat sistem di Bappenas).	Direktori lembaga donor internasional yang memiliki program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	PPATK	UNODC sebagai lembaga donor mengadakan pelatihan mengenai perampasan aset pada tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme yang ditujukan kepada aparat penegak hukum dan stakeholders swasta selaku Pihak Pelapor dalam Rezim APU-PPT.	UNODC telah menyelenggarakan policy dialogue and peluncuran (launching) Buku Saku Panduan Penanganan Tindak Pidana yang Menggunakan Aset Kripto pada 8 Maret 2024 di Jakarta Pusat. Buku Saku tersebut dibiayai oleh UNODC dengan kontributor dari PPATK, OJK, Bappebti, BSSN, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, Kemenkominfo, dan pihak swasta yaitu Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO). Buku ini menyoroti penggunaan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme kini telah menjadi salah satu emerging threat di Indonesia. Aset kripto juga ditengarai saat ini mulai digunakan sebagai alat transaksi bagi kelompok teroris dalam menggelang dana untuk membiayai kegiatan mereka. Buku ini juga menegaskan bahwa apabila aset kripto sebagai alat kejahatan maka dapat dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti aset kripto dapat dikembalikan secara proporsional kepada para korban, jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (dipersamakan dengan delik terhadap harta). Selanjutnya mengenai barang bukti aset kripto dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dapat dirampas untuk Negara.

FOKUS 2 :

Peningkatan kerja sama internasional pada instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme

STRATEGI (1): Memperkuat kerja sama dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kerja sama internasional yang bersifat formal dan informal dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Perumusan bentuk mekanisme dan koordinasi dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terbentuknya Tim satuan kerja dan basis data untuk bentuk kerja sama melalui mekanisme informasi dan koordinasi yang efektif dalam meningkatkan dan menguatkan kerja sama hukum khususnya kerja sama internasional terutama dalam merespons kebutuhan dalam RAN ini.	Kemlu	- Keaktifan Peran Kemlu sebagai Board of Supervisor pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Bersama Polri & Kepolisian Australia - Partisipasi aktif pada 8th Review of the UN Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS). - Partisipasi aktif pada Coordinating Committee Meeting Global Counterterrorism Forum (GCTF) dan Kepemimpinan pada Countering Violent Extremism Working Group (GCTF CVE WG). - Partisipasi aktif pada pertemuan ASEAN terkait terorisme, antara lain ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM) Plus EWG on CT; ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) WG on Counter-Terrorism, dan pertemuan lainnya, seperti ASEAN-Australia Dialogue on CT; serta ASEAN-Australia Workshop to Exchange Practices on Community Resilience Programs to Counter Radicalisation and Violent Extremism.	- Partisipasi Kemlu dalam Rapat Board of Supervisor JCLEC pada setiap triwulan tahun anggaran aktif - Partisipasi aktif pada 8th Review of the UN Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS). - Partisipasi aktif pada Coordinating Committee Meeting Global Counterterrorism Forum (GCTF) dan Kepemimpinan pada Countering Violent Extremism Working Group (GCTF CVE WG). - Partisipasi aktif pada pertemuan ASEAN terkait terorisme, antara lain ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM) Plus EWG on CT; ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) WG on Counter-Terrorism, dan pertemuan lainnya, seperti ASEAN-Australia Dialogue on CT; serta ASEAN-Australia Workshop to Exchange Practices on Community Resilience Programs to Counter Radicalisation and Violent Extremism.

2	Identifikasi pemangku kepentingan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	• BNPT • Kemlu	• Keaktifan Peran Kemlu sebagai Board of Supervisor pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Bersama Polri & Kepolisian Australia • Pelaksanaan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Satgas DTTOT)	• Kemlu berpartisipasi secara aktif dalam Rapat Board of Supervisor JCLEC setiap triwulan tahun anggaran aktif • Terlaksananya Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Satgas DTTOT)
3	Pembentukan satuan kerja.	• BNPT • Kemlu	• Keaktifan Peran Kemlu sebagai Board of Supervisor pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Bersama Polri & Kepolisian Australia • Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Satgas DTTOT)	• Terlaksananya peran aktif Kemlu sebagai Board of Supervisor pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Bersama Polri & Kepolisian Australia • Terlaksananya Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Satgas DTTOT)
4	Pembentukan pusat data.	Kemlu	Keaktifan Peran Kemlu sebagai Board of Supervisor pada Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) Bersama Polri & Kepolisian Australia	• Kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) telah terlaksana pada tanggal 27-29 Agustus 2024, berhasil mempertemukan para menteri ASEAN untuk membahas strategi dalam mengatasi kejahatan transnasional, termasuk terorisme. • ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) telah terlaksana pada tanggal 26-28 Juni 2024, menjadi forum strategis bagi pejabat senior ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan lintas negara. • Kegiatan SOMTC Working Group on Counter-Terrorism (WG on CT) dan 3rd ASEAN-Australia Counter-

				Terrorism Dialogue telah terlaksana pada tanggal 5-6 Juni 2024, dengan fokus pada kolaborasi ASEAN-Australia dalam memperkuat penanggulangan terorisme melalui dialog dan berbagi praktik terbaik. • Workshop ASEAN-Australia Counter Terrorism bertema Good Practice Approaches to Countering Violent Extremism, Hate Speech, and Disinformation Online telah terlaksana pada tanggal 30-31 Januari 2024, bertujuan memperkuat kapasitas negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi ancaman di dunia maya. • 11th ASEAN-Russia Joint Working Group on Counter Terrorism and Transnational Crime (JWG on CTTC) telah terlaksana pada tanggal 3 April 2024, mempererat kerja sama antara ASEAN dan Rusia dalam mengatasi terorisme serta kejahatan lintas negara melalui koordinasi dan program bersama. • ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2024, sebagai platform penting untuk membahas isu-isu keamanan dan pertahanan kawasan, termasuk langkah penanggulangan terorisme. • ASEAN Defence Senior Officials' Meeting (ADSOM) dan ADSOM-Plus telah terlaksana pada tanggal 24-27 September 2024, memperkuat koordinasi strategis di tingkat pejabat senior untuk mendukung implementasi kebijakan keamanan kawasan.
--	--	--	--	---

STRATEGI (2) Meningkatkan kerja sama internasional secara bilateral, regional, dan multilateral dalam konteks penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

No.	Aksi	Keluaran	K/L	Kegiatan	Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aktif maupun pasif kepemimpinan Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terbentuknya standar/norma internasional terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	- BNPT - Kemlu	- Partisipasi aktif Indonesia dalam Global Counter Terrorism Forum (GCTF) - Kepemimpinan dalam Countering Violent Extremism (CVE) Working Group Global Counter Terrorism Forum bersama Australia. - Partisipasi aktif pada pertemuan ASEAN terkait terorisme, antara lain pada ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM), ADMIM-Plus; ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) WG on Counter- Terrorism, dan pertemuan pada mekanisme regional. 3rd IndonesiaPCVE Strategic Dialogue-Deep Dive on Foreign Terrorist Fighters, di Canberra, Australia - ASEAN – U.S. Regional Workshop - ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) and Its Related Meetings - ASEAN Partners Meeting Implementation of the Bali Work Plan 2019 – 2025 - ASEAN-AUSTRALIA Counter Terrorism Dialogue - ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop	- Kemlu telah hadir dan memberikan dukungan serta koordinasi substansi terkait pembahasan Counterterrorism bagi Polri dan BNPT selaku instansi penjurur pada pertemuan di bawah mekanisme AMMTC, SOMTC, SOMTC WG on CT & ASEAN-Australia CT Dialogue, ASEAN-Russia JWG on CTTC, dan kegiatan regional lainnya. - Partisipasi dalam Global Counterterrorism Forum (GCTF) Coordinating Committee Meeting, GCTF Ministerial Meeting, termasuk memimpin Countering Violent Extremism (CVE) Working Group. - Partisipasi dalam United Nations International Conference on Victims of Terrorism di Spanyol, pada 8–9 Oktober 2024. - Menginisiasi Resolusi Penanganan Anak Terasosiasi Terorisme yang berhasil diadopsi di CCPCJ. - Co-sponsor penyelenggaraan side event di sela UNTOC terkait keterkaitan pendanaan terorisme dengan kejahatan lintas negara. - Terselenggaranya Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force Meeting

				• Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force Meeting • Board Member Meeting GCERF • Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) • Focus Group Discussion on UK National Strategy in Countering Terrorism antara BNPT, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan University of Coventry di Jakarta (Agustus 2023) • High Level Meeting dan Joint Working Group on Counter Terrorism antara Indonesia dan Slovakia • High Level Visit dengan The General Directorate for Studies and Documentation (DGED) Kerajaan Maroko di Maroko (Agustus 2023) • Kerja sama dengan Hedayah dalam Research on Preventing Extremism and Violent Extremism Online in Southeast Asia di tingkat regional • Kerjasama dengan International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT) dalam pelaksanaan program terkait penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan tersangka terorisme dalam konteks kejahatan internasional • Kerjasama teknis dengan UNOCT, UNODC, ICAO, CTED, INTERPOL melalui Counter Terrorist Travel Program • Kerjasama teknis dengan UNODC dan Pemerintah Australia pada “Enhancing knowledge, operational capacities and cross-border information- sharing to counter	• Terlaksananya peran aktif sebagai Board Member Meeting GCERF • Terlaksananya peran aktif dalam Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) • Terselenggaranya Focus Group Discussion on UK National Strategy in Countering Terrorism antara BNPT, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan University of Coventry di Jakarta (Agustus 2023) • Terselenggaranya High Level Meeting dan Joint Working Group on Counter Terrorism antara Indonesia dan Slowakia • Terselenggaranya High Level Visit dengan The General Directorate for Studies and Documentation (DGED) Kerajaan Maroko di Maroko (Agustus 2023) • Terlaksananya Kerjasama dengan International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT) dalam pelaksanaan program terkait penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan tersangka terorisme dalam konteks kejahatan internasionala • Terlaksananya Kerjasama teknis dengan UNOCT, UNODC, ICAO, CTED, INTERPOL melalui Counter Terrorist Travel Program • Terlaksananya Kerjasama teknis dengan UNODC dan Pemerintah Australia pada “Enhancing
--	--	--	--	--	--

			threats posed by foreign terrorist fighters in Indonesia • Kerjasama teknis dengan UNODC dan UNICRI keberlanjutan Project "Building a safer South-East Asia by preventing and responding to the use of chemical weapons by terrorists and other non-state actors in Indonesia" • Kerjasama teknis dengan UNODC keberlanjutan STRIVE Juvenile • Partisipasi aktif dalam Konferensi Internasional Tingkat Menteri ke-4 "No Money For Terror" (NMFT) Tahun 2024 • Partisipasi Aktif dalam Official Launch of the IJ Regional Project on Building Capacity and Improving Cooperation Mechanisms on Countering the Financing of Terrorism in Southeast Asia di Malta • Partisipasi aktif dalam pelaksanaan Sidang Pleno FATF dalam rangka Keanggotaan Tetap Indonesia dalam Forum Financial Action Task Force (FATF) • Penjajakan Kerjasama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Hungaria • Pertemuan bilateral bersama Dubai State Security (DSS) di Dubai • Pertemuan ke-9 Konsultasi Bilateral Kerjasama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia di Canberra, Australia • Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF)	knowledge, operational capacities and cross-border • Terlaksananya Kerjasama teknis dengan UNODC dan UNICRI keberlanjutan Project "Building a safer South-East Asia by preventing and responding to the use of chemical weapons by terrorists and other non-state actors in Indonesia" • Terlaksananya Kerjasama teknis dengan UNODC keberlanjutan STRIVE Juvenile • Terlaksananya Partisipasi aktif dalam Konferensi Internasional Tingkat Menteri ke-4 "No Money For Terror" (NMFT) Tahun 2024 • Terlaksananya Partisipasi Aktif dalam Official Launch of the IJ Regional Project on Building Capacity and Improving Cooperation Mechanisms on Countering the Financing of Terrorism in Southeast Asia di Malta • Terlaksananya Partisipasi aktif dalam pelaksanaan Sidang Pleno FATF dalam rangka Keanggotaan Tetap Indonesia dalam Forum Financial Action Task Force (FATF) • terlaksananya Penjajakan Kerjasama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Hungaria • Terselenggaranya Pertemuan bilateral bersama Dubai State Security (DSS) di Dubai
--	--	--	--	---

			• SOMTC Working Group on Counter Terrorism (SOMTC WG on CT) • SOMTC Working Group on General Transnational Crime Metters (SOMTC WG on GTCM) • Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) • The 1st Joint Working Group on Counter Terrorism between Indonesia and Canada di Jakarta (Januari 2023) • The 1st Joint Working Group on Counter Terrorism between Indonesia and France di Bogor (September 2023)	• Terselenggaranya Pertemuan ke-9 Konsultasi Bilateral Kerjasama Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dan Australia di Canberra, Australia • Terlaksananya peran aktif dalam Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) • Terlaksananya peran aktif dalam SOMTC Working Group on Counter Terrorism (SOMTC WG on CT) • Terlaksananya peran aktif dalam SOMTC Working Group on General Transnational Crime Metters (SOMTC WG on GTCM) • Terselenggaranya The 1st Joint Working Group on Counter Terrorism between Indonesia and Canada di Jakarta (Januari 2023) • Terselenggaranya The 1st Joint Working Group on Counter Terrorism between Indonesia and France di Bogor (September 2023)
--	--	--	--	--



DAFTAR PUSTAKA

- AB Widyanta, Abdul Hanif, dkk, *Menampak Dampak, Meneruskan Kebijakan; Laporan Penelitian Capaian dan Keberlanjutan Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan 2020- 2024 (RAN PE)*, Jakarta: INFID dan IRE, November 2023.
- Antara News. "Kalteng Integrasikan Kurikulum Pencegahan Ekstremisme Pada Pendidikan," 13 Juli 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3632853/kalteng-integrasikan-kurikulum-pencegahan-ekstremisme-pada-pendidikan>.
- Ardito Ramadhan dan Icha Rastika. "Kapolri Minta Polisi Waspada, Perang Israel-Palestina Bisa Bangkitkan Sel Teroris." *Kompas*, 1 November 2023.
- Bank Indonesia. "Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi Pada Triwulan II 2023," Agustus 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2521523.aspx.
- Bima Bagaskara. "Cerita Amira, Dulu Jadi Korban Kini Melawan Perundungan." *Detiknews*, 28 Juni 2023. <https://www.detik.com/jabar/kuliner/d-6795907/cerita-amira-dulu-jadi-korban-kini-melawan-perundungan>.
- CNBC Indonesia. "Indeks Pembangunan Manusia RI 2023 Membaik Di Level 74,39," 15 November 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231115122527-4-489195/indeks-pembangunan-manusia-ri-2023-membaik-di-level-7439>.
- DW. "Januari-Oktober 2023 Densus 88 Tangkap 104 Tersangka Teroris." DW, 3 November 2023. <https://www.dw.com/id/densus-88-tangkap-104-tersangka-teroris-sepanjang-januari-oktober-2023/a-67296335>.
- EkoSchoolmedia. "Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan Telah Terbentuk Di 104.870 Sekolah." *Schoolmedia*, 13 November 2023. <https://news.schoolmedia.id/berita/Tim-Pencegahan-dan-Penanganan-Kekerasan-di-Satuan-Pendidikan-Telah-Terbentuk-di-104870-Sekolah-5503>.
- Hedar. "Launching Kampung Moderasi Beragama Desa Mammi, Desa Belia Surganya Kerukunan." *Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Barat*, 26 Juli 2023. <https://sulbar.kemenag.go.id/wilayah/launching-kampung-moderasi-beragama-desa-mammi-desa-belia-surganya-kerukunan-slJW3>.
- I-KHUB BNPT. "Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook." Jakarta: I-KHUB BNPT, 2023.

- IPAC. "Ex-Militants In The Nickel Industry In Central Sulawesi." Jakarta: IPAC, 2024.
- Indah Pangestu Amaritasari. "Post Truth and Role of International Relation Study." *Journal of Social Political Sciences* 1, no. 2 (2020).
- Institute for Economic and Peace. "Global Peace Index 2022." Sydney: Institute for Economic and Peace, June 2022.
- . "Global Peace Index 2023." Sydney: Institute for Economic and Peace, June 2023.
- . "Global Terrorism Index 2023." Sydney: Institute for Economic and Peace, 2023.
- KHUB. "Melacak Dampak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) PCVE Di Indonesia," 2023. <https://khub.id/outlook/melacakdampak>.
- Munajat, "Laporan Mid-Term Evaluation Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2021-2022 (RAN PE), Juli 2023.
- PanRB. "Tangani Terorisme, Indonesia Tawarkan Tiga Strategi Ke Dunia," 21 September 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/tangani-terorisme-indonesia-tawarkan-tiga-strategi-ke-dunia>.
- Saadatuddaraen. "Jelang Pemilu, Polisi Tangerang Tingkatkan Kewaspadaan Ancaman Terorisme." *Radio Republik Indonesia*, 6 November 2023.
- Teuku Razasyah, Alfrida Heanity Panjaitan, dkk, *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah (Sub-Nasional) untuk Melaksanakan RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan)*, Jakarta: BNPT-HARMONI-AEQUALIS, Juli 2023.
- Tugu Malang. "Gandeng BNPT, Kemenparekraf Ajak Masyarakat dan Eks Napi TerorisKembangkan Pariwisata di Daerah," 25 Maret 2023. <https://tugumalang.id/gandeng-bnpt-kemenparekraf-ajak-masyarakat-dan-eks-napi-teroris-kembangkan-pariwisata-di-daerah/>.
- United Nations. "Our Common Agenda Policy Brief 9 A New Agenda for Peace," 2023.
- World Economic Forum. "The Global Risk Report 2023." Geneva: World Economic Forum, 2023.
- Yohannes Mega Hendar. "Jerat Derita Anak Narapidana Terorisme." *Kompas*, 13 Februari 2023.

